

Edisi 73 Th. XL, 2009

ISSN : 1979-5912



Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FINISH



**Ketua DPR Minta Maaf
Belum Puaskan Publik**



E.E. Mangindaan : Mengawal Pemerintah Optimalkan Pembangunan Pro Rakyat

daftar isi

September 2009 tahun XL no. 73

1 Dari Redaksi

Laporan Utama

- 2 Ketua DPR Minta Maaf Belum Puaskan Publik
- 5 Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Darul Siska:
Belum Ada Parameter Jelas Fungsi Pengawasan DPR
- 8 Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo: DPR Tak Perlu Malu
Dapat Predikat Rapot Merah
- 10 Wakil Ketua FPP DPR Lukman Hakiem:
Proses Legislasi DPR Sarat Muatan Politis
- 12 Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Soetan Batoegana;
DPR Periode 2004-2009 Tidak Maksimal
- 15 Ketua FPKS Mahfud Sidik:
Citra dan Kinerja DPR Periode 2004-2009 Rendah
- 17 Direktur Program PSHK, Ronald Rofiandri:

Kemanusiaan

- 47 RUU Perfilman Akomodir Keinginan Insan Film
- 50 DPR selesai bahas RUU MKG; UPAYA KURANGI RESIKO
KORBAN BENCANA

53 Selebritis

Profil

- 54 E.E. Mangindaan : Mengawal Pemerintah Optimalkan
Pembangunan Pro Rakyat

Kunjungan Kerja

- 61 Komisi I DPR RI Tinjau Tiga PLB dan Resmikan Stasiun RRI
Daerah Perbatasan



- Target legislasi DPR terlalu muluk-muluk, perlu skala prioritas
- 19 Pengamat Politik dan otonomi daerah LIPI Dr. Siti Zuhroh:
Kekuasaan Besar Seret DPR Berkinerja Kurang Baik
 - 21 Direktur IBC Arief Nur Alam:
APBN Masih Elitis, Belum Berbasis Kinerja
 - 23 Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko:
Biaya Politik Mahal, DPR Rawan Korupsi
 - 24 Penguasaan Masalah, Kunci Sukses Relasi dengan DPR

Pengawasan

- 26 Dewan dan Pemerintah Jadikan Teroris Sebagai Musuh
Bersama
- 28 Mendesak, Payung Hukum Pemberantasan Terorisme
- 30 Lemah, Kontra Intelijen dan Kontra Terorisme Indonesia
- 32 Pansus DPT DPR;
PROSES PEMILU BERJALAN BAIK DI SEMUA TINGKATAN

Anggaran

- 35 RAPBN 2010: Pemulihan Perekonomian Nasional dan
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
- 38 DPR Kritis RAPBN 2010 Demi Kemakmuran Rakyat

Legislasi

- 45 DPR Perjuangkan Palang Merah Sebagai Lambang

- 65 Komisi II DPR Soroti Banyaknya Tenaga Honorar Yang
Belum Diangkat PNS
- 69 Pembangunan Infrastruktur NTT Lambat, Perlu Rencana
Menyeluruh
- 72 Komisi VI DPR Sesalkan Ketidakhadiran Direksi BUMN
Se-Kalteng
- 75 Pemerintah Daerah Harus Perhatikan Lembaga
Pendidikan Keagamaan
- 78 KORBAN FLU BABI DIRSUP PADANG KARENA KELALAIAN
PENCEGAHAN
- 81 Komisi X DPR RI Kaget Atas Ketidakjelasan Anggaran
Pendidikan

Sorotan

- 84 KESEDERHANAAN WARNAI
HUT MPR-DPR-RI KE-64

Liputan Khusus

- 86 Sayonara DPR... Vokalis DPR Yang Lengser Dari Senayan

Pernik

- 93 Paparan Sekjen DPR di depan Parlemen Korsel : Dukong
Proses Demokrasi Lewat Seni Wayang dan Pendidikan

Diplomasi

- 95 BKSAP DPR-RI; DARI SENAYAN KE KANCAH GLOBAL



foto: wikimedia.org/ The Press Secretary Office of the President of Indonesia

Parlementaria edisi 73 kali ini merupakan edisi terakhir bagi anggota DPR periode 2004-2009. Karena itulah yang disajikan dalam majalah dwi bulanan ini adalah kilas balik perjalanan DPR selama lima tahun pengabdian di lembaga perwakilan Senayan.

Banyak catatan dan prestasi ditoreh baik positif maupun negatif dalam mengisi kehidupan demokrasi. Satu hal yang patut dicatat adalah Dewan periode 2004-2009 telah berhasil mengembangkan kehidupan demokrasi yang makin transparan dan akuntabel. Artinya proses pengambilan keputusan politik di DPR telah banyak mewadahi partisipasi publik untuk lebih terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Secara kualitatif pelaksanaan tugas ketiga fungsi pokok Dewan lebih banyak diimplementasikan pada fungsi pengawasan. Seperti diakui pemerintah dalam berbagai kesempatan adanya peningkatan fungsi pengawasan DPR baik dalam rapat-rapat Komisi maupun fungsi pengawasan yang secara khusus dilakukan melalui hak-hak DPR.

Seperti banyaknya tim pengawas yang dibentuk diantaranya Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam, Tim Pengawas Lapindo serta dibentuknya beberapa Panitia Angket, BBM, Haji dan DPT. Demikian pula kewenangan yang cukup besar dimiliki

Dewan dimana hampir semua pejabat publik harus melalui proper test dan persetujuan Dewan.

Di bidang legislasi, dari target Prolegnas 2004-2009 sebanyak 284 RUU, hingga akhir Agustus 2009 baru diselesaikan 167 RUU. Sedangkan DPR periode 1999-2004 lalu berhasil menyelesaikan 175 UU, 35 RUU diantaranya merupakan RUU Inisiatif DPR. Penyelesaian 175 UU tersebut melebihi target UU No.25 tahun 2000 tentang Proenas sebanyak 120 UU.

Terlepas dari plus minus kinerja DPR, Ketua DPR Agung Lakosno mengakui DPR periode 2004-2009 masih belum dapat memuaskan semua pihak. Dalam perjalanannya dewan telah berusaha untuk memperkuat piranti lunak meliputi system, mekanisme dan prosedur untuk mengimplementasikan fungsi dan peran DPR.

Sedangkan piranti keras mencakup sarana, prasarana dan faktor pendukungnya seperti dukungan kualitas dan keahlian serta kapasitas SDM sebagai supporting system.

Ketua DPR menyatakan percaya, DPR hasil pemilu 2009 akan bekerja lebih baik lagi dan akan melanjutkan tongkat estafet bagi pembentukan demokrasi yang ideal melalui lembaga perwakilan rakyat yang bersendikan pada hakikat kemanusiaan yang berkeadilan sosial.

Ketua DPR Minta Maaf Belum Puaskan Publik

Perjalanan pengabdian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009, tinggal menghitung hari. Dengan segala daya upaya, di tengah situasi politik yang sangat dinamis, DPR telah memperlihatkan kinerja utamanya dalam bidang perundangan atau legislasi, pengawasan atau kontrol, dan penyusunan anggaran atau budget. Namun begitu, masih banyak ungkapan ketidakpuasan dan kritik tajam, kerap dilayangkan kepada lembaga perwakilan yang dipimpin Agung Laksono itu.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, selama lima tahun ini dia bersama pimpinan dan anggota Dewan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan kinerja yang terbaik, tetapi berbagai kendala menyebabkan tugas dan fungsi utama Dewan memang masih belum optimal. Oleh karena itu Agung sempat meminta maaf pada publik jika kinerja dewan belum memuaskan.

“Saya atas nama Dewan dan pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekurangan-kekurangan Dewan di dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya,” tuturnya pada saat peringatan HUT ke-64 MPR-DPR-

RI di depan sidang Paripurna baru-baru ini.

Terkait kinerja di bidang legislasi, Agung mengakui DPR telah belum berhasil mencapai target program legislasi nasional (prolegnas). Bahkan, lanjutnya, kemungkinan hingga akhir periode jabatannya, DPR hanya akan menyelesaikan sekitar 70 persen dari target 284 RUU. “Kita coba dan berusaha, meskipun undang-undang lain belum bisa diperkirakan nasibnya, seperti RUU Pengadilan Tipikor. Di daftar undang-undang yang prioritas untuk diselesaikan ada 39, tapi paling yang bisa dikejar total hanya 70%, *not bad*,” tandasnya.

Pengakuan sama dikemukakan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR Darul Siska bahwa kinerja DPR

periode 2004-2009 khususnya di bidang legislasi menurun dibandingkan dengan DPR periode 1999-2004. Karena itu perlu ada perbaikan sistem yang menyeluruh dari peningkatan kapasitas anggota dewan, penyediaan sistem pendukung yang memadai, serta perbaikan mekanisme kerja.

“Kami menyadari bahwa DPR periode sekarang tidak memenuhi harapan masyarakat. Atas dasar itulah akhirnya tim peningkatan kinerja ini lahir dengan harapan mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan DPR ke depan,” ungkap Darul Siska kepada pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

Meski demikian, anggota Tim Grand Desain dan Kinerja DPR,

Dzulkarnaen Djabbar menilai, secara kuantitas DPR saat ini kinerjanya lebih baik dibandingkan DPR periode 1999-2004. Hal itu dikatakan Dzulkarnaen pada diskusi "Evaluasi Kinerja DPR", Jumat (4/9), di Gedung DPR.

Dzulkarnaen menjabarkan, DPR periode saat ini telah menyelesaikan 179 pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Sebanyak 14 RUU tengah memasuki proses akhir dan siap disahkan sebelum periode ini berakhir pada 30 September mendatang. "DPR akan menyelenggarakan paripurna secara marathon untuk segera mengesahkan 21 RUU yang masih

menyebutkan kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR banyak yang belum memberi manfaat langsung pada kehidupan masyarakat. Tim yang sudah berusia dua tahun ini menunjukkan fakta bahwa dari daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009, dari jumlah 284 RUU hanya 42 RUU yang terkait kesejahteraan rakyat. Sementara, 78 RUU soal perekonomian dan paling banyak (159 RUU atau 56 persen) terkait bidang politik. Sisanya, lima RUU selain ketiga bidang tersebut. TKPK DPR menyimpulkan, belum optimalnya kinerja DPR dalam

penyediaan sistem pendukung yang memadai, serta perbaikan mekanisme kerja.

"Kami menyadari bahwa DPR periode sekarang tidak memenuhi harapan masyarakat. Atas dasar itulah akhirnya tim peningkatan kinerja ini lahir dengan harapan mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan DPR ke depan," ungkap Darul Siska kepada pers di Gedung MPR/DPR.

Masih soal penilaian kinerja DPR yang akan berakhir ini, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam pernyataan pers paling akhir Jumat lalu (4/9) memberi apresiasi positif. "Kalau dinilai 1 sampai 10, kinerja DPR saya beri nilai 7," kata Ketua Priyo saat diskusi 'Kinerja DPR' di Gedung DPR. Menurut Priyo, periode anggota dewan saat ini memang tidak sehebat dengan periode anggota dewan sebelumnya yang menggulingkan Gus Dur saat menjadi presiden. Namun tidak berarti pada periode Agung Laksono ini tidak menuai prestasi apapun.



dibahas," kata Dzulkarnaen.

Dengan demikian, menurutnya, jumlah RUU yang telah disahkan DPR akan berjumlah 193 ditambah dengan 11 UU Pemekaran. Jumlah ini dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian DPR sebelumnya. "Secara kuantitas, dari sisi legislasi, DPR sekarang sudah lebih baik. DPR 1999-2004 hanya menyelesaikan 175 RUU, sudah termasuk UU Pemekaran," lanjutnya.

Di bidang pengawasan, ia juga memaparkan, DPR paling banyak menggunakan hak-haknya, seperti hak angket dan hak interpelasi. Hak angket, diantaranya, hak angket tanker Pertamina, hak lelang gula ilegal, dan yang tengah berjalan hak angket kenaikan harga BBM, Haji dan angket DPT. Sebelumnya, anggota Tim Kajian Peningkatan Kinerja (TKPK) DPR yang lain, Eva Kusuma Sundari dalam laporan timnya tahun 2006 khususnya dalam bidang legislasi,

menghasilkan p r o d u k perundangan yang berkualitas di antaranya disebabkan oleh minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan UU, terutama penyusunan daftar RUU

dalam Prolegnas. Tiga tahun berikutnya, pada 14 Mei 2009, penilaian sama diungkapkan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR Darul Siska (Fraksi Golkar) mengakui, kinerja DPR periode 2004-2009 khususnya di bidang legislasi menurun dibandingkan dengan DPR periode 1999-2004. Karena itu perlu ada perbaikan sistem yang menyeluruh dari peningkatan kapasitas anggota dewan,



Tapi pada masa ini, tutur dia, budaya terlambat pun masih diterapkan oleh anggota DPR. Kalau dibandingkan dengan DPR pada masa orde baru, sangat jauh berbeda. "Kalau dulu saat presiden hadir di DPR maka semua anggota DPR sudah hadir semua. Kalau yang sekarang saat pidato 17-an, waktu presiden hadir banyak kursi-kursi yang masih kosong, saya agak miris melihatnya," ungkapnya.

Perbaikan ke Depan Namun demikian, Agung Laksono mengatakan, sorotan dan kritik tajam dari masyarakat dan pers yang diarahkan ke lembaga DPR sampai saat ini menandakan masyarakat memperhatikan langkah-langkah dewan. "Sorotan ini menjadi hal yang positif, artinya langkah-langkah dewan senantiasa diawasi masyarakat," ujar Agung. Agung mengakui, tidak cuma masyarakat yang tidak puas dengan dewan. Dewan juga tidak puas dalam aspek pelaksanaan fungsi legislatif ini. "Itulah sebabnya berbagai upaya dilakukan, antara lain, pengalokasian

Juga peningkatan fasilitas dan honor siding, terus disorot media sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebut saja soal rencana pemberian laptop, perbaikan ruang kerja, dan kemudian rencana pemberian cincin kenangan, malah menuai protes. Tetapi, kerja para wakil rakyat yang sesungguhnya amat berat, baik melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam setiap rapat-rapat di komisi dan juga alat kelengkapan Dewan, serta sidang-sidang yang melelahkan untuk menghasilkan produk UU yang sangat dibutuhkan seperti UU Pemilu, UU Pilpres, UU Rumah Sakit, dan

anggota DPR yang diduga terlibat praktik percaloan anggaran dan pengawasan, ternyata hanya untuk kepentingan diri sendiri dan mungkin partainya. Sungguh sangat memilukan dan hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi anggota DPR periode berikutnya.

DPR sendiri bukannya tidak menyadari akan sejumlah kelemahan dan kritik dari masyarakat. Oleh karena itu sejumlah langkah telah dan akan dilakukan pihak Dewan untuk memperbaiki kinerja dan citra DPR ke depan. Pada periode lalu, DPR telah merekrut sejumlah tenaga ahli untuk



waktu untuk fungsi legislasi lebih banyak dibandingkan dengan alokasi waktu untuk pembahasan APBN dan pengawasan.".

Sejumlah penilaian yang sangat kritis yang kerap dipublikasikan di media massa, memang wajar mengingat banyak pengamat atau analis politik dan parlemen, mungkin hanya melihat beberapa kasus yang mencuat ke permukaan saja seperti kasus dugaan suap atau korupsi yang melanda anggota DPR. Begitu juga sejumlah kasus pelelehan seksual yang sebenarnya bukanlah ranah politik, tapi karena melekat pada diri wakil rakyat, maka penilaian buruk juga dialamatkan pada institusi Dewan.

Faktor lain yang turut melemahkan institusi DPR selama hampir lima tahun ini, sebenarnya terkait dengan bidang tugas DPR seperti kunjungan ke luar negeri yang dinamakan studi banding, oleh masyarakat, khususnya pers dinilai sebagai pemborosan keuangan Negara.

banyak UU lain yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat, kurang diketahui publik. Dalam menilai kinerja DPR periode 2004-2009 memang ada distorsi, ada gap informasi sehingga yang muncul selalu penilaian buruk, dan bukan penilaian berimbang. Untuk konsumsi berita di media massa, informasi yang buruk, apalagi menyangkut institusi DPR yang besar dan punya kekuasaan cukup dominan tentunya sangat menarik.

Introspeksi

Selain sorotan atas tugas legislasi, sebenarnya kritik terhadap kinerja bidang pengawasan dan anggaran juga sangat intens. Tetapi memang masyarakat lebih banyak melihat soal perundang-undangan ini yang sangat vital, sebab UU itu mengingat dan melingkupi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang pengawasan dan budget, sudah sering dipublikasikan, bahkan ada beberapa

mendampingi para anggota Dewan dan fraksi serta komisi. Namun hal itu belum maksimal mengingat tenaga ahli itu baru terealisasi dua tahun terakhir. Untuk menyambut anggota baru periode 2009-2014. Dewan juga akan mengadakan semacam workshop atau pelatihan mengenai tugas dan fungsi DPR kepada para anggota baru, terutama anggota yang baru kali pertama masuk ke Senayan. Tujuannya untuk memberi pemahaman dan hal-hal yang terkait dengan tugas serta fungsi DPR. Di samping itu menjelaskan fenomena dan kecenderungan yang terjadi selama lima tahun terakhir yang membuat DPR dinilai negative. Pembekalan itu untuk mengingatkan anggota baru bahwa hal-hal yang negative itu tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu anggota baru mendatang dituntut lebih tinggi lagi etos kerja dan komitmennya untuk kepentingan rakyat**

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Darul Siska: Belum Ada Parameter Jelas Fungsi Pengawasan DPR

Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR Darul Siska mengibaratkan, fungsi pengawasan yang dimiliki DPR seperti buah durian yang tercium wanginya, tetapi belum tentu ada buahnya. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR belum ada parameter yang bisa dilakukan oleh DPR.

Dalam perbincangannya dengan Parlemen mengenai evaluasi pengabdian DPR periode 2004-2009, Darul mencontohkan, jika DPR melakukan Rapat Kerja atau membuat kesimpulan rapat di dalam rapat yang selama ini tidak mengikat seluruh pihak yang ada dalam rapat tersebut untuk menindaklanjutinya. "Seharusnya kesimpulan rapat kerja ditandatangani bersama antara DPR dengan Menteri, dan harus ada komitmen untuk menindak lanjut kesimpulan itu," tegas Darul.

Ia menambahkan, efektifitas pengawasan DPR melalui rapat-rapat kerja dirasakan masih sangat tergantung dari sejauh mana komitmen moral dan belum pada komitmen institusional antara

pemerintah dan DPR. Karena itu DPR meminta di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, kesimpulan rapat tersebut menjadi kesepakatan yang harus ditindak lanjut.

Bentuk pengawasan DPR menurut Darul bukan hanya dalam rapat kerja, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPR. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara, pelaksanaan undang-undang oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah. "Hasil kunjungan tersebut kita tindak lanjut dalam rapat dengan pemerintah, tetapi pemerintah sepertinya tidak merespon dengan baik," ungkap politisi asal Sumbar ini.

Untuk efektifnya pengawasan terutama di daerah,



foto: Eka Hinra/Parle

sebaiknya menurut Darul tidak bisa lagi diandalkan kepada DPR, tetapi juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena menyangkut pengawasan dan pelaksanaan APBN di daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Harus ada peningkatan yang sinergi antara DPR dan DPD di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan khususnya tentang penggunaan APBN di daerah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR selama ini masih belum optimal, walaupun upaya-upaya kearah perbaikan masih terus dilakukan juga,” kata dia.

Anggota F-PG DPR ini menjelaskan seluruh Anggota DPR

tidak dapat tercapai bahkan sampai akhir periode. “Padahal kita sudah kerja sampai larut malam, agak luar biasa beratnya bahkan sampai pagi lagi, tapi hanya sekitar tujuh persen saja yang dapat terselesaikan,” ujar Darul.

Hal tersebut menurut Darul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, DPR belum memiliki staf pendukung yang betul-betul kuat dan handal didalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dibidang legislasi.

Darul mencontohkan, untuk tenaga *legal drafter*, DPR masih bergantung kepada Departemen Hukum dan HAM, sedangkan untuk tenaga ahli bahasa, kita masih bergantung

kemudian pada tingkat panja diwakili oleh Dirjen, kemudian diwakili lagi oleh Kepala Biro pada tingkat timus dan sebagainya.

Bayangkan Anggota DPR dilayani oleh beberapa gradasi pejabat pemerintah. Kalau staf ahli DPR sudah kuat, menurut Darul, Anggota DPR membahas undang-undang hanya pada tingkat pansus saja, karena disana pengambilan kebijakan-kebijakan substansial dalam membahas undang-undang. “Tingkat selanjutnya adalah kita serahkan kepada tim ahli, bernegosiasi dengan pejabat pemerintah yang berada di bawah Menteri,” tegas Darul.

Hal-hal itulah menurut Anggota dari Fraksi Golkar ini yang menyebabkan DPR tidak bisa optimal

“Tenaga ahli itu yang kita belum punya, seharusnya DPR memiliki tenaga ahli sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah, karena kuasa undang-undang kini berada di tangan DPR,”

telah menggunakan hak-hak yang telah dimiliki DPR selama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak angket dan hak interpelasi. Tetapi lanjutnya, hak-hak tersebut tidak ada yang sampai menjatuhkan posisi Presiden.

Darul kembali menjelaskan, seluruh panitia angket dan tim pengawas yang telah di bentuk DPR, akan melaporkan hasil-hasil tugasnya di dalam Sidang Paripurna DPR pada akhir periode September 2009.

Target tak tercapai

Menurut pengamatan Darul Siska, selama lima tahun terakhir ini ketiga fungsi DPR sudah diupayakan secara maksimal. Dari fungsi legislasi DPR, dapat dilihat berapa jumlah undang-undang yang diprogramkan oleh Badan Legislasi (Baleg DPR) di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas dalam jangka waktu lima tahun, dan berapa undang-undang yang dibahas oleh DPR pada setiap tahunnya.

Ternyata menurutnya, dari target yang telah ditetapkan oleh Baleg DPR

kepada pusat bahasa. Padahal menurutnya, mereka ini harus selalu ada dalam pembahasan undang-undang, baik

pada tingkat pansus, panja, timsin, maupun tingkat tim kecil. “Tenaga ahli itu yang kita belum punya, seharusnya DPR memiliki tenaga ahli sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah, karena kuasa undang-undang kini berada di tangan DPR,” jelasnya.

Kendala yang kedua menurutnya adalah, sering kali para menteri yang diajak untuk membahas undang-undang tiba-tiba dipanggil oleh Presiden untuk rapat cabinet. “Itu juga menjadi kendala,” tambahnya.

Kendala ketiga adalah kendala aturan sendiri. Anggota DPR membahas undang-undang pada tingkat pansus, panja, timus, timcil, dan timsin. Padahal pemerintah yang harusnya membahas undang-undang dengan DPR diwakili oleh Menteri,



dalam pencapaian pembahasan undang-undang sebagai fungsi legislasi. Upaya-upaya perbaikan itu tentunya tidak bisa secara otomatis. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang MPR, DPR dan DPD yang baru, DPR sudah mengupayakan perbaikan untuk melakukan proses pembahasan legislasi bisa lebih maksimal pada masa yang akan datang. Karena itu DPR minta dukungan tenaga ahli yang cukup, dukungan staf yang lebih professional, dan dimungkinkan juga DPR mendapatkan tenaga-tenaga ahli yang bekerja secara *part time* dari luar.

Kurangi lomba pidato

Mengenai tingkatan pembicaraan undang-undang, Darul menjelaskan, tingkatan pembicaraan sebuah

undang-undang tetap pada tingkat pansus, panja, dan lain sebagainya. Tetapi pidatonya saja yang dikurangi. Apabila sebuah RUU sudah disepakati di dalam pansus, maka ditingkat Paripurna apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu diambil keputusan secara voting, maka dilaporkan saja oleh ketua pansusnya dan langsung bisa diketok untuk disetujui menjadi undang-undang.

Kecuali, dalam hal terdapat substansi-substansi yang tidak dapat disepakati oleh pansus, maka dilaksanakan voting di dalam paripurna. "Jadi paripurna tidak seperti lomba pidato seperti sekarang ini," kata Darul.

Alasan lain mengapa DPR dalam membahas suatu undang-undang memerlukan waktu yang lama menurut Darul adalah, adanya fraksi yang memiliki jumlah anggota yang sangat sedikit terutama fraksi-fraksi kecil. Sementara dalam pembahasan undang-undang selain menunggu kuorum anggota juga kuorum fraksi.

Oleh karena itu, dia mengusulkan dalam pembentukan fraksi dalam periode yang akan datang minimal tiga kali alat kelengkapan Dewan. Tetapi yang disepakati adalah yang berdasarkan *parliamentary tresh hold*. "Semua partai yang memenuhi *parliamentary tresh hold* boleh membentuk fraksi," ungkapnya.

Darul menilai hal ini akan tetap menjadi faktor penghambat bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dalam bidang legislasi.

Bidang Anggaran

Di bidang anggaran, Darul menyatakan bahwa DPR sudah bisa bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat terbukti dengan tidak adanya APBN yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tetapi yang menjadi masalah adalah keterlibatan seluruh anggota DPR dalam proses penyusunan anggaran belum maksimal. Sehingga banyak daerah yang diwakili oleh anggota DPR yang bersangkutan menunggu dengan ketidakjelasan.

Darul juga menyayangkan tidak terbukannya pembahasan anggaran di DPR. Menurutnya yang baik adalah dalam pembahasan penyusunan anggaran di DPR harus terbuka, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif di masyarakat terhadap DPR. "Kalau pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka, tidak akan ada anggota DPR yang masuk penjara, jadi ke depan itu harus transparan," ujar Darul.

Politisi PG ini mengusulkan agar Panitia Anggaran DPR diubah menjadi suatu Badan yang lebih permanen, dengan perbaikan mekanisme kerja dan lebih transparan dalam penyusunan anggaran.

Badan tersebut menurutnya tidak terkait dengan APBN secara langsung, tetapi ada kaitannya dengan pengawasan. Selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan semester dalam Sidang Paripurna DPR yang kemudian dinyatakan dalam Paripurna tersebut dinyatakan ditindak lanjuti di dalam Komisi-komisi terkait. Tetapi lanjutnya, untuk menggali lebih lanjut informasi yang diberikan oleh BPK tersebut, memerlukan kecerdasan dan analisa keuangan negara yang tidak semua anggota DPR paham. Karena itu diperlukan suatu badan yang isinya adalah para ahli yang dapat menganalisa, serta dapat berkonsultasi dengan BPK, dan kemudian akan disampaikan kepada Komisi-komisi terkait untuk dijadikan bahan pengawasan dengan pemerintah.

"Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan seluruh penyelenggara negara yang bersih," jelas Darul.

Tingkat Kehadiran Anggota

Mengenai tingkat kehadiran anggota DPR dalam setiap kegiatan dewan, Darul menjelaskan, selama ini tingkat kehadiran anggota dewan memang menjadi sorotan media massa karena memang media massa lebih banyak menyorotinya pada Sidang Paripurna DPR.

Sebaiknya menurut Darul, jika ingin mengukur tingkat kehadiran anggota dewan jangan hanya pada saat Sidang Paripurna DPR saja, tetapi dapat dilihat dalam setiap rapat-rapat seperti rapat Komisi DPR, Pansus, Panja, yang terkadang para anggota dewan bekerja di luar kewajaran jam kerja.

Jika ingin memperbaiki keadaan seperti ini, menurut hemat Darul adalah dengan mempublikasikan secara objektif kehadiran masing-masing anggota DPR tersebut. Darul yakin apabila masing-masing anggota DPR dipublikasikan kehadirannya kepada masyarakat, seluruh anggota DPR akan berusaha untuk masuk ke dalam daftar anggota yang rajin menghadiri setiap kegiatan rapat DPR.

Tetapi yang sekarang ini terjadi adalah yang selalu dipublikasikan di media massa yang buruk-buruknya saja mengenai kehadiran anggota DPR. Hal tersebut mengakibatkan anggota DPR yang rajin menghadiri rapat-rapat DPR akan merasa dipersamakan dengan anggota DPR yang jarang menghadiri rapat-rapat DPR.

Darul menilai peran media massa sangat penting didalam rangka memotifasi anggota DPR untuk lebih rajin menghadiri rapat-rapat DPR. "Jadi jika pendekatannya dengan mengumumkan tingkat kehadiran anggota DPR secara objektif di media massa, maka akan lebih memberikan motifasi karena pada prinsipnya semua anggota DPR mau mendapatkan predikat baik," ucap Darul menambahkan. (**oly, mp,si**)

Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo: DPR Tak Perlu Malu Dapat Predikat Rapor Merah

Dengan jiwa besar, politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tidak menolak jika kinerja DPR periode 2004-2009 yang akan mengakhiri masa baktinya 30 September mendatang diberi predikat rapor merah. "Dapat nilai merah iya. Dalam proses transisi ini harus kita akui dan tidak perlu malu," tandasnya menjawab *Parlementaria* mengenai evaluasi pengabdian selama 5 tahun di Senayan.

Dengan pengakuan itu dia mengatakan, DPR harus didorong melakukan evaluasi dan introspeksi serta kedepan harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Tidak hanya DPR saja, kinerja pemerintah juga tidak baik. Dengan anggaran yang naik 10 kali lipat, APBN 2009 yang menembus seribu triliun lebih, tetapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kalau boleh mengkritisi lanjut Ganjar, program-program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak sesuai yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran banyak, lapangan kerja terbatas dan kemiskinan masih banyak. "Dengan anggaran yang sangat tinggi itu selayaknya bisa mengarah pada peningkatan program-program itu," ungkapnya.

Menurut Ganjar, persoalannya ada di tingkat bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak dilaksanakan, maka kewajiban

kita untuk melakukan pengawasan yang intensif. "Bagaimana supaya lebih baik maka sistemnya diubah. Kalau sistemnya begini-begitu saja maka tetap akan seperti itu."

Di bidang legislasi, dengan target 300 lebih UU yang harus diselesaikan, kenyataannya baru dicapaisekitar 150 UU. "Dengan m a s i h menyisakan program legislasi, saya kira b e l u m

memenuhi h a r a p a n rakyat," jelas

Ketua Pansus RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD ini.

Dari sisi anggaran, capaian anggaran, sejak 2005 hampir beberapa kali lipat tapi belum punya signifikansi yang tinggi terhadap penciptaan kesejahteraan. Soal pertahanan juga sama, dengan lompatan anggaran yang sangat tinggi itu ternyata belum bisa kita kontrol untuk lebih mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan. "Ini saya kira yang paling penting makanya kita mesti perbaiki betul capaian-capaian itu dengan mengubah system kerja yang lebih bagus," terang Ganjar.

Pembahasan bertele-tele

Menyoroti kembali kinerja DPR di bidang legislasi, kata Ganjar, target yang terlalu tinggi ternyata belum diikuti oleh kesiapan perencanaan seperti naskah akademis, soal draf termasuk metode pembahasan yang cukup bertele-tele. "Itulah yang bikin pembahasan RUU lama".

Ia mengungkapkan, saat pembahasan RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD, sudah dicoba untuk tidak perbanyak fraksi, tapi nampaknya tidak disepakati oleh teman fraksi lain. Padahal dengan jumlah fraksi yang kecil, membawa konsekuensi logis terhadap pengambilan keputusan yang lebih cepat. Maka pengejaran terhadap kekurangan-kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebenarnya bisa



foto: tri hastuti/parle

diikuti dengan metode pembahasan yang lebih efektif. Disinilah Baleg nanti akan diberikan dukungan staf ahli terdiri *legal drafter* yang handal.

Terhadap reformasi DPR, menurut Ganjar Pranowo, system pendukungnya belum baik. Termasuk pemahaman masing-masing fungsi belum terlihat, maka Pimpinan DPR menjadi *speakers*, lebih dari itu dititikberatkan padaa manajerial yang ada di bawah, bukan menjadi wakil direktur atau bos yang kemudian mengkooptasi perannya. “Kalau kita melihat dari sisi itu maka reformasi kesejeksenan atau supporting system mesti diubah total,” jelas dia.

Dalam kaitan ini, system informasi legislasi harus segera dibuat, termasuk DPR yang lebih ramah terhadap rakyat harus segera ditunjukkan dengan PR (*public relation*) yang baik. Kemudian kita harus bisa menampilkan perdebatan secara terbuka dan transparan sehingga semua rapat DPR adalah terbuka kecuali rapat yang sifatnya rahasia. “Itulah reformasi yang harus dilakukan”.

Selain itu *supporting unit* atau system betul-betul *nempel* pada fungsi lembaga-lembaga yang ada sehingga order dari anggota harus setiap saat siap. Maka yang mereka *fullskill* dan mereka yang kompeten itu harus duduk di unit itu, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, jangan ditempatkan disitu. Maka itu harus ada re evaluasi terhadap kondisi *exciting* yang ada, sehingga ketika placemen betul-betul sesuai kebutuhan, mana yang harus di attach keanggaran atau ke legislasi. Soal fungsi pengawasan DPR, ia menilai sudah cukup.

Ganjar menambahkan, dengan masih banyaknya jumlah fraksi DPR, maka resiko masih banyaknya rapat kosong dan pengambilan keputusan cukup lama, masih akan terjadi. Maka untuk mengeleminir itu *supporting* unitnya harus diperbaiki, supporting inilah yang bisa membantu menyelesaikan. Seperti dalam rapat-rapat DPR, anggota yang bertanya kalau soal pengawasan cukup tiga menit saja, lebih dari tiga menit itu pimpinan yang menentukan boleh atau tidak sehingga semua menjadi efektif dan tidak bertele-tele.

Termasuk kemudian kalau kita membahas RUU dari pemerintah kan

kita membuat DIM yang banyak, DIM banyak inilah yang membuat proses pengambilan keputusan lama. Kalau kemudian *legislation body* kita kuat maka semua inisiasi lebih banyak dari pemerintah maka DIM nya cuma satu dari pemerintah sehingga tinggal satu lawan satu, itu akan lebih cepat.

Untuk itu, maka didorong fungsi legislasi, dan pandangan fraksi yang panjang-panjang itu tidak ada. Pandangan fraksi pengambilan keputusan di paripurna sudah kita hilangkan, maka tidak menjadi bertele-tele. Maka pertempurannya dialihkan tidak di paripurna tapi di komisi-komisi atau pansus.

Pengawasan keuangan negara

Lebih lanjut Ganjar Pranowo mengatakan, karena fungsi pengawasan DPR periode 2004-2009 sudah berjalan cukup bagus, maka pengawasan selanjutnya soal penggunaan keuangan negara. Pansus telah mengantisipasi bahwa laporan BPK selama ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, karena itu UU mengamanatkan pembentukan satu alat kelengkapan DPR baru yang namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Badan baru ini diharapkan pengawasan keuangan negara lebih efektif.

Ditanya apakah dengan badan baru akan kurangi penyimpangan, Ganjar menyatakan, kalau selama ini laporan dari BPK ke DPR selalu begitu-begitu saja, maka hal-hal yang sifatnya lebih massif dan punya potensi penyelewengan keuangan Negara yang lebih banyak maka kompetensi dari keuangan yang lebih banyak bisa kita dalam dari badan ini. “Kita harapkan bisa menambah perbaikan kinerja”.

Menanggapi sisi kelam kinerja Dewan dengan adanya sejumlah anggota yang tertangkap KPK, dalam penilaian Sekretaris FPDI Perjuangan ini sebenarnya nggak hanya di DPR tapi di lembaga lain juga banyak. “Saya kira ini aroma penegakan hukum yang semakin baik, maka model pemberantasan korupsi seperti KPK harus maju terus tak boleh mundur lagi,” tandasnya.

Karena itu, semua harus transparan, harus terbuka tidak hanya DPR, dulu

kalau ada istilah ada cendana, ada istana termasuk di DPR termasuk bagian dari pengelolaan keuangan Negara, kalau itu semakin disorot maka akan semakin baik. Bahwa system yang dulu membuka ruang saatnya kita perbaiki, kalau ada salah mana yang tidak ada salah. Pemerintah saja melakukan disclaimer tidak ada yang menindaklanjuti, dan presidennya tetap dipilih.

Artinya, berbeda antara satu system yang akan ditegakkan dengan pandangan persepsi masyarakat, itu masih suka, tidak suka mana emosial dan mana rasional itu masih saling mendominasi. Bagi Ganjar, itu pembelajaran yang luar biasa bagi DPR agar kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selama 5 tahun berkiprah di DPR, yang ia rasakan konsistensi dalam proses pengambilan keputusan itu seringkali terjadi deviasi. Deviasi itu dari koridor-koridor atau dari sisi akademis, lalu norma kepatutan dan kepatutan. Maka perlu dibuatkan rel yang tegas untuk bisa kembali ke khittahnya.

“Saya melihat seperti itu kondisinya, maka wajar saja semua keputusan Dewan seperti ini. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri tidak hanya soal hadir, juga disiplin berpikir sehingga norma itu dipegang. Kalau dipegang, insya Allah tidak akan *out of contac*, maka kalau sudah demikian akan bisa didekatkan dengan harapan rakyat sehingga hasilnya akan lebih baik”.

Pengalaman yang tidak mengenakkan? kata Ganjar, sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama itu dianulir. Ini menyangkut konsistensi dan inkonsistensi.

Kalau konsistensi biasa boleh, tetapi kalau inkonsistensi menjadi kebiasaan, ini payah. “Ini pengalaman saya yang tidak enak”.

Dia berharap, mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi. “Ketika membahas perundang-undangan sampai tingkat satu tidak ada masalah, lalu ada satu dua orang bercerita tentang ketidak beresan atau belum setuju dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat. Ibaratnya mementahkan kembali keputusan yang telah disepakati. Itu kan lucu,” ujarnya mengakhiri pembicaraan (mp)

Wakil Ketua FPP DPR dari PPP Lukman Hakiem menilai pembahasan legislasi di DPR cenderung bersifat politis sehingga menyebabkan pembahasan UU alot dan kesulitan dalam mengambil keputusan bersama. "Ada beberapa UU yang muatannya tinggi seperti UU Kementerian Negara pasalnya sedikit tetapi karena muatan politiknya tinggi jadi macet hingga berlarut-larut sampai 3 tahun," kata Lukman ketika diminta tanggapannya dan evaluasi kinerja DPR periode 2004-2009 baru-baru ini.



foto: sugeng/parle

Menurut Lukman, kendala proses legislasi juga datang dari pemerintah misalnya mereka tidak berniat membahasnya sehingga dilakukan proses lobi lagi. "Selain itu muatan politis juga kerap terjadi dan berbenturan antar fraksi di DPR sehingga menghambat pencapaian target dari UU,"katanya.

Dia mencontohkan, terdapat UU yang tinggi muatan politisnya seperti, UU tentang Minerba ternyata didalam UU tersebut menyangkut berbagai kepentingan seperti hutan lindung, pertambangan dan segala macam. "Banyak sekali kepentingan lama di dalam UU itu, contoh lainnya juga seperti UU pajak dan retribusi daerah, sampai sekarang baru selesai karena ada kepentingan dari daerah-daerah disitu karena itu, factor-faktor kepentingan ekonomi, politik, budaya mempengaruhi proses penyelesaian UU,"paparnya.

Sementara, dari segi pengawasan, dia mengakui tidak ada masalah karena di masa reformasi, DPR bisa melakukan pengawasan secara efektif. Bandingkan waktu jaman Orba, sekarang ini, kita bisa berdebat dengan mitra kerja kita terhadap suatu persoalan. "Jangan lupa pengawasan DPR itu merupakan pengawasan politik kadang-kadang orang terlalu berharap lebih terhadap peran DPR, seperti masyarakat mengadu ke DPR soal tanah yang bisa Dewan

Wakil Ketua FPP DPR Lukman Hakiem: Proses Legislasi DPR Sarat Muatan Politis

lakukan adalah memanggil pejabatnya dan kita desak agar segera diselesaikan. Nah kendalanya disini DPR itu bukan aparat hukum tetapi fungsi pengawasan kita lebih secara politis,"paparnya.

Dia mengakui sekarang ini hak-hak dewan yang digelontorkan oleh beberapa orang anggota seperti interpelasi bukan lagi membahas kepada hal yang substansi semata. "Ini memang dibenarkan dalam Tatib, bahkan pada UU tentang DPR, MPR, DPRD dan DPD, lagi-lagi kita kompromi, Presiden dapat hadir tetapi bisa diwakili oleh menteri terkait,"terangnya.

Menurutnya, system sekarang ini merupakan system pemerintahan presidensial tetapi gayanya parlementer karena itu, SBY meskipun menang pemilu presiden 2004 lalu tetap membutuhkan dukungan parlemen yang kuat. "Tetapi mencermati kondisi sekarang ini, ada yang hilang yaitu etika berpolitik karena sangat aneh partai

koalisi dan memiliki orang di kabinet tetapi di Parlemen kelakuannya seperti oposisi. Jika mereka memang benar seharusnya tarik dahulu Menteri baru mengatakan menolak terhadap kebijakan pemerintah,"ujarnya,

Dari sisi anggaran, seperti tertuang didalam UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD. DPR dalam setahun khususnya panitia anggaran membahas tiga macam seperti membahas APBN, APBNP dan pertanggungjawaban anggaran. "Minimal Pangar setahun 3 kali sidang, UU tersebut semuanya menyangkut angka-angka karena itu ada orang yang sinis mengatakan anggaran DPR ditentukan oleh 40 orang saja. Dalam UU baru kita berikan waktu dan ruang lebih luas, jadi praktis Oktober sudah harus selesai dalam 2 bulan dilaksanakan,"katanya

Menurut Lukman, saat ini Pangar selalu memperpanjang masa sidang karena pada bulan Agustus-Oktober

cenderung jatuh pada bulan puasa. “Kita selalu dihadapkan kenyataan bahwa bulan Oktober itu selalu puasa dan lebaran selalu saja pembahasan APBN dimajukan beberapa kali dengan memperpanjang masa sidang, dan luar biasanya kita bisa siang malam membahas APBN itu,”katanya.

Diberi kewenangan

Menyinggung fungsi budgeting DPR yang dinilai keablasan, Lukman menerangkan sesuai UU No.17 Pasal 15, dewan diberikan kewenangan untuk merubah alokasi anggaran. Misalnya saja ketika DPR membahas anggaran pendidikan, dia melihat adanya suatu sekolah yang ingin dibantu lalu dia meminta Menteri untuk memberikan anggarannya namun tidak sampai detail membeli gentengnya, pasir dan sebagainya.

“Ini hanya alokasinya saja namun barangkali hanya eksekusi apakah kemudian kita ingin kembali ke masa lalu atau tidak. Karena menurut saya dahulu juga ada korupsi tetapi tidak terlihat karena sistemnya tertutup maka orang tidak banyak tahu, sekarang ini transparan apabila korupsi semuanya akan terlihat,”katanya.

Dia mengakui dari sisi budgeting memang masih belum maksimal karena memang mekanismenya hak budget berada di tangan DPR namun jangan lupa hak proposal berada di tangan Pemerintah. “Jadi tidak mungkin misalnya pemerintah mengajukan anggaran RABPN 900 Triliun kemudian DPR memompa anggaran itu menjadi 2000 Triliun paling maksimal naik menjadi Rp 1000 Triliun”.

Dia menambahkan, DPR biasanya hanya menggeser-geser anggaran yang kurang produktif. “Kita harus akui memang panitia anggaran itu para pekerja yang luar biasa dan tidak mengenal lelah,”katanya.

Monumental

Ketika ditanya UU monumental yang pernah dibahas, Lukman mengatakan, UU tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara sangat monumental karena melalui UU ini, pemerintah diwajibkan mengembangkan dan melindungi sastra Indonesia yang

sudah masuk titik nadir. “Saya melihat perhatian pemerintah lemah terhadap bahasa dan sastra padahal karya sastra puncak dari seperti prosa, sajak yang biasanya diterbitkan Balai Pustaka sudah lama tidak terdengar,”katanya.

Dia mengatakan, dirinya bersyukur bahasa dan sastra masuk didalam UU itu karena itu, cara ini sebagai bentuk penghargaan yang layak dan terlepas dari berbagai pengaruh politik. “Kita tahu karya Pramoedya selalu mendapatkan penghargaan dari luar negeri namun kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Begitu juga penggunaan bahasa Indonesia untuk tempat-tempat umum yang sering menggunakan bahasa Inggris”.

Dia menambahkan, ketika lewat tol Jagorawi seringkali kita temui papan nama kompleks perumahan menggunakan bahasa Inggris bandingkan dengan Thailand yang bangganya menggunakan bahasa nasionalnya baru kemudian dibawahnya bahasa Inggris.

Lukman mengharapkan, UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara tidak hanya berlaku diatas kertas saja tetapi benar-benar diterapkan sehingga karya sastra dan bahasa Indonesia benar-benar diakui di negara sendiri dan manca negara.

Produk reformasi

Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Lukman, merupakan produk reformasi dimana awalnya dimulai dari TAP MPR tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. “Jadi KPK memang produk reformasi karena itu tidak perlu disesali, kenapa tidak kepolisian, kejaksaan diperkuat karena kita menganggap saat itu kinerja lembaga tersebut tidak bagus,”katanya.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki wewenang seperti kepolisian, kejaksaan. Yang tidak diberi, kata Lukman, hanya pemberian wewenang SP3. “Jadi kalau terkena KPK tidak mungkin lolos yang bisa menghentikan adalah pengadilan jadi tidak boleh main-main ketika KPK menetapkan tersangka harus benar-benar clear,”katanya.

Menyinggung proses demokrasi di Indonesia, Lukman menerangkan, saat

ini demokrasi Indonesia memerlukan ongkos politik yang tidak sedikit. “Bayangkan ada teman saya yang sudah mengeluarkan Rp. 4 milyar tetapi tetap tidak terpilih,”katanya.

Lukman mengatakan, hal ini sangat tidak baik buat proses demokrasi kedepannya. “Jangan-jangan saat jadi anggota DPR, dia tidak berpikir ke rakyat tetapi bagaimana mengembalikan uangnya dan kelebihannya, karena itu, jangan salahkan kalau nanti sesudah pemilu suara rakyat tidak didengar lagi,” tuturnya.

Lukman mengatakan, hal ini harus menjadi refleksi bersama apakah memang harus dipertahankan proses demokrasi yang seperti ini atau tidak. “Jadi memang sangat mahal demokrasi Indonesia. Ini merupakan refleksi buat kedepan saja,”terang Lukman.

Absensi masalah klasik

Lukman mengatakan, persoalan absensi merupakan persoalan klasik yang sudah terjadi pada periode lalu. “itu merupakan persoalan dari dulu tetapi sebenarnya tidak khas persoalan DPR periode sekarang,”katanya. Dahulu, terangnya, hanya 4 fraksi namun persoalan kehadiran sudah menjadi topik pembahasan di beberapa sidang,”katanya.

Menurutnya, persoalan DPR menyangkut sarana dan prasarana seperti ruang rapat yang tidak memadai dan layak buat rapat-rapat keseharian. “Kita sebetulnya belum punya gedung parlemen ini gedung dibangun untuk konferensi Conefo waktu itu,”katanya.

Selain itu, persoalan Air conditioner (AC) seringkali mati saat pukul 4 sore. Karena itu, apabila rapat diskor dan kemudian dilanjutkan jam 7 malam seringkali karena tidak nyamannya ruangan seringkali anggota langsung pulang dan tidak kembali setelah rapat diskors.

“Ini harus segera ditata ulang gedung DPR, semula memang dirancang untuk 440 anggota dan hanya terdiri 4 fraksi artinya hanya empat sekretariat lalu tidak ada staf ahli. Sekarang adanya penambahan anggota DPR 560 orang bahkan setiap anggota DPR memiliki staf pribadi dan staf ahli,” terangnya. (si)

Kinerja DPR periode 2004-2009 dalam pandangan politisi Partai Demokrat Soetan Batoegana masih kurang maksimal. Salah satu contoh di bidang legislasi, bisa dikatakan DPR periode ini paling malas karena produk UU yang diselesaikan tidak sesuai target yang ditetapkan Prolegnas. Dari 300 lebih RUU yang baru selesai hanya sekitar 50%-nya. " Itu indikator DPR ini kurang produktif".

Batoegana menegaskan.

Ia menyebut misalnya rapat dengan Menteri ESDM menghasilkan 4 keputusan, 3 minggu lagi ketemu sebelum bicara hal baru, ditanya dulu keputusan sebelumnya. Mana yang sudah selesai, bila dijawab 2 sudah selsai sedang yang satu *on going*, berarti yang 1 ini masukkan lagi dalam rapat hari ini dan baru bicara hal-hal yang baru. Bila ada 5 putusan, berarti ada tambahan sisa sebelumnya ada 6 poin, yang akan ditanya lagi. Seharusnya dicek seperti itu. " Ini kan tidak, keputusan rapat sebelumnya *boro-boro* kita ingat, lagi-lagi hal baru yang menjadi topik pembahasan, tapi tak ada yang mengontrol. Sistem yang membikin kita begini," tuturnya.

Karena itu kata politisi asal Sumut ini, sistemnya harus diubah, artinya dievaluasi setiap hasil rapat sebelumnya. Ketika masuk rapat baru, item yang lama diselesaikan dulu, dicek dulu keputusan sebelumnya. Misalkan produksi Exxon Mobil sekian kita cek, sudah produksi atau belum, masih outstanding, kenapa, siapa yang salah, perlu di *warning*, itu fungsinya pengawasan.

Nyatanya, menurut dia, ketika rapat lagi dengan Exxon, yang dulu tak ditanya lagi. Yang ditanya hal baru, sifat politisnya lebih tinggi. Sebagaimana di perusahaan, hari ini bahas item apa, berikutnya ditentukan item apa lalu hari ini item apa yang sudah selesai supaya masuk pembahasan sekarang. " Jadi harus ada indikatornya, baru bagus. Ini namanya mengevaluasi keputusan-keputusan yang kita buat," ujarnya.

Ia tidak menampik, Dewan sebagai

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Soetan Batoegana; DPR Periode 2004-2009 Tidak Maksimal

Di bidang pengawasan, menurut Soetan, juga masih tidak maksimal. Contohnya di Komisi VII, apa yang diputuskan dalam raker atau RDP tidak ada yang mengevaluasi kembali. Katakan dengan mitra raker atau RDP sejak awal periode 2004 hingga akhir periode, berapa yang putusan yang dihasilkan. " Saya kira lebih dari 300 putusan selama

5 tahun, tapi mana yang sudah dilaksanakan. Menurut saya hanya 20% yang dilaksanakan pemerintah, selebihnya nggak ada yang ngontrol," jelas dia.

Ketika ditanyakan kesalahan siapa sehingga kinerja Dewan seperti itu, Soetan hanya menjawab singkat " Ya kita semua, kita tidak mau evaluasi. Kalau bisa system rapat-rapat supaya produktif dibikin evaluasi hasil rapat-rapat sebelumnya, " tukas Soetan

lembaga politik keputusannya bersifat politik, tapi harus ada manfaatnya untuk rakyat. Karena itu, dia berharap system rapat ini masuk tatib, karena periode mendatang yang pertama dibahas adalah tatib, Setiap periode diperbarui, dulu tak ada BK sekarang ada, nanti ada Badan baru sebagai amanat UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kepentingan bangsa

Lebih lanjut Soetan menegaskan, minimnya RUU yang dihasilkan DPR lantaran lebih banyak debat soal non substansi. Seharusnya DPR tak mengurus titik koma dan bahasa, tetapi kenyataannya yang banyak diperdebatkan titik koma, bahasanya, bukan substansinya. Titik koma mestinya urusan ahli bahasa dan staf.

Karena kelemahan system tadi, kita hanya suka ribut dan sangka jelek antar fraksi sehingga hasilnya terlambat semua. Misalnya bila Dewan konsentrasi penuh membahas RUU Minerba, waktu 6 bulan selesai. Paling tidak setahun selesai, tetapi hampir 4 tahun ini RUU tak selesai berarti memang kurang produktif.

“Disini goreng-goreng, sudah selesai satu bab mundur lagi, banyak kepentingan. Ke depan hanya satu kepentingan untuk bangsa dan negara. Itu yang tonjolkan,” tegasnya.

Ia bertekad, untuk periode 2009-2014 anggota Fraksi Partai Dempkrat bisa memelopori pembahasan RUU. Ia juga optimis, kalau 6 bulan selesai, banyak sekali UU yang dihasilkan. Harus ada target masing-masing komisi, supaya kongkrit. “Kalau singkirkan baju dan golongan, mungkin akan cepat selesai. Tonjolkan untuk bangsa dan negara. Setelah masuk komisi seharusnya golongan dan fraksi serta kelompok ditanggalkan,” ujar Soetan menambahkan.

Menanggapi efektifitas kunjungan kerja sebagai salah satu fungsi pengawasan, Soetan menyatakan ada manfaatnya. Saat kunker ke Sumut, disana listrik kurangnya 100 MW, Komisi VII diminta Gubernur membantu penyelesaian Proyek

Sarolla. Disitu ada 600 MW padahal cuma butuh 100 MW, sisanya bisa suplai ke industri atau daerah lain.

Komisi VII mempertanyakan hambatannya apa, dijelaskan Gubernur bahwa kontraknya tarsok-tarsok. Kalau begitu kita panggil semua pihak yang terkait termasuk Pertamina dan PLN dan kontraktor Geodipa, alasannya anggaran. Lalu didesak terus sanggup selesaikan sebulan atasi keuangan, kalau tak bisa mengundurkan diri. Benar saja kontraktor itu tak sanggup lalu masuk Medco, sehingga jalanlah proyek ini.

“Ini hasil kunker, berarti masih efektif. Kalau dikatakan hanya jalan-jalan nggak benar lah, lebih baik berbaik sangka, artinya ada manfaatnya. Kalau pro kontra pasti ada, namun manfaatlal yang kita tonjolkan,” tutur Soetan dengan menambahkan, disamping system, ambil keputusan tidak gampang karena di DPR ada 10 fraksi, goreng sana goreng sini, lama akhirnya jenuh. “Sistem yang membuat anggota Dewan tidak produktif”.

Sedangkan dari sisi anggaran, menurut dia nggak ada masalah karena kita hanya menggodok di Komisi masing-masing kemudian disampaikan ke Panitia Anggaran kemudian di eveluasi lagi kalau itu berjalan baik. Di PA mungkin bisa mencapai target apa yang kita harapkan, plus minus anggaran bisa kita control cepat, Ini kan ada indikatornya, bujet untuk PLN sekian triliun, tahun depan kita cek berapa penyerapannya, bisa. Yang lain kan tidak, kenapa system kita tak memungkinkan hal demikian.

Benarkah dalam bahas anggaran Dewan hanya nrimo tak ada anggaran sandingan yang disusun DPR, Soetan menjawab “Saya kira nggak juga, malah karena ketatnya anggaran ini Komisi VII suka berantem, contohnya komisi-komisi lain sudah putuskan tapi Komisi VII masih alot bahas subsidi PLN dan PGN. Kita panggil kegunaannya untuk apa, untuk proyek ini, mana proyeknya sampai dimana? “Kita pertanyakan, kita crewet malah kadang-kadang pemerintah pening. Untuk menaikkan 1-2 rupiah nggak

gampang”.

Diakui dalam memperjuangkan aspirasi rakyat belum maksimal, karena harus meloby departemen contohnya di Sumut dia perjuangkan listrik masuk desa bisa saja tapi bukan itu saja pembanguna di daerahnya. Ada infrastruktur, yang ditangani Komisi V, pihaknya harus bersinergi. Di Komisi VII akan terus perjuangkan di Sumut sementara bisa mandi cahaya dulu, tidak byar pet, baru yang lain akan berkolaborasi dengan teman-teman di Komisi lain Komisi V dan IV bagaimana Sumut bisa swasemba beras, bagaimana infrastruktur bisa dibangun.

Setuju rapor merah

Mengenai penilaian rapor merah DPR, Soetan Batoegana menyatakan setuju saja. Menurutnya di bidang legislasi kebanyakan kepentingan pribadi lebih ditonjolkan bukan mikirkan rakyat, politisnya muncul di media masa bahwa yang diperjuangkan membela rakyat tapi tak di bela-bela. Contohnya ketika butuh tenaga ahli dan komputer, rakyat ribut, padahal sudah diputuskan BURT dimana ada 10 fraksi semua setuju, tapi ribut di luar, termasuk ada anggota salah satu fraksi yang menolak, dan itulah yang terekspos secara luas di media masa.

Seharusnya kalau sudah menjadi keputusan harus komit, suka nggak suka sampaikan ke rakyat. Harusnya konsisten, kalau setuju pertahankan, gara-gara politisnya yang ditonjolkan. Inilah hasilnya terlalu banyak fraksi, idealnya 6 sampai 7 saja.

Terhadap banyaknya anggota yang ditahan KPK, kita masih bersyukur yang ditangkap KPK cuma sedikit. Kalau fair bongkar KPK semua mungkin jumlahnya 80% yaitu bila ada anggota merasakan yang aneh-aneh, KPK juga kena makanya nggak ada yang benar. Ada peribahasa *ngono yo ngono, ning ojo ngono*. Boleh saja tetapi jangan kelewatan.

“Jangan anda mencari-cari kesalahan mitra anda hanya ingin sesuatu. Bantu dan dukung untuk rakyat, seorang berterima kasih itu rejeki anda, jangan ada urusan yang lain-lain. Keputusan itu itu rakyat,

adapun setelah itu diajak makan ke restoran itu wajar-wajar saja lah”.

Ketika ada mengkritik mitra kerja, sampaikan solusinya. Kalau hanya sampaikan kritik saja, namanya apriori, yang ada hanya fitnah semua salah. Tapi solusinya apa, nggak tahu. Banyak sekali orang menghardik, sedikit sekali orang yang mendidik.

Dambakan politik bersih

Politisi Demokrat yang suka bicara blak-blakan ini mendambakan politik itu bersih. “Saya ingin sekali, lembaga politik ini kita citrakan politik itu bersih, suci. Politik itu baik dan bermanfaat. Yang kotor adalah orangnya, karena itu sering saya katakan, **m a r i** berpolitik



dengan moral, **b e r m o r a l** dengan politik agar hidup yang kita perjuangkan dan rakyat bisa menikmati hasil karya kita,” tandas Soetan.

Dia juga menyatakan, jangan DPR ini lebih banyak dijadikan lahan untuk kepentingan golongan demi mendapatkan simpati, lalu bisa mengubah keputusan yang telah disepakati bersama. Jangan dialihkan untuk menyetujui keputusan yang aneh-aneh untuk pribadi-pribadi, ini harus dihilangkan.

Dia juga mengkritik banyaknya acara DPR berkunjung ke luar negeri. Ke depan, perjalanan keluar negeri dibatasi, manfaatnya apa, ada laporannya nggak. “Bukan nggak boleh, tetapi dikurangi. Anggaran itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah lebih bagus, seperti membangun irigasi dan membangun jalan ketimbang untuk jalan-jalan keluar negeri.

Hal lain yang didambakan, kalau

bisa nanti DPR menjadi rumah rakyat sebenarnya, ada hari untuk menerima rakyat dari mana saja sesuai permintaan rakyat. Nanti akan nilai, fraksi mana yang benar-benar paling banyak dikunjungi rakyat dan fraksi mana yang bisa menawarkan solusi-solusi problem rakyat itu.

“Jadi ada hari untuk menerima pengaduan rakyat. Ini baru paten. Di jadwal ada hari fraksi untuk menerima rakyat, masing-masing punya gawe baru sedap. Itu namanya rumah rakyat”.

Ditanya mengenai pengalaman di DPR yang tidak mengemukakan,

“Jadi ada hari untuk menerima pengaduan rakyat. Ini baru paten. Di jadwal ada hari fraksi untuk menerima rakyat, masing-masing punya gawe baru sedap. Itu namanya rumah rakyat”

ketika ribut dengan fraksi lain ngotot-an ngototan pertahankan hal yang simple lalu disiarkan secara luas oleh media masa. Kadang loby fraksi sudah sepatat atas suatu hal, tapi ketika diplenokan diinterupsi oleh fraksi yang setuju, lalu ribut melulu.

“Itu pengalaman yang tak enak, ramai saja kerjanya. Sudah saatnya kita hilangkan itu, maka saya bilang ketika masuk DPR tujuannya apa untuk bela rakyat, bukan bela fraksi,” tukas dia.

Mengenai dukungan staf ahli anggota DPR, dia menyatakan hendaknya ditinjau lagi. Staf ahli harus memenuhi kualifikasi dan diusulkan minimal S2 dan hasil seleksi lembaga independen. Yang ada selama ini 60% staf ahli karena hubungan kekerabatan. Dikatakan, bolehlah membantu saudara tetapi kita yang merekomend dan minimal memenuhi syarat.

“Saya usulkan staf ahli nanti adalah orang yang qualified, kalau tidak stop

saja staf ahli, ditambahkan saja staf ahli ke fraksi, sebagai kelompok **think tank**, kalau ada apa-apa dikontak mereka. Misalnya, anggota perlu data soal lingkungan bisa menyiapkan, beberapa saat sudah disiapkan. Ketika raker dengan Menteri LH kemukakan data-data selengkapnyanya sehingga siap berdiskusi menyelesaikan masalah dengan komprehensif. Staf ahli yang ada selama ini kecil kontribusinya.

Soal kekhawatiran pemerintah SBY akan otoriter lantaran dukungan mayoritas parlemen, Soetan menegaskan, makna demokrat adalah mementingkan

orang banyak ketimbang golongan, keluarga maupun pribadi. Jadi kalau demokrat yang memerintah, maka untuk kepentingan rakyat. Sama juga demokrat yang mayoritas di parlemen, tetap mengawasi pemerintah juga ditujukan untuk kepentingan rakyat.

“Jadi nggak ada yang dibilang kong kalikong. Nggak usah khawatir, nanti pemerintah dikatakan otoriter. Ada rakyat yang ngawasi, termasuk pers. Kami dari Demokrat ini juga bukan **yesmen** saja, akan dikritik yang perlu dikritik dan akan beri solusi, dan akan beri apresiasi kalau perlu diapresiasi. Tidak asal tampil beda”.

Sebagai fraksi mayoritas, Soetan menyatakan akan bertekad harus menjadi teladan. Karena itu PD memberi pembekalan, memberi pelatihan termasuk soal disiplin dan tata cara memutuskan sesuatu dan diskusi.

“Ini suatu cara **sense of belonging** supaya parlemen citranya baik. Saya tidak khawatir akan terjadi yang aneh-aneh sepanjang tujuannya baik. Kenapa tidak, kita harus saling ingat mengingatkan,” ungkap Soetan Batoegana. **(mp,sc,si)**

Ketua FPKS Mahfud Sidik; Citra dan Kinerja DPR Periode 2004-2009 Rendah

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Mahfud Sidik mengemukakan, ada dua persoalan serius bagi DPR periode 2004-2009. Pertama soal pencapaian kinerja yang tidak mencapai target secara maksimal terutama di bidang legislasi. Kedua berkaitan dengan pencitraan DPR di mata publik.

Pencapaian kinerja DPR di bidang legislasi baru sekitar 60%," ujar Mahfud seraya menerangkan, bahwa secara kualitatif produk-produk legislasi DPR dalam implementasinya masih banyak persoalan. Mulai dari judicial review, kemudian gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi) sampai kemudian sejumlah Undang-undang yang dalam implementasinya masih menimbulkan pro dan kontra.

Berkaitan dengan pencitraan DPR di mata publik, "Saya kira keterbukaan media sekarang ini semakin menampilkan sisi-sisi yang tidak terlihat, terutama kasus-kasus korupsi, kasus-kasus moral, dan inilah menurut saya yang memang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) DPR periode 2009-2014," jelasnya.

"Komunikasi publik harus diperbaiki," tegas Mahfud. Pendekatan ke-PR-an. Tetapi juga PR yang berbasis pada kinerja, bukan PR yang sekedar mengkomunikasikan asap saja. Tapi betul-betul kinerja.

Ditanya bagaimana memperbaiki kinerja? Mahfud menegaskan, legislasi bukan hanya pencapaian kuantitatif, tetapi aspek kualitatifnya itu. Sehingga jangan sampai Undang-undang baru satu bulan selesai dibahas, sudah di judicial review. Seolah-olah pembahasan dan penyusunannya itu jadi terkesan asal-asalan.

Dari sisi pengawasan Mahfud menjelaskan sebenarnya sudah cukup bagus. Apalagi DPR sendiri memang

memfasilitasi berjalannya fungsi pengawasan. Seperti misalnya secara anggaran itu ada alokasi anggaran untuk komunikasi intensif, untuk penyerapan aspirasi. Memang kebijakan anggaran untuk memfasilitasi fungsi pengawasan ini terlihat, impactnya itu terlihat secara positif. Tinggal bagaimana diperkuat, artinya temuan-temuan lapangan itu bisa terfollow-upi baik di komisi maupun di paripurna DPR dalam penggunaan hak-hak yang dimiliki.

Out put-out come jelas

"Karena itu kita harapkan juga ketika pengawasan itu *di follow up, out put dan out come nya itu clear.*

Misalnya soal Angket BBM, orang bukan cuma melihat bahwa oh muncul angket, tapi out put dan out comenya apa, ini harus clear," papar Anggota PKS dari Dapil VIII Jabar.

Lalu misalnya Tim Pengawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo, out put



out comenya apa. Jadi bukan sekedar DPR gagah. Ada angket BBM, ada angket Lumpur Sidoarjo, angket BLBI dan lain-lain. “Tapi *endingnya* menurut saya harus diperjelas,” tambah Mahfud.

Sedangkan dari sisi fungsi DPR sebagai pembuat anggaran, Anggota Komisi II DPR dari PKS ini menyatakan, bahwa DPR sebagai *budget house* masih cenderung dalam posisi tidak berimbang dengan pemerintah.

Pertama, menurutnya karena memang daya dukung DPR sendiri juga masih lemah. Misalnya DPR ini kan baru terlibat dalam proses

kepentingan dalam pembahasan APBN, maka sebenarnya posisi DPR itu akan semakin kuat. Yang repot kalau konflik kepentingan masih bermain dan masih kuat. Maka tawar menawar, politik akomodasi itu pasti akan terjadi.

Harus Transparan

Untuk menghindari konflik kepentingan yang berakhir tawar menawar itu, menurut Mahfud adalah transparansi. Artinya setiap tahapan-tahapan pembahasan itu harus transparan ke publik. Sebagaimana rapat-rapat di komisi dia transparan, jadi transparan itu bukan hanya dalam pembahasan legislasi, dalam rapat-rapat pengawasan, tetapi dalam

sebenarnya kalau mau obyektif, bahwa perumusan itu tidak hanya melibatkan DPR via Baleg dan Pemerintah via Depkumham. Karena *stake holder* Undang-undang ini banyak, jadi memang harus ada komunikasi yang melibatkan berbagai *stake holder* sehingga kita punya peta kebutuhan Undang-undang baik yang baru atau yang revisi dalam 5 tahun.

Kemudian skala prioritas setiap tahunnya seperti apa. Sehingga memang betul-betul Prolegnas yang dibuat berdasarkan satu kajian komprehensif, ada *grand designnya*, ada skala prioritas setiap tahunnya.

Sehingga tidak ada lagi istilah di tengah jalan muncul RUU Inisiatif tiga yang akhirnya karena persoalan

Karena *stake holder* Undang-undang ini banyak, jadi memang harus ada komunikasi yang melibatkan berbagai *stake holder* sehingga kita punya peta kebutuhan Undang-undang....



pembahasan anggaran ketika pemerintah sudah mengajukan nota keuangan oleh Presiden, kemudian masuk draft RAPBNnya. Jadi kita tidak mengikuti atau tidak punya proses alternatif untuk melihat bagaimana mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) itu berjalan. “Kita tidak punya alternatif untuk melihat, sehingga data perbandingan dari usulan pemerintah, ini yang belum dimiliki oleh DPR,” tuturnya.

Dengan demikian, akhirnya kita hanya membahas draft akhir yang diajukan Pemerintah. Ini memang membutuhkan adanya *supporting system* di DPR. Jadi kalau misalnya dalam proses musrenbang, DPR juga bisa punya peran untuk melihat di lapangan itu seperti apa, sehingga kita bisa tahu proses itu berlangsung seperti apa, sehingga kita bisa mengkritisi.

Selain itu lanjut Mahfud, ketika DPR mampu meminimalkan konflik

penyusunan anggaran pun juga harus transparan. Paling tidak publik bisa mengikuti.

“Kalau pun misalnya ada hal-hal yang memang dia perlu, misalnya ketika kita membahas anggaran pertahanan, kan kita bisa memilah, mana hal-hal yang *konfidensial*, kita batasi. Tapi jangan semua prinsipnya tertutup, kecuali yang dibuka. Prinsipnya terbuka kecuali yang ditutup,” papar Mahfud.

Menanggapi mengenai Prolegnas (Program Legislasi Nasional), Mahfud menerangkan bahwa Prolegnas itu disepakati antara DPR dengan Pemerintah. Jadi menurutnya yang masih menjadi faktor kelemahan adalah tidak ada waktu dan proses pendahuluan yang cukup, antara DPR yang diwakili oleh Baleg (Badan Legislasi) dan Pemerintah yang diwakili oleh Depkumham (Departemen Hukum dan HAM) untuk duduk bersama merumuskan, menyepakati kebutuhan Undang-undang setiap tahun itu seperti apa. Bahkan kalau perlu *grand design* dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya dia memaparkan,

tenggang rasa atau apa, akhirnya banyak diterima. Dan tidak sedikit RUU Inisiatif yang muncul di tengah jalan. Sehingga akhirnya kita di DPR kewalahan karena harus mendistribusi SDM anggota DPR yang terbatas ke sejumlah besar RUU yang dibahas. Akhirnya berdampak pada pencapaian kuantitas dan juga pencapaian aspek kualitas, tegas Mahfud.

Harapan Mahfud Sidiq untuk DPR ke depan, DPR perlu memiliki mekanisme yang lebih baik, mekanisme persiapan, mekanisme persiapan pendahuluan pembahasan anggaran, mekanisme persiapan pendahuluan penyusunan prolegnas. Termasuk juga perbaikan mekanisme rapat-rapat kaitan dengan fungsi kontrol.

“Ini yang menurut saya harus dihasilkan oleh Tim Kinerja yang dibentuk sudah setahun yang lalu. Dengan demikian, nanti rekomendasinya itu rekomendasi yang betul-betul aplikatif sesuai untuk kebutuhan DPR periode ke depan. Jangan sampai nanti DPR periode 2009-2014 yang katanya 60% lebih orang baru, ini merumuskan hal yang baru lagi, *trial error* lagi. (sc,si)

Direktur Program PSHK, Ronald Rofiandri:

Target legislasi DPR terlalu muluk-muluk, perlu skala prioritas

DPR-RI masih sering menutup diri dan mengambil jarak dengan pemangku kepentingan dalam membahas Undang-undang, padahal semestinya pembahasan pada setiap tahapan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat melihat bobot perdebatan saat pembahasan.

Partisipasi dari pemangku kepentingan itu sangat perlu karena akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya serta akan lebih tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang diatur,” tegas Direktur program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri.

Kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi tidak bisa hanya diukur dengan kuantitas atau seberapa banyak undang-undang yang dihasilkan, karena yang lebih penting justru kualitas. “DPR sudah harus menyingkirkan semangat bahwa kinerjanya bagus kalau mampu menghasilkan banyak produk Undang-undang. Kuantitas saja tak bisa dibanggakan, melainkan pada kualitas, yakni sejauh mana undang undang itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta didasarkan atas skala prioritas dan efektif dalam pelaksanaannya,” katanya.

M e n u r u t Ronald, target pembahasan RUU di DPR periode 2004-2009 sekarang ini terlalu muluk-muluk, sehingga

target jumlah itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya target itu, selain karena targetnya sendiri terlalu tinggi, juga kenyataan di DPR menghadapi s e j u m l a h kendala dalam pembahasan R U U ini.

Kendala itu, katanya, antara lain target yang dicanangkan tidak sensitif terhadap beban kerja DPR, terdapat problem dalam tata kelola persidangan di DPR serta belum mampu memaksimalkan kinerja fraksi sehingga sering terjadi rapat-rapat yang sulit mencapai quorum, ditambah lagi sangat terbatasnya anggota DPR yang aktif. “Mudahnya membentuk fraksi di DPR juga



membawa konsekuensi pada sering tersendatnya pembahasan RUU, sebab fraksi dengan jumlah anggota sedikit maka anggotanya merangkap di banyak alat kelengkapan dewan,” katanya.

Ditambah lagi, sejumlah anggota DPR masih sering menjalankan tugas sebagai anggota MPR dengan melakukan sosialisasi UUD 1945 hasil amandemen. baik sosialisasi ke daerah-daerah maupun ke luar negeri. “Ini menghambat kinerja DPR,” katanya.

Ke depan, menurut Ronald, DPR dalam menyusun program legislasi harus memperhatikan beban kerja DPR sehingga jumlah yang ditargetkannya tidak terlalu muluk-muluk serta harus berdasarkan pada skala prioritas. “Capaian kualitas tak selalu bisa dibanggakan,” katanya.

Selain itu, tambahnya, manajemen

Selama ini, menurut Ronald, hal itu kurang dilakukan. Dia menunjuk contoh pembahasan RUU Perfilman. Tak banyak para penggiat film yang tahu pembahasannya, tak mengetahui bobot perdebatan maupun substansinya sehingga mereka tidak bisa melihat seberapa besar undang-undang itu mampu mendukung perkembangan industri perfilman nasional. Hal yang sama juga terjadi pada UU tentang Kesehatan maupun UU tentang BHP (Badan Hukum Pendidikan).

DPR, tambahnya, tidak bisa membahas Undang-undang dengan tidak sungguh-sungguh karena semakin transparannya demokrasi sekarang ini maka DPR akan selalu diawasi dan disoroti publik, lebih-lebih jika produknya tidak memuaskan publik maka dapat digugat ke mahkamah konstitusi

ancang sudah akan mengajukan uji materi ke MK.

Karena itu, dalam membahas RUU DPR tidak bisa main-main. Jangan sampai seperti yang terjadi selama ini, bahwa argumen-argumen ilmiah sering diabaikan karena pilihan-pilihan politik.

Menyinggung tentang kenyataan bahwa anggota DPR yang memiliki kemampuan untuk membahas UU sangat terbataas, Ronald menjelaskan disitulah pentingnya fraksi. “Kami masih melihat perlunya fraksi dipertahankan karena kenyataan masih banyak anggota DPR yang kurang memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan diri,” katanya.

Fraksi, tambahnya, dapat berperan mendorong anggota-anggota beraktualisasi diri. Fraksi harus terus berkelanjutan memberikan orientasi ataupun penataran kepada para

... ada anggota DPR yang merangkap di banyak alat kelengkapan DPR, misalnya menjadi anggota komisi tertentu tetapi juga anggota di beberapa (Pansus Panitia Khusus). Hal ini ke depan sebaiknya tidak dilakukan lagi...

persidangan juga harus dibenahi dengan lebih melibatkan masyarakat, baik pembahasan secara cluster maupun konsinyering. Yang tak kalah penting, tambahnya, harus ada ketentuan bahwa setiap anggota DPR paling banyak hanya boleh merangkap dalam tiga alat kelengkapan DPR. “Jangan seperti sekarang, ada anggota DPR yang merangkap di banyak alat kelengkapan DPR, misalnya menjadi anggota komisi tertentu tetapi juga anggota di beberapa (Pansus Panitia Khusus). Hal ini ke depan sebaiknya tidak dilakukan lagi,” katanya.

Libatkan masyarakat

Ronald juga berharap, ke depan, dalam pembahasan RUU harus semakin banyak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang akan diatur, ini penting karena akan terkait dengan efektifitas pelaksanaan Undang-undang.

(MK). “Kini memungkinkan adanya judicial review atas produk DPR yang berupa undang-undang,” katanya.

Meski ada mekanisme Judicial Review (uji materi), DPR tidak bisa melakukan politik lempar batu sembunyi tangan, atau yang penting membahas Undang-undang tanpa pertimbangan matang dengan alasan ada Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya DPR harus malu kalau sampai produknya digugat ke MK dan dikalahkan. “DPR harus malu kalau UU di judicial review, dan dikabulkan.” katanya.

Menurut dia, semakin banyak UU yang diajukan untuk diuji materi di MK dan semakin banyak uji materi dari masyarakat itu dikabulkan MK maka memberi gambaran betapa rendahnya kualitas produk DPR. Kenyataan sekarang ini, ada sejumlah RUU yang masih dibahas tetapi sudah ada elemen masyarakat yang ancing-

anggotanya sekaligus *manage* para anggotanya, siapa-siapa yang perlu diberi kesempatan terlibat dalam pembahasan sebuah RUU. “Jadi orientasi tak cukup hanya sekali di awal masa kerja. Harus berkelanjutan dan itu tugas fraksi atau partai,” katanya(sul).

Pengamat Politik dan otonomi daerah LIPI Dr. Siti Zuhroh

KEKUASAAN BESAR SERET DPR BERKINERJA KURANG BAIK

Perubahan UUD 1945 sebagai bagian penting dari agenda reformasi, memang telah mengubah tatanan kehidupan sosial, politik, dan ketatanegaraan yang sangat fundamental di Tanah Air. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya lebih banyak di cap sebagai stempel pemerintah dan tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti apa keinginan pemerintah Orde Baru. Walaupun secara formal sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Dewan mempunyai tiga fungsi utama yakni legislasi, pengawasan dan bugeting, tetapi ketiga fungsi itu tampaknya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan penguasa.

foto: dudut/maj. adil

Namun, semua itu berubah ketika reformasi bergulir dan amendemen UUD 1945 dilakukan bertahap hingga empat kali mulai 1999-2002. Salah satu yang berubah drastis adalah peran dan kewenangan DPR yang sangat besar, bukan saja dalam bidang legislasi dan dua fungsi lainnya, tapi juga kewenangan DPR dalam ikut menseleksi dan memutuskan calon pejabat publik seperti Gubernur Bank Indonesia, Dubes, dan sebagainya yang sebelumnya menjadi kewenangan Presiden. Perimbangan kekuasaan DPR yang besar itu sering disebut sebagai *legislative heavy*.

Namun kekuasaan yang besar itu dalam praktiknya akhirnya menyeret DPR dalam pola kinerja yang kurang baik alias buruk, tidak seperti diharapkan

semula dengan memberi kewenangan yang besar agar dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah. Ekses kekuasaan yang sangat besar itu dapat kita telusuri sejak tahun 2000 yakni makin banyaknya anggota DPR yang tersangkut masalah hukum karena dugaan praktik suap dan korupsi.

“ Saya punya impresi bahwa tugas dan kinerja DPR itu tidak maksimal. Sistem pemerintahan presidensial yang seharusnya memberi mandat kekuasaan yang besar pada presiden, seolah terganjal di DPR,” . Begitu pun dengan pola koalisi yang diterapkan dalam system multi partai sejak 1999, terutama koalisi dalam pemerintahan Presiden

fungsi utama yakni pembuatan UU, pengawasan, dan anggaran. Pengawasan atau kontrol DPR dilaksanakan lebih banyak atas dasar kepentingan sempit yakni kepentingan partai atau golongan tertentu. Ketika penyimpangan terjadi dan merugikan rakyat banyak seperti kasus Lumpur Lapindo, pengawasan DPR terasa kurang kuat dalam membela kepentingan rakyat.

Begitu juga ketika proses pembuatan UU, kepentingan DPR dan kepentingan partai atau kepentingan pihak tertentu sangat kentara. Sudah banyak pendapat, analisa dan penelitian yang menyiratkan begitu besarnya kepentingan-kepentingan lain di balik UU. Idealnya sebuah UU

di DPR, jumlahnya lebih kecil dibanding fraksi PDIP yang menempatkan diri sebagai oposisi. Fraksi dari partai yang berkoalisi dalam banyak hal malah tidak mendukung pemerintah.

Namun melihat hasil pemilu 2009 lalu, maka peta di parlemen dipastikan berubah dan *legislative heavy* yang secara de jure masih berlaku tidak akan seefektif periode lalu. Pasalnya, partai pemerintah yakni Partai Demokrat menang mutlak dan jumlah kursinya di DPR menempati urutan teratas, belum lagi ditambah fraksi-fraksi yang berkoalisi dan komitmen partai koalisi kini kemungkinan lebih solid dibanding periode lalu.

Tetapi, perubahan peta

pola koalisi yang diterapkan dalam system multi partai sejak 1999, terutama koalisi dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam lima tahun terakhir tidak menggambarkan sebuah praktik koalisi yang efektif

Yudhoyono dalam lima tahun terakhir tidak menggambarkan sebuah praktik koalisi yang efektif.

Partai-partai pendukung pemerintah seperti Golkar, PKS, PPP dan sebagainya yang notabene mempunyai wakil di Kabinet Indonesia Bersatu, memperlihatkan kinerja yang tidak sejalan jika dilihat pola koalisi di DPR. Seharusnya koalisi di pemerintahan itu juga diimplementasi dalam praktik politik di parlemen. Jadi, partai koalisi menikmati bagian kekuasaan di pemerintahan tetapi sering mengkritik dan bahkan mengganjal program pemerintah di DPR. Akibatnya banyak program pemerintah yang tersendat oleh praktik politik di DPR. “Saya bisa menyimpulkan banyak sekali *politicking* di DPR”.

Politicking di DPR itu tergambar jelas dalam menjalankan tiga

dilahirkan untuk pengaturan seluruh kehidupan masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak. Nyatanya, banyak UU yang berbenturan dengan kepentingan rakyat banyak tersebut.

Akan halnya fungsi anggaran, proses penyusunan bersama pemerintah juga terkesan tertutup dan lebih mementingkan kepentingan jalanan partai di DPR. Ironisnya, dalam pembahasan anggaran itu, beberapa anggota Dewan malah ikut menjadi calo dan ini sempat terbongkar di media. Seharusnya hal ini tidak terjadi.

Menghadapi praktik *politicking* DPR selama hampir lima tahun ini, pihak pemerintah memang dihadapkan pada situasi dilematis. sistem presidensial tidak bisa dijalankan sepenuhnya mengingat wakil partai pemerintah yakni Fraksi Partai Demokrat

kekuasaan fraksi-fraksi di DPR ini hendaknya diawasi banyak pihak agar bandul politik tidak drastis berubah menjadi kekuatan pemerintah yang dominan dan mengatur kembali DPR seperti masa Orde Baru. Dalam hal ini, peran media massa, lembaga swadaya masyarakat dan elemen kritis lainnya harus lebih dioptimalkan lagi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan atau *check and balances*. Sebab hanya dengan kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol itulah demokrasi akan berjalan baik dan rakyat menjadi tujuan dari semua program dan kebijakan,***

Direktur IBC Arief Nur Alam:

APBN Masih Elitis, Belum Berbasis Kinerja

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sejatinya merupakan instrumen paling efektif untuk menyejahterakan rakyat. DPR yang juga memegang fungsi anggaran-di samping fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, semestinya mengoptimalkan fungsi anggarannya. Karena posisinya yang strategis, sesungguhnya APBN dapat menjadi instrumen kampanye untuk mendongkrak citra DPR maupun citra partai politik.

Na m u n , sudahkan DPR mengoptimalkan fungsi Anggaran yang dimilikinya?

Menurut **Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arief Nur Alam**, APBN hasil karya DPR dan Pemerintah selama ini masih sangat elitis, belum menjawab kebutuhan masyarakat melainkan baru menjawab kebutuhan elit dan birokrasi.

DPR pun belum mengoptimalkan kewenangannya dalam pembahasan RAPBN. DPR belum menunjukkan kemampuannya untuk

menjadikan APBN sebagai wujud dari agregasi kepentingan rakyat.

“Kenyataannya, dari tahun ke tahun APBN kita kan sangat elitis,” tegas Arief.

Padahal, tambahnya, dalam membahas RAPBN di DPR sekarang ini sampai pada satuan tiga, jadi sampai tingkat unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. “Jadi DPR dalam membahas Anggaran ini sangat rinci, sehingga semestinya kalau anggota DPR aspiratif dan memahami persoalan rakyat, maka dalam pembahasan APBN ini lah akan tercermin,” katanya.

Senagaimana diketahui, DPR dalam menentukan APBN memiliki kekuasaan yang kuat. Berdasar UUD 1945 hasil amandemen, pasal 23 ayat 3 dinyatakan DPR dapat menolak RUU APBN yang diajukan Presiden. Selain itu, dalam Pasal 20-A ayat 1, juga disebutkan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggar dan fungsi pengawasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, DPR



dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa usul perubahan itu dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan defisit anggaran. Selanjutnya Pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan kewenangan yang lebih kuat lagi kepada DPR dengan menentukan bahwa, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Namun, tambah Arief Nur Alam, APBN yang ada belum menjawab kebutuhan rakyat melainkan baru menjawab kebutuhan birokrasi. "Sifat APBN yang demikian juga menurun di daerah-daerah sehingga pembahasan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, juga belum menjawab kebutuhan rakyat," tegasnya.

Dijelaskan, pembahasan APBN masih sangat elitis dan belum transparan sehingga publik tidak bisa mengakses informasi dari tahapan-tahapan pembahasan. Akibatnya, keterlibatan publik sangat rendah dan hasilnya pun tidak menjawab kebutuhan masyarakat. "Apa yang terjadi dalam pembahasan ya masih *copy paste*," tegasnya.

Menurut Arief, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah mengamanatkan bahwa penyusunan APBN adalah berbasis kinerja. Sayangnya amanat itu diabaikan karena kenyataannya APBN masih berbasis tradisional, sehingga anggaran harus habis tanpa melihat urgensinya.

Dia menunjuk contoh, publik tidak memperoleh kejelasan alasan soal angka-angka dari anggaran yang dialokasikan. Misalnya, tidak jelas mengapa anggaran di sebuah departemen naik dan lebih tinggi dari departemen lain.

Apakah benar Departemen yang mendapat alokasi lebih dan naik itu memang kinerjanya semakin bagus secara berkelanjutan. "Ini yang tidak jelas, jangan-jangan anggaran hanya ditentukan lewat loby-loby politik, bukan atas dasar evaluasi kinerja," katanya

Pada hal, tambahnya, semestinya dalam memberikan alokasi anggaran juga didasarkan atas evaluasi kinerja masing-masing Departemen sehingga fungsi evaluasi dan distribusi bisa berjalan baik.

Arief Nur Alam yang juga pernah memimpin FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) ini melihat, DPR dan

pembahasan APBN masih sangat elitis dan belum transparan sehingga publik tidak bisa mengakses informasi dari tahapan-tahapan pembahasan. Akibatnya, keterlibatan publik sangat rendah dan hasilnya pun tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

pemerintah dalam melakukan pembahasan RAPBN juga belum terbuka. "Yang transparan baru pada tingkat implementasinya," katanya.

Pada hal semestinya, transparansi itu harus terjadi sejak perencanaan, penyusunan, eksekusi, implementasi sampai monitoring. "Semestinya, keterbukaan harus terjadi pada setiap tahap," tegasnya.

Semua itu berakibat pada postur APBN yang belum menjawab kebutuhan masyarakat,

melainkan baru menjawab kebutuhan birokrasi. Karenanya APBN masih bersifat elitis. "Saya belum melihat terjadinya reformasi dalam proses Anggaran ini," katanya.

Yang juga krusial, tambahnya, juga menyangkut APBN Perubahan yang semsetinya bagian dari hasil evaluasi setiap enam bulan. Tetapi pada kenyataannya juga belum mencerminkan sebagai evaluasi atas apa-apa kebutuhan rakyat. Juga tidak dievaluasi apakah anggaran-anggaran yang dialokasikan selama enam bulan itu sudah menjawab kebutuhan rakyat.

Pada hal, tambahnya, kalau para anggota DPR dalam menyusun APBN ini sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat maka perjuangannya dalam menyusun dan membahas APBN ini akan sekaligus menjadi media kampanye bagi anggota DPR yang bersangkutan. Dengan demikian bisa menjadi investasi bagi anggota bersangkutan jika ingin maju lagi dalam pemilu legislatif berikutnya.

Atau, kalau pun mau pensiun juga akan memperoleh catatan dan citra yang bagus. Citra yang bagus anggota DPR akan berdampak pula pada citra DPR sebagai lembaga serta citra partai politik dimana anggota bersangkutan berasal. "Sayang anggota DPR tidak memanfaatkan ini," katanya. ■

Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko: Biaya Politik Mahal, DPR Rawan Korupsi

Biaya Politik yang mahal untuk menjadi anggota DPR bisa berimplikasi pada maraknya korupsi di DPR. Karenanya harus ada gerakan penyadaran bahwa menjadi Anggota DPR jangan berharap bisa memperoleh keuntungan finansial, melainkan harus menjadikan DPR sebagai arena perjuangan.

Kalau menjadi anggota DPR semangatnya adalah memperoleh keuntungan secara finansial, maka ini bahaya. Bisa terjebak pada tindak korupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW (Indonesia Corruption Watch) Danang Widoyoko kepada *Parlementaria*.

Danang mengakui, dalam sistem pemilu yang sekarang ini memang untuk bisa menjadi anggota DPR memerlukan cost atau biaya politik yang mahal. Tapi semua itu dari awal sudah disadari oleh calon anggota DPR maupun para pimpinan partai politik. “Dari awal kan semua sudah tahu, bahwa menjadi anggota DPR itu tugasnya berat, ekspektasi masyarakat terhadap anggota DPR juga sangat tinggi tetapi gajinya tidak akan membuatnya kaya. Jadi kalau siap menjadi anggota DPR jangan berpikir modal yang dikeluarkannya harus kembali,” katanya.

Danang Widoyoko mengingatkan, belakangan ini banyak anggota DPR yang dipenjara karena korupsi. Peristiwa itu harus menjadi pelajaran bagi semua anggota DPR agar tidak terjebak mengalami nasib yang sama. “Kita berharap, sudahlah jangan sampai ada anggota DPR yang dipenarakan karena korupsi,” katanya.

Menurut dia, DPR itu memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat tinggi sehingga di tangan orang yang tergiur pada pragmatisme kekayaan finansial bisa menjebakannya pada tindak



korupsi. “ICW bersama rakyat akan terus mengawasi hal ini,” katanya.

Anggota DPR, tambahnya, meski memiliki kewenangan yang tinggi tetapi juga menghadapi tantangan yang besar. “Ingat, seorang anggota DPR itu menerima uang senilai 10 juta rupiah saja sudah tidak boleh, sudah gratifikasi. Hal-hal seperti ini harus diperhtikan oleh anggota DPR,” katanya sembari menambahkan, anggota DPR harus tertib administrasi, bahkan diundang ke luar negeri pun tidak bisa seenaknya, harus dilaporkan.

Menyinggung tentang besarnya biaya yang dikeluarkan seseorang untuk menuju ke Senayan, menurut Danang, memang sangat mengawatirkan karena bisa menjadi akar masalah korupsi di DPR. Karenanya dia berharap, ke depan Partai-partai maupun calon Anggota legislatif jangan sampai jor-joran saat kampanye. Janganlah hubungan dengan masyarakat pemilih dibangun secara transaksional.

“Hubungan dengan masyarakat pemilih haruslah relasional,” katanya.

Selain itu, tambahnya, setelah menjadi anggota DPR maka harus tetap membangun komunikasi dengan masyarakat pemilih dan selalu memelihara konstituen karena pada dasarnya seorang pejabat publik itu haruslah melakukan kampanye secara permanen atau terus menerus. “Jadi kinerja di DPR itu sesungguhnya sudah bagian dari kampanye, kalau kinerjanya bagus menjawab kebutuhan rakyat, maka citranya juga bagus, ini investasi kalau mencalonkan lagi,” katanya.

Danang juga berharap, DPR harus lebih transparan termasuk dalam setiap kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri. “Harus ada laporan apa hasil dari kunjungan kerja maupun kunjungan ke luar negeri itu,” katanya.

Kalau pun laporan itu tidak disampaikan dalam forum rapat paripurna DPR, maka laporan dapat dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pers termasuk diupload dalam situs DPR-RI. “Prinsipnya, rakyat harus mudah mengakses informasi tentang apa saja yang dilakukan wakil-wakilnya di DPR, termasuk dalam kunjungan kerja maupun kunjungan ke luar negeri,” katanya.

Dia mengingatkan, karena ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap DPR maka DPR harus mengimbanginya dengan semaksimal mungkin memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. “Posisi menjadi anggota DPR sekarang ini sensitif, dalam sorotan masyarakat, karenanya jangan macam-macam, harus bekerja secara sungguh-sungguh,” katanya.

Dia mengingatkan, ICW bersama elemen masyarakat lain, termasuk KPK dan pers akan terus mengawasi DPR. Karenanya, DPR harus mau mendenar suara dan kritik dari elemen-elemen masyarakat. “DPR kan representasi rakyat, karenanya dia harus bertindak sesuai kehendak rakyat,” katanya, sembari menambahkan DPR harus menghentikan perilaku-perilaku koruptif. ■

Penguasaan Masalah, Kunci Sukses Relasi dengan DPR

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan selama lima tahun bermitra kerja dengan DPR periode 2004-2009 khususnya Komisi VIII berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi friksi. Salah satu kuncinya, membuat hubungan kerja dengan DPR bagus karena penguasaan masalah, sehingga dalam diskusi dan tanya jawab semuanya merasa puas.

Saya memahami dan menguasai masalah yang menjadi tanggungjawab Departemen Sosial, sehingga semua pertanyaan jawabannya saya sampaikan dengan memuaskan,” katanya dalam perbincangan dengan Parlemenaria mengenai kesan-kesannya bermitra selama lima dengan DPR.

Menurutnya, karena penguasaan masalah itulah semua jawaban yang dipaparkan tanpa teks. “Saya hapal dan menguasai

ruang lingkup dan tugas departemen, karena saya tak mengandalkan teori. Saya sering terjun langsung melihat masalah dan merasakan masalah. Karena itu sambil mandipun bisa saya jelaskan masalah itu,” ungkap mantan Ketua Pansus Buloggate dan Bruneigate DPR dari FPP.

L e b i h
lanjut Bachtiar
mengatakan,
jika dirinya
d i t a n y a
s o a l

sosial pasti akan dijawab, istilahnya mulai A sampai Z. Mulai konflik juga pernah dirasakan, sampai hapal jalan di Poso, Sulteng. Bahkan lanjutnya, kota-kota di Ambon dia juga menyatakan hapal banyak kisah yang disismaknya.

Begitupun soal Aceh, Menteri Sosial ini mengaku hapal, soal penanganan daerah terpencil, apalagi soal kemiskinan dan soal-soal yang bertalian dengan bencana alam. Dia mengaku bagaimana membangun system, sehingga tanpa ditulispun dia bisa menjelaskan.

Baik jalinan hubungan dengan DPR, tambah Bachtiar, karena teman-teman Komisi VIII mengetahui dirinya lama bertugas di DPR apalagi di DPR bukan hanya sekedar anggota tetapi sudah menjalani even-even yang cukup lengkap. Pernah menjadi Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi serta banyak menyelesaikan Undang-undang.

Selain itu Bachtiar mengaku gaya atau karakternya yang tidak bisa berpura-pura melainkan sikap terus terang dan tak bisa dibuat-buat. Akhirnya dia mengaku sulit membuat jarak dengan teman-teman di DPR.

“Saya nggak pandai dengan gaya-gaya, tak cocok. Saya tak bisa membuat jarak dalam pergaulan sehingga menolong kelancaran hubungan kerja dengan Komisi VIII DPR,” ujarnya
d e n g a n



menambahkan dirinya selalu menjalin keakraban dengan siapapun.

Ketika ditanya apakah pernah dilecehkan anggota DPR, dia berprinsip dalam menjalin hubungan harus saling menghargai. Dia menyatakan karena sikap saling menghargai itulah maka tidak pernah dilecehkan DPR. Mungkin pernah berdebat dengan keras, tetapi setelah dijelaskan permasalahannya, akhirnya sama-sama dipahami.

Dalam pembahasan RUU misalnya, Menteri ini tak segan-segan mendatangi Pimpinan Fraksi-fraksi menjelaskan betapa pentingnya suatu RUU digolkan bagi

pernah mendengar bahasa yang tidak bersahabat. “Delapan tahun menjadi menteri, pengawasan Komisi VIII termasuk hasil kunker, jika ada temuan dibahas dalam raker dan dicari solusi tindak lanjutnya,” ujarnya.

Kurang santun

Ketika ditanya mengenai kinerja DPR periode 2004–2009 dibanding sebelumnya, anggota DPR periode ini seolah ada kebanggaan sehingga dalam menyampaikan pertanyaan dalam raker atau rapat puripurna ada bahasa yang kurang santun,

Padaحال sambung dia, menjadi anggota DPR itu mendapat predikat terhormat, terhormat dalam segala hal

lagi.

Dalam berargumentasi para anggota DPR hendaknya punya landasan yang kuat dan masuk dalam logika publik. Misalnya soal Presiden menjawab interpelasi, diperdebatkan sangat lama perlu datang atau tidak. Toh akhirnya nggak datang nggak apa-apa. “Penggunaan hak-hak DPR itu harus hati-hati, harus berujung lah. Ini kan nggak berujung, seperti angker haji, BBM dan DPT. Saya pimpiiin Pansus Bulogate dan Bruneigate ini kan berujung. Akhirnya bingung saya dengan DPR periode ini,”

Masalah lain yang dikritisi mantan Pimpinan FPP DPR ini, publik menilai interupsi dalam

“Orang terhormat kan bahasanya tidak harus bicara dengan kasar apalagi memukul meja dan naik ke meja dengan berteriak-teriak,”

termasuk dalam tutur kata. Tidak perlu kalau tak setuju diungkapkan dengan bahasa kasar, justru menjadikan tidak terhormat.

“Orang terhormat kan bahasanya tidak harus bicara dengan kasar apalagi memukul meja dan naik ke meja dengan berteriak-teriak,” ia menjelaskan.

Karena itu untuk DPR yang akan datang perlu diperbaiki, anggota DPR terhormat segalanya terhormat termasuk sikap dan tutur katanya.

Dia juga mengkritisi, DPR mendatang, tidak seperti sekarang yang terlalu banyak menggunakan hak angket dan hak-hak lainnya. “Sedikit-sedikit interpelasi yang ujungnya nggak ada. Mungkin mereka terobsesi Pansus yang dipimpin dulu, Pansus Bulogate dan Bruneigate, berakhir dan berujung pada lengsernya Presiden Gus Dur,” tegas Bachtiar.

Penggunaan hak-hak DPR ditekankan lagi untuk berhati-hati, jangan sedikit-sedikit interpelasi yang ujungnya tidak ada. “Usul saya penggunaan hak interpelasi dan angket harus hati-hati sehingga wibawanya ada. Ibarat bunga, layu sebelum berkembang, tak ada hasil,” ujarnya

rapat-rapat paripurna substansinya tidak menentukan dan menyimpang dari pokok bahasan, sehingga mengurangi kewibawaan Dewan. Begitu pula kehadiran di paripurna, ikut mencoreng citra DPR terkesan malas padahal berbagai fasilitasnya sebenarnya sudah jauh lebih bagus ketimbang DPR periode sebelumnya.

Menyinggung banyaknya anggota DPR yang berurusan dengan KPK bahkan ruang kerja anggota sampai bisa digeledah, telah menambah keterpurukan citranya. “Saya kira ini harus menjadi pelajaran untuk DPR yang akan datang,” tuturnya.

Menanggapi banyaknya kewenangan DPR dalam ikut menentukan pengangkatan pejabat public, di satu sisi bagus menunjukkan keberadaan lembaga yang kuat, tapi di sisi lain bisa mengarah kepada hal-hal yang negative seperti *dagang sapi*. Ada positif negatfnya, ke depan perlu ditelaah lagi. “Kalau domain eksekutif tak usahlah DPR (legislative) ikut menentukan. Banyak sekali domain yang akan diambil DPR, padahal kurang menguasai permasalahannya,” tegas Bachtiar mengakhiri pembicaraan. (mp,ol,sc)

foto: olly/parle

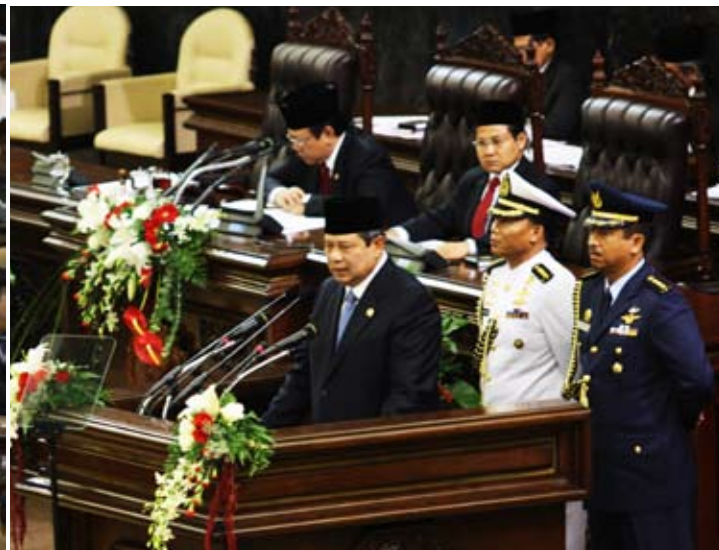
kepentingan masyarakat banyak. “Mana ada menteri mau datang bahas RUU sampai 8 kali, 3 kali sudah hebat,” jelasnya. Dengan pendekatan itulah masalah-masalah yang dibahas bisa selesai sehingga tidak pernah rapat Komisi VIII dengan Mensos berlangsung sampai larut malam. Paling jam 14.00 atau jam 16.00 raker sudah selesai, selesai, tanya jawab dilayani secara menyeluruh lalu diambil kesimpulan.

Dari beberapa produk UU, Komisi VIII DPR dan Depsos telah menyelesaikan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Penanggulangan Bencana, UU Kesejahteraan Sosial dan UU Gelar dan Tanda Saja dan UU Perlindungan Anak.

Dalam fungsi pengawasan, Menteri Sosial juga menilai cukup keras kritis-keras, kalau bisa membuktikan ada kesalahan yang dilakukan staf depsos maka pasti ditindak. Dalam rapat-rapat dia juga menyatakan tak

Dewan dan Pemerintah Jadikan Teroris Sebagai Musuh Bersama

Tindak terorisme yang selalu menelan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil membuat prihatin dunia internasional. Peledakan bom bunuh diri yang dilakukan teroris di sejumlah negara termasuk Indonesia juga menjadi sorotan.



PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DIDEPAN ANGGOTA DEWAN DAN DUTA BESAR NEGARA SAHABAT SERTA MENTERI KABINET INDONESIA BERSAMA MENYAMPAIKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA HUT KE 64 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI. (14/08)/TIM PARLE

Masih berlangsungnya aksi kekerasan melalui bom bunuh diri membuat pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadikan tindak terorisme sebagai musuh bersama. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memerangi terorisme yang telah merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Ketua DPR RI HR Agung Laksono dalam Pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 yang berlangsung Jum'at (14/8) menegaskan bahwa negara tidak dapat dikalahkan oleh aksi-aksi terorisme.

"Menyikapi kebiadaban aksi terorisme yang sudah berjalan bertahun-

tahun, semua lapisan masyarakat harus dapat melawannya, kita tidak boleh dikalahkan oleh aksi-aksi teror," tegas Agung Laksono dalam Rapat Paripurna DPR yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Untuk melawan aksi terorisme, Ketua DPR menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus bersatu dan meningkatkan kewaspadaan, mengingat intensitas teror yang dilakukan kelompok Noordin M Top masih terus berlanjut. "Kita harus berperang, bersatu padu, melipatgandakan kewaspadaan menghadapi aksi teror yang telah berkembang dengan intensitas tinggi. Perang melawan aksi teror masih akan terus berlanjut, lebih-lebih teroris yang paling dicari Noordin M Top masih belum tertangkap," ujar Agung.

Guna lebih optimal dalam menangani aksi terorisme, Ketua DPR dalam pidatonya meminta supaya masyarakat dapat berperan lebih aktif lagi dalam membantu aparat keamanan dalam memerangi terorisme. Peran itu sangat dibutuhkan mengingat pelaku tindak kekerasan tersebut juga tinggal di tengah masyarakat.

"Perang melawan teroris tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat," katanya.

Lebih jauh, Agung Laksono memaparkan bahwa tindak terorisme bukan hanya permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan Indonesia. Tindak kekerasan tersebut juga telah menjadi musuh bersama seluruh negara. Bahkan, dalam Sidang Executive Committee Parlemen Se-Asia (Asian

Inter Parliamentary Assembly) yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu menjadikan masalah teroris sebagai bahasan utama.

"Terorisme memiliki karakter yang tidak mengenal batas-batas negara dan menjadi permasalahan bersama negara-negara lain. Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memeranginya," katanya.

Keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap rencana peledakan bom yang berkekuatan besar serta menangkap sejumlah pelaku teror di Temanggung dan Bekasi juga tidak luput dari perhatian Dewan.

"Apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas prestasi yang ditunjukkan oleh aparat Kepolisian RI khususnya Detasemen Khusus 88 Anti-Teror atas keberhasilan melakukan serentetan perburuan, penyeragaman, penangkapan dan menembak mati para teroris kaki tangan Noordin M Top," ujar Agung Laksono.

Sebagaimana diketahui, Tim Detasemen Khusus 88 Anti-Teror telah berhasil melumpuhkan kaki tangan Noordin M Top pada awal Agustus di Jati Asih Bekasi dan Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku yang dilumpuhkan di dua tempat itu diduga ikut berperan dalam aksi teror di JW Marriott dan Ritz Carlton.

Perang terhadap terorisme juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI di Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah menilai tindakan terorisme merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

"Aksi terorisme dengan melakukan pemboman di tempat-tempat umum adalah tindakan yang sungguh-sungguh tidak berperikemanusiaan," tegas Presiden.

Tindakan pemboman yang dilakukan ditempat umum telah merengut ratusan korban jiwa, baik yang berasal dari negara sendiri maupun warga negara sahabat.

Sebagai bangsa yang besar, Presiden bersyukur apa yang diharapkan teroris dari tindak kekerasan yang dilakukannya tidak terjadi ditengah masyarakat. Rasa ketakutan yang diharapkan terjadi

di masyarakat akibat peledakan bom ternyata tidak tercapai.

"Kaum teroris ingin kita tercekam dalam ketakutan dan kemudian menghentikan kegiatan sehari-hari. Kita bersyukur, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang mampu menghadapi segala tantangan, termasuk terorisme," katanya.

Tak terlalu berpengaruh

Presiden memaparkan bahwa dampak dari tindak terorisme di Indonesia ternyata tidak terlalu mempengaruhi pergerakan ekonomi nasional. Masyarakat masih terus menjalankan aktifitas ekonominya tanpa ada rasa ketakutan terhadap teror.

"Hari ini kita bisa melihat nilai rupiah dan indeks harga saham kita justru semakin menguat. Berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terus berjalan semakin semarak," tutur Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi adanya temuan bom berskala besar yang diduga diarahkan kepada Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menilai hal itu sebagai gejala baru dari tindak terorisme di Indonesia. Menurutnya aksi terorisme mulai ditujukan langsung untuk melawan negaranya sendiri.

"Saya ingin menegaskan bahwa negara tidak boleh dan tidak akan kalah melawan terorisme. Pemerintahan yang saya pimpin akan terus berjalan sebagaimana mestinya, melindungi rakyat, melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia," tegas Presiden.

Dalam pidatonya dihadapan DPR, Presiden meminta supaya masyarakat juga bersatu dalam memerangi aksi terorisme. Dengan peran aktif masyarakat dalam membantu aparat keamanan diharapkan, perang terhadap teroris di Indonesia dapat segera terselesaikan.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita bersama bersatu melawan aksi-aksi terorisme. Marilah kita lindungi warga dan anak-anak muda kita dari pikiran-pikiran sesat dan ekstrim yang bisa mengarahkan mereka kepada tindak terorisme," katanya.

Susilo Bambang Yudhoyono berharap masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan masyarakat

sangat penting mengingat teroris bersembunyi disekitar tempat tinggal.

"Bantulah aparat keamanan dengan memberikan informasi tentang pelaku terorisme yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat kita," ujarnya.

Lebih jauh, Presiden menilai ada beberapa penyebab aksi terorisme. Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak terorisme.

"Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme memiliki beberapa akar penyebab yang utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, ketidakadilan di berbagai wilayah dunia dan akar-akar radikalitas itu sendiri," katanya.

Presiden menegaskan terhadap semua hal diatas, pembangunan yang dilakukan Indonesia di bawah pemerintahannya justru bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan.

"Oleh karena itu, strategi yang kita tempuh tetap memiliki dua sasaran. Pertama, mengatasi akar-akar penyebab, dan kedua, langkah-langkah intensif untuk mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme kapanpun dan dimanapun," jelas Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan penghargaan terhadap kinerja kepolisian yang berhasil melumpuhkan terorisme di Temanggung dan Bekasi. Meskipun telah mampu melumpuhkan kaki tangan Noordin M Top, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepolisian untuk tetap waspada dan terus meningkatkan kewaspadaan.

"Saya sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang tidak kenal lelah dan menyerah dalam memberantas terorisme ditanah air," katanya.

Meskipun dinilai telah berhasil dalam menangani terorisme, Presiden meminta pihak Kepolisian untuk tidak pernah lengah. "Terus tingkatkan kewaspadaan serta cegah dan berantas aksi teror hingga ke akar-akarnya dimanapun mereka berada, siapapun mereka dan apapun motivasinya," ujarnya. **(bayu)**

Mendesak, Payung Hukum Pemberantasan Terorisme

Tindakan terorisme di Indonesia seperti peledakan bom di Bali, depan Kedutaan Besar Australia, Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton sangat meresahkan masyarakat. Kedamaian dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sedikit terganggu akibat ulah teroris.

Upaya pemerintah untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak terorisme di Indonesia tidak pernah surut. Sejumlah aksi penggerebakan kerap kali dilakukan pihak Kepolisian. Bahkan salah satu gembong teroris Azahari terbunuh dalam satu aksi baku tembak di daerah Malang. Tidak hanya Azahari, pelaku bom Bali pun telah dieksekusi mati.

Namun demikian, aksi terorisme di Indonesia nampaknya belum juga berhenti. Tanggal 17 Juli 2009, aksi terorisme kembali mengguncang Indonesia. Kali ini yang menjadi sasaran adalah dua buah hotel mewah yaitu JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan.

Menanggapi penanganan aksi terorisme di Indonesia, pengamat intelijen Wawan Hari Purwanto dalam perbincangan dengan Parlemen menjelaskan bahwa saat ini yang mendesak dibutuhkan dalam penanganan hal itu adalah payung hukum.

Ia menjelaskan sekarang ini, undang-undang yang ada bersifat *criminal justice system*, dimana seorang yang telah terbukti melakukan tindak terorisme dapat ditangkap. "Seseorang setelah terbukti baru bisa ditangkap. Berarti kan dia membom dulu," katanya.

Wawan Hari menegaskan khusus untuk penanganan terorisme dan separatisme diperlukan operasi khusus. Ia berharap ada undang-undang yang mempunyai semangat baru dalam menangani tindak terorisme.

"Ada undang-undang yang

diterapkan khusus untuk teroris dan separatisme, diluar itu jangan," ujarnya.

Dalam perbincangan, Wawan Hari menjelaskan bahwa kemampuan intelijen Indonesia termasuk dalam lima besar dunia. Dengan kemampuan intelijen yang diakui dunia internasional semestinya selaras dengan kinerja yang dicapai.



Pengamat Intelijen
Wawan Hari Purwanto

"Hanya persoalannya saat ini payungnya tidak kuat," jelasnya.

Menurutnya, intelijen hanya dapat memberi laporan tanpa dapat berbuat. Hal itu terbentur dengan UU Anti Teroris yang bersifat *criminal justice system*. "Sebelum terbukti tidak dapat dilakukan apapun," katanya.

Lebih jauh, ia menilai kewenangan terbatas yang dimiliki intelijen dalam menjalankan tugas khususnya dibidang terorisme menjadi salah satu kendala dalam menangani hal

tersebut. "Ini yang menjadi kendala teknis. Kalau tidak diberi kewenangan cukup akibatnya mereka (intelijen) skeptis. Artinya ragu-ragu jangan-jangan dituduh melanggar HAM," katanya seraya menambahkan sangat miris bila tindakan terorisme hanya ditangani dengan *criminal justice system*.

Dalam menangani teroris, menurut Wawan Hari diperlukan tindakan yang proaktif. Penanganan hal itu tidak dapat dilakukan setelah terjadinya sesuatu seperti tindakan peledakan bom.

"Beri payung (hukum) yang cukup, setelah itu kita lihat hasilnya," tegasnya.

Ia menegaskan bila intelijen tidak diberi kewenangan cukup dalam menangani terorisme, maka tindakan teror kemungkinan akan terus terjadi di Indonesia. "Kalau tidak diberi kewenangan cukup pasti meledak lagi dan meledak lagi. Begitu diberi kewenangan cukup, disapu bersih mereka itu (teroris). Terbukti atau belum kalau sudah ada indikasi dapat diamankan dulu," katanya.

Payung hukum merupakan bagian yang paling penting dalam menangani tindak terorisme di Indonesia. "Hingga aparat tidak ragu-ragu dalam bertindak," katanya.

Wawan Hari Purwanto berharap intelijen dapat proaktif meminta supaya ada payung hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya dengan ada payung hukum diharapkan penanganan tindakan terorisme dapat berjalan optimal.

"Kita tidak boleh ada kesan pembiaran. Ini ranah publik dan kita

wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.

Revisi UU Terorisme

Menurut Wawan Hari Purwanto, UU Terorisme Tahun 2003 harus direvisi. Ia menjelaskan bahwa dalam UU tersebut hanya mencakup *criminal justice system*. ”Artinya kalau ada bukti bisa ditangkap kalau tidak ada tidak bukti tidak bisa ditangkap berarti harus ada bom dulu,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam menangani aksi terorisme tidak dapat dilakukan dengan cara menunggu adanya tindakan teror. Menurutnya harus ada antisipasi dini. ”Kalau mengungkap itu kan berarti sudah ada kejadian. Kita ingin itu (teror) tidak terjadi,” ujarnya.

Guna mengantisipasi aksi teror, perlu ada langkah antisipasi. Untuk mengantisipasi aksi teror diperlukan kekuatan hukum.

”Untuk mengantisipasi diperlukan kekuatan. Kekuatan ya payung hukum, kalau payung hukumnya sampai sekarang dicuekin tetap saja prosedur hukum biasa yang berlaku,” katanya seraya menambahkan aksi teror merupakan kejahatan luar biasa dan tidak dapat ditangani dengan prosedur hukum biasa.

Langkah antisipasi dalam memerangi terorisme tidak hanya kewajiban lembaga yang berwenang. Keberadaan pelaku teror yang juga hidup bermasyarakat semestinya dapat diantisipasi lebih dini dengan peran aktif masyarakat.

”Masyarakat juga harus proaktif dan waspada,” katanya.

Lebih jauh, Wawan Hari Purwanto menjelaskan bahwa untuk menggerakkan masyarakat dalam mengantisipasi dini tindak terorisme tetap diperlukan motor penggerak. ”Motornya aparat keamanan setempat yang dapat membuat masyarakat tidak takut untuk memberikan laporan hal sekecil apapun terhadap hal-hal yang mencurigakan,” jelasnya.

Menanggapi peledakan bom tanggal 17 Juli di JW Marriott dan Ritz Carlton, dimana dalam hitungan

yang relatif singkat pihak asing telah mampu mendeteksi pelaku ditanggapi berbeda oleh Wawan Hari. Ia menilai tuduhan terhadap Jamaah Islamiyah sebagai pelaku teror di dua hotel tersebut belum terbukti.

”Buktinya mana, kan mereka cuma ngomong pelakunya JI, buktinya apa?,” katanya.

Menurutnya, peringatan yang dikeluarkan sejumlah negara terhadap faktor keamanan di Indonesia dinilainya tidak terlalu mendetail. Peringatan seperti *travel warning* yang dikeluarkan tidak pernah menyebutkan kapan dan dimana akan terjadi aksi teror.



Lukmanul Hakim

”Cuma ngomong begitu (*travel warning*) siapapun bisa, tapi yang menentukan hari H-nya ya pelaku,” jelasnya.

Usut Tuntas

Tindak terorisme yang selalu menelan korban jiwa telah meresahkan masyarakat. Peledakan bom di sejumlah tempat umum membuat masyarakat harus lebih waspada dalam menjalankan aktifitasnya.

Lukman Nulhakim, warga masyarakat dalam perbincangan dengan Parleментарia meminta supaya pemerintah mengustuntas seluruh tindak terorisme. Pengusutan

yang dilakukan tidak hanya sebatas pelaku namun juga sampai dengan motif.

”Pemerintah perlu menggali lebih dalam motif dari kegelisahan kelompok yang melakukan teror,” katanya.

Ia sangat menyesalkan adanya tindak terorisme di Indonesia. Meskipun sejumlah pendapat menilai pelaku tindakan tersebut dilakukan Noordin M Top, Lukman yang sehari-hari bekerja di kawasan Senayan berharap pihak berwajib dapat segera mengungkap pelaku sesungguhnya.

”Ada penilaian bahwa ini (tindak terorisme) terkait dengan Noordin M Top, tapi kontra intelijen juga tetap ditingkatkan,” ujarnya.

Untuk mencegah tindak terorisme, Lukman berharap masyarakat dapat berperan lebih aktif lagi. Pencegahan lebih dini berupa laporan masyarakat terhadap tindakan yang mencurigakan disekelilingnya diharap dapat mencegah terorisme.

”Dalam rangka stabilisasi, warga diupayakan terlibat,” katanya seraya menambahkan dapat dilakukan dengan diberi penyuluhan ataupun mendekatkan masyarakat dengan aparat.

Lebih jauh, Lukman berharap meskipun masyarakat lebih aktif dalam mencegah tindak terorisme, negara tetap wajib melindungi warga negaranya. ”Negara melindungi segenap warga negaranya, artinya peran negara lebih dominan dalam hal ini (pemberantasan terorisme),” ujarnya.

Sebagai warga negara, Lukman meminta supaya kinerja intelijen dapat lebih ditingkatkan terutama terkait dengan pencegahan tindak terorisme. ”Perlu ada satu terobosan dimana perangkat pengamanan seperti intelijen masuk ke segmen-segmen tertentu hingga dapat dideteksi lebih awal,” ujarnya. (bayu)

Lemah, Kontra Intelijen dan Kontra Terorisme Indonesia

Setiap masyarakat dibelahan dunia ini berharap dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan tenang tanpa gangguan apapun termasuk teror. Aksi terorisme yang selalu menelan korban jiwa dari masyarakat sipil selalu mendapat kecaman dunia.

Peledakan bom di sejumlah tempat membuat sebagian masyarakat merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktifitasnya. Keresahan ditengah masyarakat akan terjadinya teror semestinya dapat disikapi pemerintah. Negara harus dapat menjamin masyarakatnya merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa diselimuti rasa ketakutan akan aksi terorisme.

Di Indonesia, sejumlah aksi terorisme di sejumlah tempat seperti Bali, depan Kedutaan Australia dan Hotel JW Marriott yang cukup banyak menelan korban jiwa seakan telah

menghenyak pemerintah bahwa di negeri yang dinilai negara lain sebagai negara aman dapat juga terjadi teror. Setelah sejumlah peledakan dan tertangkapnya pelaku yang kemudian di eksekusi, masyarakat berharap tidak akan ada lagi teror bom di Indonesia.

Ternyata kenyataan berbicara lain. Tanggal 17 Juli 2009, Indonesia kembali mengalami teror bom. Meskipun tergolong *low explosive* namun efek dari hal itu sangat luas.

Hingga saat ini pelaku utama pemboman Hotel JW Marriott dan Ritz

Carlton di kawasan Mega Kuningan masih terus diburu pihak Kepolisian. Ledakan bom di hotel tersebut membuat lawatan tim sepakbola asal Inggris Manchester United ke Indonesia dibatalkan. Bahkan peledakan yang terjadi saat penghitungan suara Pemilu Presiden telah membuat "gaduh" situasi politik nasional akibat pidato Presiden saat menanggapi kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton.

Banyak kalangan tidak menduga peledakan bom dapat terjadi ditempat yang sama, mengingat sebelumnya JW Marriott pernah juga mengalami peledakan. Dengan pengamanan yang ekstra ketat di dua hotel tersebut, masyarakat menilai tidak akan mungkin teroris akan kembali meledakan bom di tempat itu.

Namun demikian, kenyataan berbicara lain. Jum'at pagi itu, teroris kembali berhasil meledakan bom dengan skala *low explosive*. Kasus yang terjadi ditempat yang sama membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kemampuan intelijen Indonesia dalam mengantisipasi aksi teror.

Wakil Ketua Komisi III & pengamat intelijen Soeripto (F-PKS)

Wakil Ketua Komisi III yang juga pengamat intelijen Soeripto (F-PKS) dalam perbincangan dengan Parlemetaria menilai Indonesia masih lemah dalam bidang kontra intelijen dan kontra terorisme. Menurutnya sampai saat ini belum dapat memetakan apa yang disebut kegiatan terorisme dan kelompok-kelompok serta sempalan yang ada di Indonesia.

"Ini kelemahan di bidang kontra intelijen dan kontra terorisme," katanya.

Untuk mengatasi kelemahan intelijen, ia menganjurkan supaya kemampuan intelijen Indonesia lebih diperkuat. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membantu dan menghadapi segala macam bentuk teror seperti pemboman.

"Dapat bekerjasama dengan negara lain, bisa juga meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisa dan dalam menghadapi terorisme," ujarnya seraya menambahkan pihak-pihak yang berwenang harus tahu lebih dalam mengenai jaringan terorisme.

Kinerja intelijen Indonesia dilihat dari kasus terakhir yaitu pemboman di Mega Kuningan dinilai Soeripto belum mempunyai peta tentang aktifitas terorisme di Indonesia. Dalam tempo yang terbilang singkat, pihak Australia bahkan telah mengumumkan bahwa pelaku pemboman hotel JW Marriott dan Ritz Carlton berasal dari Jamaah Islamiyah (JI).

"Intelijen Australia sudah punya peta tentang berbagai aktifitas terorisme di Indonesia yang kemudian diidentifikasi JI," ujarnya.

Ia menegaskan kontra intelijen dan kontra terorisme di Indonesia harus segera diperbaiki. "Artinya didalam rangka memperbaiki hal itu tidak bisa lagi seakan-akan kalau bicara terorisme itu hanya Densus 88 saja tapi harus dilibatkan secara aktif juga badan-badan yang sudah melakukan kegiatan kontra terorisme, dengan demikian bisa sinergi," katanya.

Selain melibatkan lembaga-lembaga yang memang bertugas menjalankan fungsi-fungsi intelijen, menurut Soeripto, peranan masyarakat dalam membantu dan mendeteksi lebih dini teror sangat diperlukan.

Struktur dalam kemasyarakatan yang dimulai dari keluarga dan Rukun Tetangga diharapkan dapat membantu tugas lembaga-lembaga intelijen.

"Departemen Dalam Negeri sampai dengan ke tingkat RT harus mensosialisasikan tentang bahaya terorisme," ujarnya.

Waspada Disusupi Asing

Kewaspadaan terhadap adanya pihak-pihak tertentu terutama asing yang ikut bermain dalam kasus terorisme di Indonesia harus diwaspadai. Sebab tidak menutup kemungkinan pihak asing juga terlibat dalam sejumlah aksi teror di Indonesia.

Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Soeripto menjelaskan bahwa sejumlah pelaku teror diluar negeri seperti di Irak dan Lebanon telah disusupi oleh intelijen negara-negara di luar negara itu. Bahkan tidak hanya disusupi, intelijen negara lain itu juga ikut serta dalam mengagendakan teror.

"Saya tidak tahu kalau di Indonesia sudah disusupi atau tidak. Yang penting adalah mengetahui peta dan bentuk-bentuk kegiatan kelompok teror," ujarnya seraya menambahkan selama tidak mengetahui hal tersebut akan sulit melacak dan menelusuri pelaku apalagi aktor intelektualnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan bahwa tujuan dari aksi terorisme adalah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Menurutnya, umumnya pelaku teror merupakan orang-orang yang anti keamanan.

"Umumnya terorisme itu anti keamanan," katanya.

Menurut Soerpito, aksi teror yang berdasarkan atas adanya rasa ketertinggalan, keterpurukan dan keterasingan membuat kondisi obyektif dalam hal perkerutan calon-calon teroris. "Orang-orang yang tidak puas dan merasa frustrasi untuk melakukan perilaku kekerasan agresif," ujarnya.

Ia menjelaskan bila Indonesia disebut sebagai sarang teroris karena secara kondisi obyektif, perekrutan calon teroris di Indonesia relatif lebih mudah dibanding di Singapura. "Kondisi sosial ekonomi di Indonesia

yang banyak pengangguran, banyak orang frustrasi dan banyak orang yang emosinya disulut untuk melakukan perilaku agresif," jelas Soeripto.

Faktor Sosial Ekonomi

Sejumlah teror bom di belahan dunia ini selalu mengkaitkan dengan salah satu agama. Tidak terkecuali di Indonesia, sejumlah peledakan bom selalu di curigai dilakukan kelompok yang berlatar belakang agama tertentu.

"Ada dua faktor, pertama adalah ada misi intelijen asing yang ingin mendeskreditkan umat Islam di Indonesia dengan cara terorisme," katanya seraya menjelaskan pihak asing tidak ingin umat Islam di Indonesia menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi ancaman.

Soeripto menjelaskan bahwa hal kedua yang tidak kalah penting menjadi perhatian semua orang adalah kondisi ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Mengingat warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, akan lebih mudah merekrut calon terorisme.

"Dengan sendirinya mudah sekali merekrut calon teroris," jelasnya.

Payung Hukum

Guna lebih memberi jaminan dan efektif dalam memberantas terorisme, Soerpito menilai harus ada payung hukum bagi intelijen. "Kerja intelijen akan lebih pasti. Mana yang merupakan wewenangnya dan mana yang dilarang," katanya seraya contoh memberi kewenangan yang jelas seperti interogasi, memburu dan kewenangan untuk menggeledah tempat yang dicurigai.

Lebih jauh, Soeripto menjelaskan bahwa jaringan terorisme merupakan jaringan asimetris. Ia menilai untuk menghadapi jaringan asimetris harus juga menggunakan cara berfikir asimetris. "Paling tidak harus memahami. Kalau asimetris itu seperti apa, belum tentu pecahannya dapat dilacak. Karena bisa saja hanya membawa misi tanpa harus berinduk komando kepada pusat," jelasnya. (bayu)

Pansus DPT DPR: PROSES PEMILU BERJALAN BAIK DI SEMUA TINGKATAN

Harapan Pansus Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPR adalah mencari persoalan-persoalan yang timbul dan menawarkan solusi penyelesaiannya. Harapan utama ke depan nanti, kita akan mempunyai suatu proses Pemilu yang baik disemua tingkatan, termasuk pemilu presiden yang terarah kepada satu konsep. Konsep yang utama adalah DPT, ini persoalan utama yang dicari sehingga nanti akan membawa manfaat di masa yang akan datang.



PENJELASAN KETUA KPU ABDUL HAFIZ ANSHARY MENGENAI DPT DALAM RAPAT PANSUS HAK ANGKET DPR YANG DIPIMPIN KETUA PANSUS GAYUS LUMBUUN DIDAMPINGI LENA MARYANA MUKTI, RUSTAM TAMBURAKA DAN IGNATIUS MULYONO. (26/08)/EKA HINDRA/PARLE

Demikian ditegaskan Ketua Pansus DPT Gayus Lumbuun sehubungan penulusurannya menangani kekisruhan DPT baik pada pemilu legislatif maupun pemilu Presiden. Hal yang sama dikatakan Rustam E. Tamburaka, Wakil Ketua Pansus Angket DPT dari FPG, tujuan utama pembentukan Pansus Angket DPT di DPR adalah bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Melainkan untuk mencari pembenaran tentang carut-marutnya DPT ini agar Pemilu nanti akan bisa dilakukan dengan sistem pemilihan yang lebih baik.

Menurut Gayus, terdapat dua undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan hak angket, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 masih menggunakan dasar konstitusional

UUUDS Republik Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tersebut masih berlaku karena belum ada undang-undang yang mencabutnya.

Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, bahwa DPR adalah lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hak sipil dan hak politik warganegara dalam pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam tatanan negara demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjamin pemenuhan hak konstitusional warganegara baik untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang

jujur dan adil. Perjuangan hak warganegara untuk dapat memilih sudah diperjuangkan sejak lama sehingga hak memilih adalah hak konstitusional warganegara sebagai bagian dari warisan peradaban demokrasi yang telah kita pilih bersama.

Dalam Pemilu 2009 terdapat permasalahan yang cukup serius terkait dengan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Permasalahan tersebut diantaranya adalah banyak warganegara yang mempunyai hak untuk memilih, namun tidak terdaftar di dalam DPT sehingga kehilangan haknya untuk memilih. Permasalahan DPT ini tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis administratif, melainkan juga permasalahan penghilangan hak konstitusional warganegara untuk memilih. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan Hak Angket mengenai "*Pelanggaran Hak Konstitusional Warganegara Untuk Memilih.*"

Sesuai dengan persetujuan DPR atas penggunaan Hak Angket DPR

terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warganegara Untuk Memilih, maka dibentuklah Panitia Angket DPR tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warganegara Untuk Memilih (Panitia Angket DPT) berdasarkan keputusan DPR RI No.15/DPR RI/IV/2008-2009.

Panitia Angket DPT bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait

terdaftar dalam DPT. Padahal sebelumnya terdaftar dalam Pemilu 2004 atau bahkan terdaftar dalam DPS 2009. Oleh karena itu, KPU dinilai kurang cermat dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, baik DPS maupun DPT.

Tak diawasi optimal

Kekisruhan dalam penyiapan data kependudukan, DP4, serta pemutakhiran data pemilih yang menghasilkan DPS dan DPT, tidak dapat diawasi secara optimal oleh pihak pengawas pemilu tingkat pusat (Bawaslu) hingga tingkat terbawah (PPL) karena belum terbentuk secara kelembagaan, khususnya para Panwaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota serta Panwaslu kecamatan dan

pengawas pemilu lapangan. Oleh karena itu Panwaslu pun tidak memberikan rekomendasi apapun terkait dengan kekisruhan daftar pemilih.

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan, terutama oleh institusi penyiapan data penduduk dan penyiapan data pemilih adalah terjadi pemilih ganda bahkan fiktif serta banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT, meskipun sebagian masyarakat telah melaporkan kepada KPU.

Penyusunan dan Penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang dilakukan oleh pihak pemerintah mulai dari Ditjen Adminduk, Dedagri, Dinas Kependudukan Provinsi, dan Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya tertib, bahkan cenderung rumit dan tidak kompatibel untuk semua kondisi provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menghasilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan penyiapan DP4 secara lebih baik. Oleh karena itu DP4 yang tersedia termasuk setelah melalui pendataan

ulang dengan menggunakan formulir F1-01 dan DRT P4B, belum menunjukkan sistem administrasi kependudukan yang baik. Sementara itu pihak BPS tidak terlibat secara kelembagaan dalam proses penyiapan DP4 tersebut, bahkan banyak DP4 yang diberikan adalah data tahun 2004.

Berbagai masalah dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tanggal 9 April 2009 lalu disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu setidaknya, terbatasnya dan terlambatnya anggaran yang diperuntukan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, kendali geografis, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Papua yang dalam pelaksanaannya harus memerlukan waktu dan sarana transportasi pesawat.

Selain itu, faktor adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga menghasilkan DPT yang bermasalah, baik untuk kepentingan DAU bagi wilayah yang sudah mengalami pemekaran maupun kepentingan alokasi kursi bagi DPRD yang wilayahnya mengalami pemekaran, serta kepentingan lainnya.

“Karena itu Pansus mendesak perbaikan sistem administrasi kependudukan sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” jelasnya.

Kekisruhan DPT diakui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mulai dari pemutakhiran data pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyusunan DPT. Terkait dengan hal tersebut Ketua KPU telah melakukan berbagai langkah yang tertuang dalam jawaban tertulis yang telah dan akan diserahkan kepada Pansus Angket DPT.

Ketua Pansus DPT mengutip penjelasan KPU mengemukakan, salah satu sumber permasalahan penyusunan DPT adalah DP4 yang diterima dari pemerintah yang dinilai tidak sempurna. Dan juga terlambatnya anggaran menjadi salah satu penyebab kisruhnya penyusunan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Bimbing KPU

Ketika diundang rapat dengar pendapat oleh Pansus DPT, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyampaikan terima kasih atas undangan Pansus Angket



dengan hilangnya hak konstitusional warganegara untuk memilih. Dalam kaitannya dengan penyelidikan tersebut, maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data, keterangan, dan fakta-fakta di lapangan.

Panitia Angket DPT mulai bekerja pada tanggal 4 Juni 2009 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009. Setelah melakukan beberapa kali rapat intern, maka disepakati Panitia Angket DPT ini mengadakan kunjungan kerja ke lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Papua, dan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut didasarkan pada keputusan rapat intern Panitia Angket DPR tanggal 11 Juni 2009.

Dari infirmasi yang dihimpun menunjukkan bahwa

KPU (terutama KPU kabupaten/kota) memiliki kewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih yang bersumber dari DP4 yang disiapkan pemerintah. Namun ternyata proses itu dilakukan dengan tidak profesional karena di lapangan banyak terjadi penggelembungan (penggandaan) data pemilih serta masih banyaknya warga masyarakat yang tidak

DPT. Dialog yang dilakukan itu sangat sejuk, sangat nyaman, sangat menggugah perasaannya untuk menyadari apa-apa yang seharusnya KPU perbaiki.

“Jadi Rapat Pansus Angket DPT tidak seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang kita hadapi, dimana kita selalu dicecar dengan sekian banyak pertanyaan. Tapi semuanya berjalan dengan baik, kalau boleh saya menyebut seolah-olah Pansus Angket DPT itu justru membimbing KPU dan menyadarkan bahwa ada beberapa bagian dari kegiatan penyusunan DPT itu yang perlu mendapatkan perhatian,” ungkap Hafiz.

Pada kesempatan ini KPU menyerahkan *softcopy* Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

sendiri.

Kesepakatan di dalam pertemuan ini bukan yang terakhir tapi mungkin bisa ditindaklanjuti, bahkan Ketua Pansus Angket DPT Gayus Lumbuun menawarkan kalau perlu di KPU pertemuannya. “Jadi suasananya sangat bersahabat, ini yang menyejukkan kami semua. Apalagi KPU sudah mengundang juga teman-teman dari daerah provinsi, kabupaten yang juga hadir dalam pertemuan ini kalau dianggap daerah itu bermasalah,” tukasnya.

Gayus menambahkan, yang menggembirakan adalah tujuan dari pertemuan ini mencari fakta dan data yang riil, yang sebenarnya apa yang terjadi dalam rangka perbaikan ke depan, terutama dari

seharusnya dilakukan untuk perbaikan ke depan. Ia tidak menampik temuan dari Pansus Angket DPT tentang kekisruhan di 13 propinsi.

Wakil Ketua Pansus Angket DPT Lena Maryana Mukti (F-PPP) menambahkan, salah satu temuan yang dikroscek kepada KPU adalah DP4 yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU Kabupaten/ Kota. Karena rata-rata CD yang diserahkan itu tidak bisa dibuka, tidak ada *hardcopy*-nya sebagaimana surat edaran KPU yang mestinya disertakan dengan *hardcopy*.

Sehingga Tim Pansus Angket DPT menemukan di beberapa daerah itu KPU menggunakan bukan DP4 sebagaimana perintah undang-undang. Itu temuan Tim Pansus Angket DPT. Ada yang menggunakan data selain dari DP4. Contohnya: DPT Pilgub atau DPT Pilbup, Pilwalikota di kabupaten yang bersangkutan dipakai sebagai DPS Pileg. “Jadi itu yang Tim Pansus Angket DPT kroscek”.

Ketika Tim Pansus Angket DPT datang ke Provinsi Jawa Tengah salah seorang yang ingin ditemui adalah Bibit Waluyo sebagai warganegara bukan sebagai gubernur. Karena persoalannya waktu itu menjadi sorotan nasional, dia tidak terdaftar di DPT yang bersangkutan. Pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus Bibit Waluyo, meski waktu itu dia tidak hadir.

Panwaslu dengan KPU sudah dikonfirmasi, sesungguhnya memang Bibit Waluyo tidak terdaftar di DPT, tetapi yang bersangkutan sudah mendapat Formulir A-5 untuk pindah memilih. “Jadi kenapa beliau melakukan pencontrengan di daerah pemilihan yang beliau berdomisili sebagai gubernur, karena sudah menerima Formulir A-5 untuk pindah,” ia menambahkan. (iw,mp)



KETUA KPU ABDUL HAFIZ ANSHARY MENYERAHKAN TIGA BUAH SOFTCOPY KEPADA KETUA PANSUS HAK ANGKET DPT DPR RI GAYUS LUMBUUN ANTARA LAIN; DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4), DAFTAR PEMILIH SEMEBTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK LEGISLATIF. (27/08)/AGUNG SULISTIONO/PARLE

sesuai permintaan tertulis dari Pansus Angket DPT, *softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan *softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk legislatif supaya bisa dilihat ada perubahan-perubahan dimana yang bisa dilakukan.

Hafiz menegaskan, pada prinsipnya KPU telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara maksimal.

Dalam pertemuan ini juga terungkap temuan-temuan di daerah ternyata ada masalah-masalah yang itu perlu bukannya ditindaklanjuti oleh Pansus Angket DPT tapi juga ditindaklanjuti oleh KPU itu

sudut regulasi. Kalau memang undang-undang yang menjadi persoalan yang perlu diperbaiki maka DPR bersama pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan itu.

Menanggapi pertanyaan adanya DPT bermasalah di 13 Propinsi, kata Gayus, KPU telah menjelaskan bahkan yang menjelaskan langsung KPUD setempat. Misalnya, di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara mereka sendiri yang menjelaskan. Ini akan diperdalam lagi nanti oleh Tim Pansus Angket DPT, karena pada dasarnya Pansus ini ingin melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk sampai kepada kesimpulan apa yang

RAPBN 2010: Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

Penyusunan RAPBN 2010 sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global, yang saat ini masih berlangsung dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia – termasuk Indonesia – pada 2010.



Demikian pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8).

Rapat Paripurna Luar Biasa merupakan sesuatu yang baru untuk DPR Periode 2004-2009 termasuk pengajuan RAPBN dipisahkan dari pidato kenegaraan. Rapat ini disebut luar biasa karena digelar pada saat anggota

dewan reses.

Dalam pidatonya, SBY mengungkapkan selama lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.

DPR dan Pemerinah sepakat tema pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan

Rakyat” terdapat lima agenda program pembangunan nasional. Kelima agenda tersebut adalah:

Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. *Kedua*, Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indoneisa.

Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. *Keempat*, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan *Kelima*, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Presiden melanjutkan, selain diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2010, penyusunan RAPBN 2010 juga dilakukan berdasarkan asumsi ekonomi makro sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp10.000 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional US\$60 per barel, dan *lifting* minyak mentah Indonesia diharapkan dapat mencapai 965 ribu barel per hari.

“Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada 2010 tetap harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontijensi,” kata Presiden SBY.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro 2010 dan prioritas pembangunan

dalam RKP 2010, Pemerintah mengajukan Pokok-Pokok RAPBN Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009.

Dengan demikian, defisit anggaran 2010 direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp133,0 triliun (2,5 persen PDB).

Untuk mencapai sasaran pendapatan negara, kata SBY, pada Tahun Anggaran 2010 mendatang Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun.

Di bidang belanja negara, lanjut SBY, dalam RAPBN 2010 ini pemerintah merencanakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. "Dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah, serta penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah, saya yakin belanja pemerintah dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah kita rencanakan dalam RKP 2010," tegas Presiden SBY.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. "Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12-13,5 persen," jelas Presiden.

Sementara itu, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan



kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia pada 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Untuk mendukung prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun.

Sementara dalam rangka menunjang pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp61,2 triliun.

Hasil yang ingin dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain adalah tercapainya laju pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,0 persen, meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 8,5 persen, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja, dan meningkatnya produktifitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif.

Dalam rangka mendukung upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim, dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 triliun.

Anggaran Pemerintah Pusat Naik

Dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp699,7 triliun, anggaran belanja yang

direncanakan untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp327,6 triliun atau naik sebesar Rp10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasi 2009. "Kenaikan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP 2010," jelas Presiden.

SBY melanjutkan, berdasarkan prioritas RKP 2010, terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Departemen Pendidikan Nasional dalam tahun 2010 mendatang direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar RpRp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar RpRp26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp Rp16,0 triliun.

SBY menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dimaksudkan terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan daya saing pendidikan.

"Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN, kita berharap dapat



meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini,” tandas Presiden SBY.

Belanja Pegawai

Lebih lanjut SBY mengatakan, di samping untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga, prioritas alokasi anggaran 2010 juga direncanakan untuk belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja barang. Dalam RAPBN 2010, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan mencapai Rp161,7 triliun atau naik sekitar Rp28,0 triliun (21,0 persen) dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009.

Kenaikan anggaran belanja pegawai, kata Presiden, adalah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiunan bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari, serta kenaikan uang makan bagi PNS pusat dari Rp15.000/hari kerja menjadi Rp20.000/hari kerja.

Subsidi

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp144,4 triliun. Jumlah ini adalah 14,3 persen dari total APBN. Menurut Presiden, besaran

subsidi ini diperlukan karena negara berkewajiban untuk melindungi lapisan masyarakat terbawah agar beban mereka menjadi lebih ringan, terutama dalam menghadapi kerisis perekonomian global dewasa ini.

De depan, lanjut SBY, perlu melakukan langkah-langkah penataan kebijakan pokok subsidi agar alokasinya dapat lebih terarah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa kita. “Dan akhirnya subsidi dapat diterima oleh rumah tangga yang betul-betul membutuhkan,” kata Presiden SBY.

SBY menambahkan, pada 2010 pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih, dan pangan. Menurut Presiden, melalui subsidi ini kita dapat menyediakan pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau, agar para petani dapat lebih produktif dan lebih meningkat kesejahteraannya. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan beras dengan harga murah bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata SBY.

Pembiayaan Defisit

Untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2010, Pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun. “Dengan kata lain, stok utang luar negeri kita menurun,

yang berarti ketegantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun,” ujar SBY.

Menurut Presiden, defisit RAPBN sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah di antaranya akan mengambil langkah kebijakan mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, yakni untuk jangka panjang dan dengan biaya yang relatif ringan.

“Dalam mengatasi krisis global ini pemerintah tidak akan menggunakan bantuan dana IMF sebagaimana yang dilakukan dalam krisis 1998. Pemerintah telah mengupayakan kerjasama pendanaan siaga yang lebih bermartabat dan tetap menjamin kedaulatan ekonomi nasional,” kata SBY.

SBY menambahkan, kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel.

Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, ratio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada 2004 menjadi sekitar 30 persen pada 2010.

Menurut SBY, penurunan ratio utang pemerintah ini akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penurunan ratio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. (et)

DPR Kritisi RAPBN 2010 Demi Kemakmuran Rakyat

Seluruh fraksi DPR menyampaikan apresiasi sekaligus mengkritisi RAPBN 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di depan Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya Jumat (14/8).

Melalui jubah masing-masing yakni Kahar Muzakir dari FPG, Jakobus K. Mayong Padang dari FPDIP, Zainut Tauhid Saadi dari FPP, Ahmad Mubasyir Mahfud dari FKB, Nurhadi Musawir dari FPAN, Mirwan Amir dari FPD, Rama Pratama dari FPKS, dan Zulhendri Chaniago dari FPBR, Walman Siahaan dari FPDS, serta Mohamad Tonas dari FBPD, mereka meminta penjelasan lebih jauh mengenai angka-angka yang tercantum dalam RAPBN 2010.

Seluruh fraksi sepakat RUU APBN 2010 beserta Nota Keuangannya untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rangka melakukan revisi sebelum disahkan menjadi UU.

Seluruh fraksi juga sepakat APBN diharapkan menjadi landasan awal untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu diperlukan kompetensi, kesabaran, dan kehati-hatian dalam melakukan pembahasannya. Karena itu mereka mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif mencermati dan menyikapi pembahasan APBN 2010 secara arif dan cerdas.

Arif dalam arti memahami kondisi factual atas keterbatasan kapasitas sumber daya fiskal yang dimiliki oleh negara pada saat ini. Cerdas dalam arti senantiasa memandang segala sesuatunya secara positif.

Di antara sejumlah masalah yang dipertanyakan antara lain mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, patokan harga minyak, dan nilai tukar

rupiah terhadap dolar serta nominal PDB, dan *lifting* minyak.

Fraksi-fraksi di DPR berpandangan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 persen pada RAPBN 2010 dapat didorong untuk menjadi lebih besar. Apalagi jika pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan yang berdasarkan pada hasil pencapaian dalam kurun waktu 2004-2008 mencapai angka rata-rata sekitar 6 persen, yang diklaim pemerintah sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi semenjak krisis ekonomi pada 1998.

Beberapa fraksi di DPR juga berpandangan target *lifting* minyak sebesar Rp955 ribu barrel per hari terlalu rendah mengingat potensi dan sumber daya minyak yang dimiliki Indonesia. Target tersebut masih dapat ditingkatkan minimal 1 juta barrel per hari.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut mereka memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melalui Penyampaian RUU APBN beserta Nota Keuangannya menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Di sisi lain ada fraksi yang menilai pemerintah terkesan terlalu hati-hati dalam menyusun RAPBN 2010. Baik dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro maupun dalam menetapkan target pendapatan Negara. Padahal perekonomian global telah menunjukkan trend pemulihan antara lain ditunjukkan oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat.

Salah satu fraksi menyampaikan

apresiasi atas prakarsa pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi secara cepat, tepat, dan terarah pasca krisis ekonomi global yang juga berimbas pada perekonomian nasional. Pemulihan itu antara lain dengan melaksanakan kebijakan pembangunan yang *pro growth, pro poor, dan pro job* melalui pelaksanaan prioritas kebijakan khususnya di bidang perekonomian.

Berikut Pendapat Umum Fraksi-fraksi DPR terhadap RUU tentang APBN 2010 Beserta Nota Keuangannya:

FPG: PEMERINTAH PERLU MENYAJIKAN DATA YANG KOMPREHENSIF

Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) memandang Pemerintah perlu menyajikan data, informasi, dan argumentasi yang lebih komprehensif dalam pembahasan RUU APBN 2010, khususnya yang berkaitan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi 2010 yang dipatok sebesar 5 persen.

Juru bicara FPG Kahar Muzakir mengatakan semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pemerintah, maka semakin besar keinginan pemerintah untuk mencapai target tersebut dan sekaligus semakin tinggi komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan target-target lainnya.

Lebih jauh Kahar mengatakan target-target tersebut juga merupakan indikator seberapa tinggi keberanian pemerintah untuk mencapai hasil optimal bagi bangsa dan negara.

Untuk itu F-PG mengusulkan asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 10.000 per 1 dolar AS.

Sedang asumsi lain yang diusulkan



adalah untuk suku bunga SBI jangka waktu 3 bulan sebesar 6,5 persen, harga minyak ICP sebesar 65 dolar AS per barel, *lifting* minyak 975 ribu barel per hari, dan nominal PDB sebesar Rp 6.050.054,5 miliar.

Asumsi dasar yang diusulkan tersebut menurut Kahar tidaklah berlebihan. Karena data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam periode 2004-2008 yang mendekati rata-rata 6 persen juga diikuti oleh menurunnya rasio utang terhadap PDB dari 57,0 persen tahun 2004 menjadi 32,0 persen pada tahun 2008.

Sementara, kata Kahar, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 9,86 persen di tahun 2004 menjadi 8,1 persen di tahun 2009. Hal-hal ini dapat menjadi modal dasar untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Bersamaan dengan hal tersebut, juga perlu diperhatikan bahwa APBN telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode 2004-2008 dari Rp 430 triliun pada 2004 menjadi Rp 985,7 triliun pada 2008.

Namun sangat disayangkan tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 2,5 persen atau dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 14,2 persen pada 2008. "Data tersebut memperlihatkan bahwa prinsip terpenting dalam APBN yakni keberpihakan terhadap kepentingan rakyat belum dapat diwujudkan secara optimal melalui APBN, sehingga semakin relevan dan perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam," katanya.

Kahar menambahkan fraksinya berharap APBN menjadi landasan awal untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kompetensi, kesabaran, dan kehati-hatian dalam melakukan pembahasan.

FPG juga mengajak masyarakat untuk ikut mencermati dan menyikapi pembahasan RAPBN tahun 2010 secara arif dan cerdas. Arif dalam arti memahami kondisi faktual atas keterbatasan kapasitas sumber daya fiskal yang dimiliki oleh negara pada saat ini.

Cerdas dalam arti senantiasa memandang segala sesuatunya secara positif, yakni dengan menawarkan gagasan-gagasan inovatif namun realistis dan tetap didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan APBN ini nantinya dapat mencapai hasil yang terbaik.

FRAKSI PDIP: KENAIKAN GAJI PNS MESTINYA 10-15 PERSEN

Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya Jakobus K. Mayong Padang DPR menyatakan mestinya kenaikan gaji PNS dan pensiunan dalam RAPBN 2010 sebesar 10-15 persen. Kenaikan sebesar itu wajar, karena kenaikan gaji PNS tahun 2008 sebesar 20% dan tahun 2009 sebesar 15% sementara tingkat inflasi dan kenaikan harga tidak terkendali.

Menurut FPDIP, dengan kenaikan itu para apatur negara semakin meningkatkan kinerjanya dengan disiplin, profesional, dan benar-benar menjadi pelayan masyarakat. "Tidaklah manusiawi membebani mereka harapan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pendapatan memadai," tegas Jakobus.

Terhadap RAPBN 2010 yang mencapai Rp1.009,5 triliun atau naik Rp6,5 triliun dari APBN 2009, FPDIP Perjuangan menyatakan pemerintah harus secara konsisten melaksanakan anggaran berbasis kinerja. Langkah ini harus terus didukung dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan public dan memangkas rantai birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah.

Disamping itu, pemerintah juga diminta

mempergunakan hasil penghematan belanja negara dan peningkatan efektifitas belanja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terhadap defisit anggaran sebesar Rp98 triliun atau 1,6% dari PDB yang naik Rp51,3 triliun atau 1% dari PDB dibanding APBN 2009, FPDIP Perjuangan tidak setuju atas kenaikan defisit anggaran tersebut karena akan menambah utang dan penjualan asset melalui privatisasi. Karena itu fraksi ini mengusulkan defisit anggaran tahun 2010 sebesar 0,0%. "Ini dapat dilakukan melalui efisiensi belanja negara dan peningkatan pendapatan negara yang masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan," tegas Jakobus.

FPPP: ASUMSI MAKRO RAPBN 2010 BELUM BERKESINAMBUNGAN

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) melalui juru bicara F-PPP



Zainut Tauhid menilai sejumlah asumsi ekonomi makro yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2010 belum sepenuhnya menunjukkan adanya sebuah kesinambungan terhadap kemajuan yang ingin dicapai pada masa kini dan mendatang.

"Asumsi makro dalam nota keuangan dan RAPBN 2010 yang disampaikan pemerintah sangat konservatif, sementara itu problem ekonomi yang dihadapi rakyat dan bangsa kita sangat membutuhkan kerja keras dan prestasi tinggi untuk bangkit dari krisis dan mewujudkan perekonomian yang semakin maju," tandas Zainut.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5 persen, menurut F-PPP, target tersebut terlalu rendah karena masih terdapat potensi ekonomi yang bisa dinaikkan untuk

mendorong dan menopang pergerakan ekonomi. Target itu adalah sebuah angka yang belum bisa berbicara banyak, dan belum mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang masih akan kita hadapi di masa mendatang. "Target pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa mencapai minimal 5,5 persen," ujar Zainut.

Terkait dengan pengelolaan defisit anggaran yang sekarang ini angka defisitnya berkurang dibanding dengan APBNP 2009, menurut FPPP, kebijakan itu tidak mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menutup defisit melalui peningkatan kemampuan penerimaan dalam negeri seperti perpajakan, tetapi lebih banyak dilakukan dengan memangkas anggaran pemerintah dan lembaga.

Hal itu, lanjutnya, terlihat dari kemauan pemerintah dalam memungut pajak berdasarkan *tax ratio* yang masih cukup kecil yakni sebesar 12,5%.

Dengan kondisi tersebut, FPPP menilai, belum ada kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini. "Sejauhmana reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini mampu meningkatkan penerimaan pajak maupun kondisi *tax ratio* kita?" tanya Zainut.

FPPP juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih terpaku pada formula yang tidak produktif dalam menyusun anggaran defisit, selain kekurangannya ditutup dengan cara menambah utang baru. "Bahkan FPPP mencermati bahwa utang baru selalu lebih besar dari angsuran utang lama sehingga utang kita tidak pernah berkurang, justru terus meningkat," tandas Zainut.

FPD NILAI DEFISIT 1,6 PERSEN MASIH CUKUP AMAN

Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang merupakan fraksi pemerintah melalui juru bicara Mirwan Amir menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dengan inflasi 5 persen, serta nilai tukar rupiah rata-rata Rp10.000 per dolar AS dengan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata

6,5 persen, dan perkiraan harga minyak mentah di pasar internasional US\$60 per barel cukup realistis. Mengingat negara kita juga masih menghadapi keadaan atau situasi akibat krisis ekonomi global.

Mengenai *target lifting* minyak, FPD meminta pemerintah memberi perhatian yang mendalam agar penetapan perkiraan *lifting* atau produksi minyak dalam asumsi RAPBN 2010 benar-benar dilakukan secara tepat. Karena ketidaktepatan perhitungan akan membuat APBN 2010 kehilangan sumber pendapatan. Jika sasaran *lifting* tidak tercapai, maka akan langsung berdampak kepada penerimaan negara," kata Mirwan.

FPD berpendapat perkiraan *lifting* yang akurat dan realistis sangat penting sehingga diharapkan BP Migas dan Departemen ESDM dapat menetapkan angka yang terbaik.

Sementara terhadap defisit sebesar 1,6 persen yang dipatok pemerintah pada RAPBN 2010, menurut FPD, masih



cukup aman bagi perekonomian Indonesia, meski masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global.

Namun FPD berharap sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program-program pembangunan didasari prinsip kehati-hatian serta mengupayakan pinjaman lunak, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, mengurangi sumber pembiayaan luar negeri juga mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel.

FPD dalam pandangan umumnya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dalam lima tahun terakhir ini dapat menurunkan ratio utang dari 57 persen pada 2004 menjadi sekitar 30 persen pada 2010, yang merupakan ratio utang

terendah sejak era reformasi.

Sementara itu, dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, FPD berharap pemerintah mengikutsertakan swasta dalam proses regulasi, pembagian kerja, maupun alokasi dana yang jelas antara pusat dengan daerah, dan penggunaan alokasi anggaran secara tepat, terarah, terukur, efisien, dan efektif pada kementerian atau lembaga Negara.

F-PAN NILAI RAPBN 2010 KONSERVATIF

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) melalui juru bicara Nurhadi Musawir menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010 cenderung konservatif.

"Secara umum Fraksi PAN berpendapat postur RAPBN 2010 mengalami kenaikan anggaran belanja sangat kecil, cenderung konservatif, kurang inspiratif, dan kurang ekspansif," katanya.

Menurut F-PAN, semestinya pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih tinggi, lebih struktural, dan berkualitas jika pemerintah bekerja lebih keras dan penggunaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.

"Pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi pada level lima persen. Alasan yang dikemukakan adalah situasi perekonomian dunia yang belum kunjung membaik, sehingga ekspor Indonesia belum akan membaik," kata Nurhadi Musawir.

Untuk sisi penerimaan, F-PAN meminta pemerintah untuk lebih bekerja keras dan melanjutkan reformasi perpajakan serta perbaikan insentif bagi dunia usaha. Pemerintah harus memperluas wajib pajak baru dan menggali serta meningkatkan penerimaan pajak agar penerimaan negara lebih optimal.

"Pada sisi penerimaan, pemerintah mentargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp729,2 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun," ujar Nurhadi.

Sementara itu, F-PAN menyambut baik usaha pemerintah yang tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih, dan pangan. Melalui subsidi ini diharapkan tersedia pupuk dan benih berkualitas dengan harga

terjangkau.

“Sehingga petani dapat lebih produktif dan meningkatkan daya beli dan kesejahteraannya,” kata Nurhadi

Namun demikian, F-PAN menilai pemerintah kurang memberi perhatian dalam meningkatkan anggaran di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan serta kehutanan. F-PAN menilai peningkatan



anggaran pertanian penting sebagai upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, danantisipasi dampak El Nino, serta meningkatkan swasembada beras, daging, susu, telur, serta kebutuhan mendasar lainnya.

“Pemerintah harus meningkatkan anggaran di sektor pertanian dalam arti yang luas dan pembangunan pedesaan,” kata Nurhadi.

Lebih jauh, F-PAN berharap pemerintah dapat meningkatkan unit usaha kecil dan menengah terutama di sektor pertanian dan perikanan. “Diharapkan pemerintah bisa membangun dan mewujudkan Bank Khusus Pertanian yang tersebar di penjuru tanah air,” ujarnya.

F-PAN dalam pandangan Fraksinya menegaskan mendukung upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program juga ditingkatkan.

“Baik kredit usaha rakyat untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah maupun subsidi bunga untuk petani, nelayan serta kredit perumahan sederhana untuk rakyat yang belum memiliki rumah,” ujar Nurhadi.

F-KB NILAI ASUMSI EKONOMI YANG DIPROYEKSIKAN PEMERINTAH REALISTIS

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR RI melalui juru bicara F-KB Ahmad Mubasyir Mahfud berpendapat asumsi dan angka-angka makro ekonomi yang diproyeksikan pemerintah cukup moderat dan realistis mengingat saat ini situasi ekonomi global belum sepenuhnya lepas dari krisis, sehingga harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan.

“Kami berpendapat asumsi yang diproyeksikan pemerintah cukup moderat dan realistis,” ujar Mahfud.

F - K B j u g a mendukung komitmen dan tekad pemerintah

dalam mempertahankan kemandirian untuk tidak memperbesar utang luar negeri. Selain untuk mengurangi ketergantungan kepada utang, khususnya utang luar negeri untuk membiayai anggaran pembangunan.

Menurut F-KB, hal ini juga merupakan usaha nyata untuk m e m p e r k o k o h kemandirian ekonomi bangsa. “Berkaitan dengan hal itu, kami berpendapat bahwa sumber-sumber pembiayaan non utang seperti pajak harus dapat ditingkatkan perannya,” kata Mahfud.

Mengenai target rasio pajak 2010 sebesar 12,1 persen, F-KB beranggapan hal tersebut masih dapat ditingkatkan lagi, mengingat situasi ekonomi global dan domestik tahun depan yang semakin kondusif. Hal tersebut tentunya akan diikuti pula oleh meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan nasional, sehingga akan meningkatkan pula potensi pajak.

Selain itu menurut F-KB, hal ini juga mencerminkan situasi positif sebagai buah keberhasilan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah selama ini dan adanya tekad

untuk bekerja keras meningkatkan peran perpajakan sebagai sumber penerimaan negara guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari utang luar negeri.

F-KB juga mengingatkan masih adanya persoalan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. “Walau pemerintah mengimbangnya dengan transfer dana APBN yang cukup besar ke daerah-daerah, harus diakui dana tersebut belum terserap menjadi investasi yang produktif guna meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sebagian dana tersebut malah kembali di tanam di SBI yang berakibat tujuan yang hendak dicapai dari pengalokasian dana tersebut makin sulit terwujud,” ujarnya.

Permasalahan lain yang dalam pandangan F-KB perlu dicermati adalah turunnya angka defisit APBN dari 2,5 persen pada tahun 2009 menjadi 1,6 persen pada tahun 2010. Jika tahun 2010 masih dipandang sebagai tahun transisi dan konsolidasi mengingat imbas krisis



global masih belum akan pulih benar, maka yang diperlukan menurut F-KB adalah adanya ekspansi dari anggaran negara untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan ekonominya, di samping untuk mengimbangi penurunan laju konsumsi masyarakat yang sangat mungkin terjadi pada 2010 mendatang.

F-PKS : REVITALISASI PERTANIAN MASIH JAUH DARI HARAPAN

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicara Rama Pratama menilai perlu dilakukan pembahasan lebih

lanjut secara kritis dan mendalam terhadap beberapa hal terkait RAPBN 2010.

Terkait dengan asumsi makroekonomi, FPKS menilai asumsi tersebut bukan semata-mata keinginan tetapi sebagai sebuah target keberhasilan pemerintah. Untuk itu, FPKS memandang perlu untuk mengevaluasi beberapa besaran asumsi makroekonomi yang digunakan dalam menyusun RAPBN 2010.

Salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat, terutama pemulihan ekonomi yang didukung salah satunya oleh pembangunan sektor pertanian.

FPKS menilai upaya revitalisasi pertanian yang dijadikan sebagai sektor utama, di samping sektor manufaktur

empat tahun terakhir menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, namun pertumbuhan sektor ini masih lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain.

FKS meyakini sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga dapat menjembatani upaya mengurangi pengangguran dan memerangi kemiskinan. "Karena itu, F-PKS mendorong pemerintah mempercepat proses revitalisasi sektor pertanian melalui alokasi anggaran yang lebih besar dalam APBN," tandas Rama.

FBPD: PERLUNYA EFISIENSI ANGGARAN



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) memandang perlunya efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat.

Karena F-BPD melihat terjadinya peningkatan anggaran belanja pusat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2010 sebesar RP 699,7 triliun.

"Pos-pos pengeluaran yang tidak perlu hendaknya dipangkas sehingga tercipta anggaran yang efisien dan tepat sasaran," kata juru bicara F-BPD Muhammad Tonas.

Seiring dengan itu, F-BPD mengharapkan defisit anggaran yang diasumsikan dalam RAPBN 2009 sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) dapat semakin ditekan dan diperkecil dengan menjalankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran negara serta optimalisasi penghasilan negara.

FBPD berharap pemerintah bisa melaksanakan kebijakan anggaran tanpa defisit. "Seberapa besar penghasilan dan

pendapatan negara, sebesar itulah anggaran belanja negara dirancang," ujar Tonas.

Hal ini diyakini agar dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melepaskan ketergantungan kita kepada utang, baik yang diperoleh di dalam negeri, terlebih utang yang diperoleh dari luar negeri.

FBPD juga mendesak agar kebijakan tentang energi gas hendaknya dijadikan prioritas utama dalam rangka memenuhi

kebutuhan dalam negeri minimal 50 persen dari jumlah produksi gas nasional.

Untuk menghemat subsidi, FBPD meminta pemerintah khususnya PLN untuk menggunakan bahan baku gas agar subsidi bisa ditekan sekecil mungkin. FBPD yakin ini bisa dilakukan dalam membuat UU APBN 2010 yang sifatnya leg spesialis.

Fraksinya menyadari bahwa tahun 2009 ini masih merupakan tahun yang sarat dengan tantangan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya potensi krisis finansial global yang berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi, dan politik. Selain juga masalah keamanan dan terorisme yang masih saja mengganggu. Namun F-BPD optimis hal itu dapat dilewati bersama untuk kemaslahatan rakyat.

Tonas menambahkan, fraksinya juga mendukung kebijakan pemerintah tentang stimulus fiskal sebagai sebuah kebijakan *countercyclical* yang diberlakukan dalam mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan menyerap dampak dari PHK.

dan energi yang menopang pertumbuhan ekonomi ternyata masih jauh panggang dari api.

Ini terlihat dari alokasi pagu anggaran Departemen Pertanian sebagai salah satu ujung tombak pencapaian prioritas tersebut hanya memperoleh Rp7,9 triliun turun dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp8,1 triliun.

"Sungguh ironis di tengah komitmen pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sektor pertanian yang pertumbuhannya lebih besar dari sektor-sektor lain serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di saat krisis malah mendapatkan *reward* berupa penurunan anggaran di Departemen Pertanian yang menjadi *leading* sektornya," kata Rama.

FPKS sangat prihatin atas tidak berpihaknya pemerintah pada sektor utama perekonomian kita. Walaupun pertumbuhan PDB sektoral selama

FPBR: ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI 2010 PERLU DIRUMUSKAN ULANG

Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) dengan tegas menilai kebijakan alokasi anggaran subsidi yang tertuang dalam RAPBN 2010 perlu dirumuskan ulang dalam pembahasan di Panitia Anggaran.

Dikatakan juru bicara FPBR Zuhendri Chaniago, Pemerintah terkesan terlalu hati-hati dalam menyusun RAPBN



2010, baik dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro maupun penetapan target pendapatan negara.

“Sikap hati-hati Pemerintah tercermin dari prediksi pendapatan negara dan hibah pada 2010 yang ditetapkan sebesar Rp911,5 triliun atau hanya meningkat sekitar Rp40 triliun dari APBN perubahan 2009,” jelasnya

Bahkan lanjutnya, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya ditetapkan sebesar Rp180,9 triliun atau turun dari target PNBP dalam APBN perubahan 2009 sebesar Rp218 triliun.

Menurut Zuhendri, penurunan target PNBP tersebut disebabkan turunnya penerimaan PNBP minyak dan gas sebagai dampak kenaikan *cost recovery* migas. “Ini patut dipertanyakan, karena dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2009, DPR justru meminta BP Migas menekan *cost recovery*,” tegasnya

Selain itu, kata dia, penurunan target PNBP 2010 juga disebabkan berkurangnya setoran laba BUMN. “Apakah performa BUMN tidak dapat diperbaiki agar laba yang disetor ke negara tidak terus merosot?” tanya Zuhendri.

Dalam pandangan umumnya, FPBR memaklumi defisit pada RAPBN

2010 yang mencapai Rp98 triliun atau sebesar 1,6 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). “Defisit sebesar itu dapat dipahami mengingat besarnya kebutuhan belanja negara dalam rangka mendukung agenda Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat,” katanya

Meskipun RAPBN 2010 mengalami defisit hingga 1,6 persen, Fraksi PBR berpendapat, anggaran subsidi untuk lapisan masyarakat terbawah tetap perlu dipertahankan. Hanya saja, lanjut dia, kebijakan alokasinya harus terus diperbaiki agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Penurunan alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2010 sekitar Rp15 triliun dibandingkan alokasi subsidi dalam APBN-P 2009 yang antara lain disebabkan adanya keinginan untuk melakukan *redesign* kebijakan subsidi dari

subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran (*targeted subsidy*), menurut FPBR, rencana pemerintah tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat lapisan bawah yang selama ini menikmati pemberian subsidi.

FPDS DUKUNG PROGRAM EFEKTIFITAS ANGGARAN BELANJA 2010

Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) melalui juru bicara Walman Siahaan mengatakan mendukung program pemerintah yang dapat meandorong kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mampu menghadapi kondisi krisis keuangan global.

“Perlu ada efektifitas penggunaan anggaran belanja tahun 2010 agar lebih berpihak pada kepentingan dan pemberdayaan rakyat guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan demi terwujudnya negara yang adil, damai, dan

sejahtera,” kata Walman.

Menurut Walman, pemerintah harus menjaga momentum dari makro ekonomi karena perlu adanya tindakan yang baik dari sisi fiskal maupun moneter dalam melihat dampak dari inflasi dan tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan dalam suasana ekonomi global yang masih belum stabil.

“Perubahan asumsi indikator makro ekonomi dalam APBN tidak bisa dilakukan seketika karena terkait dengan mekanisme dan siklus APBN yang bersifat rigid dan tetap,” tegas Walman.

Mencermati asumsi dan struktur penerimaan belanja, papar Walman, terdapat indikasi bahwa RAPBN 2010 akan tetap membuat pemerintah tergantung pada utang, misalnya untuk membiayai defisit pemerintah berencana menciptakan utang domestik sebesar Rp107.9 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp9.9 triliun.

“FPDS memberikan perhatian dan mendukung kebijakan pemerintah agar dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeri, baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan memangkas defisit



anggaran dan mengefektifkan penyerapan melalui strategi alokasi pengeluaran yang benar,” tandas Walman.

Selain itu, tambah wلمان, melalui upaya memperluas program stimulus ekonomi dengan fokus mendukung sektor riil, sebagai dasar pelaksanaan APBN guna membantu pemulihan ekonomi nasional dan melaksanakan program-program pembangunan.



MENKEU: RAPBN 2010 MERUPAKAN KEBIJAKAN BASELINE

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RAPBN 2010, Kamis (20/8) di depan sidang Paripurna DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam RAPBN 2010 merupakan RAPBN transisi, yang disusun oleh pemerintahan saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru hasil pemilu 2009. Menurut Menkeu, sebagai RAPBN transisi, maka kebijakan yang diusulkan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2010 merupakan kebijakan *baseline*, yang dimaksudkan untuk memberi ruang gerak lebih luas bagi Pemerintahan yang baru hasil pemilu 2009 untuk dapat melaksanakan program dan kebijakan yang telah dijanjikan mulai pada tahun pertama pemerintahan tersebut. Meskipun begitu, tambah Ani, demikian ia biasa disapa, sebagai tanggung jawab kenegaraan, RAPBN 2010 juga tetap harus mampu menjaga fungsi-fungsi pemerintah agar dapat tetap berjalan secara penuh dan program-program yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki kesejahteraan rakyat dapat dijaga keberlangsungannya. Menanggapi usulan FPKS, FBPD, FPBR, FPG, dan FPAN yang menginginkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2010, Menkeu menjelaskan masih terdapat unsur ketidakpastian yang cukup tinggi pada 2010 mengingat sektor keuangan global masih berada dalam tahap awal pemulihan.

Menurut Ani, target pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan yang memadai dan cukup realistis. Bahkan, perkiraan dari lembaga-lembaga ekonomi internasional (*Consensus Mean*) untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 hanya berkisar 4,7 persen.

“Pemerintah akan terus berusaha melakukan berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi,” janji Menkeu.

Menanggapi usulan fraksi-fraksi DPR untuk meningkatkan persentase DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional menjadi 27 persen, Menkeu mengungkapkan bahwa peningkatan 1 persen dari PDN Neto akan berdampak pada peningkatan tidak hanya pada DAU, melainkan juga pada Dana Otonomi Khusus (setara dengan 2 persen plafon DAUN Nasional), dan perhitungan 20 persen anggaran pendidikan terhadap belanja APBN, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan defisit.

Menanggapi kritik fraksi-fraksi DPR mengenai meningkatnya defisit 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2010, Menkeu menyatakan perkiraan itu cukup memadai dengan mempertimbangkan kebutuhan pemulihan ekonomi.

Di satu sisi, pendapatan negara pada tahun 2010 diperkirakan akan meningkat lebih besar dibanding kondisi tahun 2009 yang mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan belanja juga tetap dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan dukungan fiskal pada perbaikan perekonomian nasional serta perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, lanjut Sri Mulyani, besarnya defisit APBN akan terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan APBN serta

penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Upaya tersebut, menurut Menkeu, diharapkan akan didukung dengan peningkatan penerimaan perpajakan, kepastian, serta penggalian potensi perpajakan lainnya.

Di bidang belanja negara, peningkatan alokasi anggaran akan terus diupayakan terutama untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Sementara menanggapi pertanyaan mengenai utang dari fraksi-fraksi DPR, Pemerintah meminta DPR dapat memahami bahwa pengelolaan utang merupakan bagian dari kebijakan APBN keseluruhan dan bahkan merupakan hasil dari kesepakatan politis antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan kebijakan fiskal.

Utang, kata Ani, adalah konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, di mana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Selain untuk menutupi defisit, utang baru juga digunakan untuk *debt refinancing* atau membayar utang lama yang terakumulasi utang dari masa lalu yang jatuh tempo.

Pemerintah akan mengupayakan utang baru lebih baik dibanding utang lama dari sisi biaya maupun risikonya. “Pemerintah akan terus menjaga sumber pembiayaan defisit yang memiliki risiko dan biaya terkecil dan tidak memiliki ikatan politis apa pun,” tandas Ani.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi-fraksi DPR untuk terus mengupayakan kemandirian bangsa termasuk di dalamnya pengurangan stok utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Salah satu strategi pengelolaan utang yang dilakukan selama ini adalah melalui pengurangan utang terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. (parle)

DPR Dukung BSMI Terakomodir dalam UU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat ini sedang merumuskan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkait dengan lambang kemanusiaan. RUU tersebut diberi nama RUU Lambang Palang Merah (RUU LPM). Jika RUU ini jadi disahkan, maka Palang Merah akan dianggap sebagai satu-satunya lambang lembaga kemanusiaan di Indonesia.

Seperti diketahui, saat ini jika berbicara mengenai masalah kemanusiaan, secara umum di dunia ini ada dua lambang kemanusiaan yang diakui, yaitu Palang Merah (Red Cross) dan Bulan Sabit Merah (Red Crescent).

Untuk ruang lingkup Indonesia, masyarakat secara umum lebih banyak mengenal lambang Palang Merah Indonesia (PMI) yang berbentuk 'palang' (cross) berwarna merah karena PMI sudah lebih dahulu hadir sejak zaman kemerdekaan. Selain PMI, di Indonesia juga ada lambang bulan sabit berwarna merah yang lembaganya bernama Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).

Dari nama RUU tersebut sepintas sudah dapat dilihat ketiadaan eksistensi lambang bulan sabit merah. Artinya, jika RUU tersebut disahkan dengan menetapkan palang merah sebagai satu-satunya lambang kemanusiaan di negeri ini. Disitulah letak persoalannya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU LPM, Azlaine Agus menuturkan, dilihat dari segi kebutuhan, RUU LPM sebenarnya

bukanlah kesatuan RUU yang sifatnya mendesak.

"Tetapi ini (RUU LPM-red) diajukan dipemerintah sudah cukup lama dan masuk dalam program legislasi nasional. Jadi apa yang sudah dimasukan didalam program legislasi nasional itu secara bertahap harus kita bahas," kata Azlaine di Jakarta, baru_baru ini.

Azlaine mengungkapkan, DPR

menerima draft RUU itu dari pemerintah pada akhir tahun 2006. Kemudian diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR, kemudian Bamus DPR memutuskan bahwa pembahasan RUU ini tidak dibahas di tingkat Pansus, melainkan diserahkan ke Komisi III DPR.

"Karena itu Komisi III DPR membentuk Panja (Panitia Kerja-red), dan anggotanya seluruhnya Komisi III, karena ini mengenai lambang bukan kegiatannya," ujarnya.

Di DPR sendiri beragam pendapat terbagi-bagi, ada yang setuju 100 persen RUU tersebut, ada pula yang menginginkan lambang Bulan Sabit Merah di akomodir. Bahwa realita keberadaan baik BSMI maupun lembaga-lembaga lain yang menggunakan lambang Bulan Sabit Merah juga patut direpresentasikan sebagai hak warga negara mendirikan organisasi kemanusiaan dan tidak menafikan kontribusi yang sudah



diberikan bagi bangsa dan negara.

Bahkan pasal-pasal yang mengandung “kontroversi” yang diajukan dalam RUU Lambang Palang Merah seperti pasal 37, 39 dan 40 memberi hukuman penjara selama 3 bulan atau denda tiga puluh juta hingga seratus juta rupiah jika menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dalam sebuah aktivitas kemanusiaan (kepalangmerahan) di Indonesia.

“Kalau lambang palang merah itu digunakan sebagai perhimpunan nasional yang memiliki hubungan dengan negara lain, sampai disitu DPR setuju. DPR cuma tidak setuju kalau semua lambang lembaga kemanusiaan yang lain harus hapus setelah Undang-undang ini ada,” ujar Azlaini.

Menurut Azlaini, pihaknya justru menghargai adanya lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. “Katakanlah itu BSMI, nah dengan disahkannya undang-undang ini, BSMI tidak bisa lagi menggunakan BSMI, padahal mereka (BSMI-red) itu eksis sebagai sebuah semangat. Sebagai sebuah kesadaran dari kelompok bangsa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam kasus bencana gempa di Yogyakarta, tanpa bantuan dari pemerintah, BSMI berhasil menghimpun bantuan dari Negara-negara lain. “Nah mereka yang berkerja bertahun-tahun dengan semangat yang demikian masa kita tidak berikan penghargaan,” katanya.

Prinsip kemanusiaan

Sementara itu mantan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Muas mengatakan Palang Merah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kelahiran palang merah bukan oleh karena didasarkan hanya semata-mata keinginan *founding fathers*, tetapi lebih didesak kepada kepentingan internasional didalam rangka untuk membahas pertukaran tawanan perang pada saat itu,” katanya.

Soal adanya lembaga-lembaga kemanusiaan di luar PMI yang juga kerap melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, Muas menilai hal itu tidaklah menjadi persoalan yang prinsip.

“Tapi alangkah baiknya, lembaga-lembaga kemanusiaan itu bergabung saja di PMI. Mari kita besarkan PMI, jadi bukan banyaknya kelembagaan tetapi semua anak bangsa yang berkeinginan untuk membangun gerakan kemanusiaan mari kita bangun palang merah yang memang masih lemah ini,” harapnya.

Munculnya RUU LPM diajukan pada tahun 2005 melalui Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Uniknya pada tahun 2002 tepat pada saat Bulan Sabit Merah Indonesia dideklarasikan, Departemen Luar Negeri (Deplu) memanggil sejumlah pendiri BSMI untuk mengganti lambang Bulan Sabit Merah menjadi lambang yang tidak mengikuti lambang pada konvensi Jenewa yang selama ini dipakai yaitu Bulan Sabit Merah.

Sementara itu timbul resistensi juga dari kalangan PMI mereka mengimbau untuk tidak menggunakan lambang Bulan Sabit Merah, sebagaimana dimuat di harian Suara Merdeka/10 Juni 2002. Para pengurus BSMI diminta mengubah nama dan lambang semula, misalnya dengan menggunakan Bulan Sabit Hijau, Bulan Sabit kuning dan sejenisnya.

Saat itu BSMI didirikan dengan misi dakwah dengan simbol Bulan Sabit Merah dengan asas Islam. Namun dalam kegiatan kemanusiaan, BSMI bersifat universal bagi tiap penerima layanan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang suku, agama, kelompok dan negara dalam memberikan kontribusi kepada segenap manusia.

Eksistensi BSMI sempat teruji ketika terjadi perang Irak pada tahun 2003 dimana terdapat tawanan Indonesia yang menjadi korban konflik antara Irak dengan Amerika Serikat, BSMI diminta bantuan oleh Departemen Luar Negeri untuk berpartisipasi dalam pembebasan tawanan Indonesia tersebut dan

akhirnya BSMI bersama Departemen Luar Negeri bersama-sama bekerja dan menjalin hubungan baik hingga saat ini.

Kejadian tsunami Aceh memberikan pengaruh besar juga terhadap eksistensi BSMI. Tahun 2005 BSMI mendapat tempat khusus oleh Komisi VIII DPR RI karena diminta pendapat dan masukan terhadap RUU Penanggulangan Bencana yang kini sudah diundangkan. Di tahun yang sama pula itulah, melalui Departemen Hukum dan HAM, pemerintah mengajukan RUU LPM dan dibahas di Komisi III DPR RI.

Sementara dari substansi pengajuan RUU tersebut jelas bahwa kepentingan Palang Merah Indonesia sangat diakomodir oleh pemerintah.

Sementara itu, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Jenewa dengan menggunakan lambang Palang Merah diratifikasi dengan UU No. 59 Tahun 1958 pada jaman demokrasi terpimpin Soekarno yang sebelumnya dengan Kepres No.25 Tahun 1950 juga keikutsertaan PMI dengan bergabung dengan ICRC (International Committee Red Cross) dan hubungan kemanusiaan ke luar negeri dalam IFRC (Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) juga patut menjadi catatan atas dibahasnya RUU Lambang Palang Merah.

Alasan lain yang mendasari pengajuan RUU tersebut adalah bahwa peraturan yang sudah ada (ratifikasi) bagi lambang palang merah karena tidak mengatur secara rinci tentang spesifikasi teknis mengenai Lambang Palang Merah dan pemakaian lambang palang merah pada produk merek tertentu. (nt)

RUU Perfilman Akomodir Keinginan Insan Film

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspirasi dan tuntutan masyarakat khususnya masyarakat perfilman Indonesia menuntut payung hukum perfilman untuk direvisi. Pasalnya UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap sudah tidak mengakomodir dunia perfilman.

Dunia perfilman Indonesia saat ini dianggap berada pada kondisi belum optimalnya penggunaan film sebagai media pembentuk karakter bangsa serta belum

terintegrasinya fungsi film sebagai karya budaya, hiburan, informasi, pendidikan nilai serta ekonomi.

Oleh sebab itu Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata, pendidikan olahraga dan kepemudaan berinisiatif membuat rumusan baru mengenai Undang-undang yang mengatur tentang perfilman nasional menggantikan UU No.8 Tahun 1992.

UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap Ketua Pansus RUU Perfilman Irwan Prayitno tidak lagi sesuai dengan keadaan dunia perfilman nasional. Dikarenakan UU tersebut belum menggambarkan tuntutan semangat reformasi. Baik dari segi perkembangan teknologi film, dan juga keadaan secara global tentang perfilman.

“Perlu ada pengaturan yang sifatnya terbuka untuk mengurangi intervensi dan peran pemerintah dalam memajukan dunia perfilman,” ujarnya.

RUU ini

nantinya akan menempatkan film Indonesia sebagai unsur perekat bangsa, filter untuk kepentingan nasional dari serbuan film asing, serta film Indonesia harus lebih menekankan pada fungsi edukatif daripada sisi komersil.

“Perkembangan perfilman yang didalamnya erat kaitannya dengan aspek komersialisasi, sangat diperlukan sebuah regulasi,” ujarnya.

Regulasi yang mengatur pendistribusian, anti monopoli dan liberalisasi perfilman, perlindungan terhadap insane perfilman dan adanya upaya mengangkat konten daerah dan industri perfilman daerah untuk mendapat pengakuan nasional.

Hendaknya RUU ini dapat bersinergi dengan berbagai peraturan pemerintah baik di pusat dan daerah sehingga tidak saling bertentangan karena pada akhirnya akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi undang-undang tersebut

Menanggapi kerisauan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) yang menilai Rancangan Undang-undang Perfilman tidak mengandung semangat reformasi, Irwan mengungkapkan seharusnya para pengusaha tersebut menyebutkan Pasal dan Bab berapa saja yang tidak mengandung unsur semangat reformasi.

“Justru akibat tidak adanya pengaturan dalam UU No.8 Tahun 1992 menyebabkan adanya praktek monopoli,” tandasnya.

Adapun Praktek monopoli yang dimaksud Irwan adalah dalam hal pendistribusian film dan pemasaran. Praktek monopoli akan mematikan dunia usaha perfilman di luar grup monopoli untuk ikut bersaing dan

foto: supardi/parle



**Ketua Pansus RUU Perfilman
Irwan Prayitno**

berkembang secara adil dan merata. Contohnya bioskop.

Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatur akan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat, maka RUU Perfilman ini nantinya menurut Irwan akan mengatur secara keseluruhan dalam perfilman.

RUU Perfilman akan membawa angin segar bagi pengusaha baru yang ingin bersaing dan berkembang di dunia perfilman. Hal ini disebabkan adanya pendistribusian film tersebar secara merata.

Keadilan dalam persaingan usaha nantinya, akan dijamin dalam sejumlah pasal yang memberi peluang, hak dan kewajiban serta kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha perfilman dan tenaga profesional perfilman.

“Kita memberikan peluang bagi pengusaha kecil untuk berkembang. Saat ini yang berkembang hanya yang besar dan yang kecil semakin hilang,” tegasnya.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah RUU akan selesai pada akhir jabatan periode, Irwan tidak menjanjikan jika RUU Perfilman tepat waktu selesai sebelum akhir jabatan periode 2004-2009. “Kalau belum selesai yang terpenting kita sudah bekerja keras dan biarkan periode berikutnya yang menyelesaikan,” katanya.

Akhir Periode, Diharapkan Selesai

Fenomena social keprihatinan masa depan perfilman nasional Indonesia sering dilontarkan berbagai kalangan. Selama ini nasib perfilman nasional dinilai hidup segan dan mati tidak mau. Film nasional, masih terjepit oleh beban impor film asing terutama Amerika, sebagai konsekuensi imbal ekspor tekstil nasional sejak tahun 1970an.

Mutu film nasional juga tak

mengalami kemajuan dari sisi produksi dan kualitas estetik. Dari segi produksi dalam kurun 10 tahun, jumlah produksi film nasional tak lebih dari 150 judul film yang layak tayang di berbagai bioskop nasional. Sedihnya lagi dari 150 judul film nasional tadi, hanya 2 persen yang ditonton oleh masyarakat dalam jumlah signifikan.

Oleh sebab itu Direktur Perfilman Departemen Budaya dan Pariwisata, Ukus Kuswara sangat mendorong terselesainya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perfilman yang tengah dibahas oleh DPR.

RUU Perfilman diharapkan mampu membawa perubahan positif terhadap

menanggapi keresahan dari sejumlah pengusaha bioskop yang tergabung dengan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), yang menilai RUU Perfilman tidak mengandung semangat reformasi dan akan mengembalikan dunia perfilman nasional ke zaman orde baru dimana semua urusan perfilman diatur oleh pemerintah.

Adapun keterlibatan pemerintah menurut Ukus hanya sebagai fasilitator dan regulator. Hal ini guna terselenggaranya perfilman secara adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum.

“RUU ini pada dasarnya telah



Direktur Perfilman Departemen Budaya dan Pariwisata, Ukus Kuswara. foto: doc.

iklim perkembangan perfilman nasional pada masa mendatang, terlebih memberi payung hukum dan kepastian dalam membangun mekanisme pasar yang adil.

“Pemerintah merasa perlu ikut campur tangan, terutama menyangkut masalah peredaran karena mekanisme pasar tidak bisa bekerja sempurna. Pemerintah harus bisa melindungi pihak yang lemah, agar bisa berjalan dengan adil,” kata Ukus.

Pernyataan tersebut sekaligus

sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan desentralisasi, multikulturalisme, *good governance* dan keadilan,” ujarnya.

Desentralisasi di bidang perfilman ditunjukkan dalam sejumlah aturan yang memberi peluang perfilman daerah untuk berkembang dan mengembangkan dirinya secara mandiri.

Penyederhanaan Perijinan

Sedangkan rasa keadilan terjamin

dalam sejumlah pasal yang memberi peluang, hak dan kewajiban, serta kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha perfilman serta tenaga profesional perfilman termasuk artis.

“Isi RUU juga menunjukkan adanya upaya penyederhanaan perijinan dalam usaha dan kegiatan perfilman,” tandasnya.

Izin usaha perlu diatur supaya usaha hulu dan hilir tidak dikuasai oleh

tidak ada satu pihak yang menguasai industri dari hulu ke hilir. RUU ini sesuai dengan UU anti Monopoli,” tegasnya.

Semangat Reformasi

Ukus berjanji, RUU perfilman sarat mengandung semangat reformasi. Apabila sekarang pembuatan film terbatas pada pita film seluloid, maka kedepan akan diatur pembuatannya

praktek monopoli penyelenggaraan film, karena itu domainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kita mencegah jangan sampai bioskop-bioskop tertentu kesulitan mendapatkan akses film,” tegasnya.

RUU perfilman di bahas untuk memberikan kondisi saling menguntungkan, saling memperkuat, transparan, dan terikat dalam bentuk formal. RUU ini akan menumbuhkan bioskop, investasi, memungkinkan penanaman modal asing, dan keberpihakan kepada masyarakat. Sementara untuk kesulitan yang dihadapi saat ini adalah pengarsipan.

Lembaga Independen

Pihaknya juga mengajukan dibetuknya lembaga independent seperti Badan Promosi Perfilman agar bisa fokus dalam menangani festival budaya di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan dari segi pengawasan penayangan film akan diserahkan kepada lembaga sensor film karena apabila sensor diserahkan kepada setiap daerah maka akan membutuhkan waktu lama untuk bisa ditayangkan di bioskop. Oleh sebab itu penting skali dibuatnya suatu kriteria tertentu di pusat untuk ditaati di daerah.

“RUU ini sangat positif untuk mengatur perfilman,” tegasnya.

Adapun sanksi bagi bioskop yang melanggar akan dijerat pidana dan perdata maksimal 500 juta s.d 1 miliar.

“Tidak ada kepentingan apapun kecuali membuat suatu aturan untuk membuka kesempatan secara fair dan menjaa kepentingan bangsa,” katanya.

Harapan saya, semoga RUU Perfilman bisa diselesaikan pada periode anggota DPR 2004-2009 yang telah mempunyai pemikiran untuk perkembangan perfilman. (da)



Iklan baliho film. foto: supardi/parle

pihak yang tidak bertanggungjawab. Izin dimungkinkan untuk memberikan akses kepada orang lain supaya bisa berkisah di dunia perfilman. Diantaranya, izin membangun gedung bioskop, izin produksi film, Production House (PH), izin impor, ekspor, dan tanda daftar judul film untuk melindungi produser.

Menurut Ukus, saat ini ada 800 PH hampir mati dan yang efektif hanya beberapa puluh saja karena setiap televisi mempunyai *inhouse* (PH) sendiri. Dan semakin banyak film nasional diproduksi maka semakin kecil penayangannya di bioskop. Tahun 2006 jumlah produksi film sebanyak 33, namun film asing yang ditayangkan di bioskop mencapai 207 film.

“Aturan ijin hanya untuk memberikan hak kepada orang lain yang akan berkisah di bisnis film, dan

cukup dengan pita film digital yang harganya jauh lebih murah. Sehingga kedepan, masyarakat akan sangat dimanjakan dengan perfilman dan harga yang terjangkau.

Terkait peredaran produksi film juga akan diberikan ketegasan hak dan kewajiban dalam pemutaran film. Jika dahulu hanya memberikan film kepada bioskop yang berjaringan, maka kedepan akan diatur dan tidak ada pengusaha bioskop yang dibunuh. “Tidak ada pembatasan kreativitas dan peredaran,” terangnya.

Menanggapi kerisauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada RUU Perfilman yang menghapuskan sensor, Ukus secara tegas menepisnya. Sponsor film harus tetap ada sesuai acuan Mahkamah Konstitusi.

Pihaknya juga menyangkal jika RUU disahkan untuk menghilangkan



DPR selesai bahas RUU MKG; UPAYA KURANGI RESIKO KORBAN BENCANA

Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (RUU MKG) telah terbentuk dan disetujui DPR menjadi Undang pada tanggal 1 September 2009. RUU ini disetujui seluruh Fraksi terdiri dari 17 Bab dan 105 Pasal.

Undang-Undang tentang Meteorologi, klimatologi dan geofisika, merupakan peraturan perundang-undangan yang dipandang oleh DPR RI dan Pemerintah sesuatu yang dibutuhkan dalam upaya mengurangi resiko tingkat korban bencana setiap tahunnya.

Informasi mengenai Meteorologi, klimatologi dan geofisika bisa dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan pembangunan, ataupun kegiatan keseharian, ataupun keputusan dalam perubahan iklim dan cuaca, yang diharapkan akan banyak membantu mengurangi korban-korban, apabila terjadi bencana.

Negara Indonesia merupakan negara yang unik, negara tropis yang terdiri

dari belasan ribu pulau dan kepulauan. Memanjang di antara garis ekuator sebagai median.

Indonesia juga merupakan tempat dengan wilayah paling labil di dunia tempat terjadi pertemuan pergerakan tiga lempeng besar yaitu Indo-Australia yang bergerak ke utara, Eurasia yang bergerak ke Tenggara, dan Pasifik yang bergerak ke barat.

Pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menghasilkan palung laut dalam yang memanjang dari Kepulauan Mentawai hingga kepulauan Banda. Jalur pertemuan ini merupakan pusat gempa tektonik dan menghasilkan jalur gunung berapi di daratan yang dikenal sebagai sirkum Mediteranea.

Sedangkan pertemuan lempeng Pasifik dan Eurasia juga menghasilkan

palung laut dalam di timur Sulawesi serta deretan gunung berapi dalam jalur gunung api Sirkum Pasifik. Oleh karena itu tidaklah heran banyak sekali terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, ledakan gunung, banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan, dan lain-lain. Sejak tahun 1999 sampai 2008, selama 10 tahun, bencana alam telah mencatat kerugian yang sangat besar seperti, 180 ribu orang meninggal, 8,4 juta orang menjadi korban. Kerugian ekonomi mencapai 10 milyar Dollar Amerika.

Bencana tersebut mengancam keselamatan jiwa-harta dan meresahkan masyarakat. Karenanya, dibutuhkan informasi prediksi dan warning yang cepat dan akurat yang pengaturannya perlu dipertegas dalam rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika ini.

Hal itu tertuang dalam laporan Ketua Panja yang disampaikan dalam Rapat kerja Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam dengan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, yang dihadiri juga Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sri Woro Budiati, baru-baru ini di Gedung DPR RI, Jakarta,

Pemerintah wajib melaksanakan

Ketua Panja Hardi Soesilo saat menyampaikan laporannya menjelaskan penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, pengembangan, rekayasa, dan kerjasama internasional dalam bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. "Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan menunjuk Badan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikannya berdasarkan rencana induk yang ditetapkan," paparnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Hardi mengatakan wajib didirikan stasiun pengamatan. Pendirian Stasiun Pengamat tersebut



MUDAHIR ANGGOTA FPDIP SAAT MENYERAHKAN NASKAH RUU MKG KEPADA KETUA KOMISI V DPR RI AKHMAD MUQOWAM DIDAMPINGI KETUA PANJA HARDI SUSILO SEKALIGUS PENANDATANGAN NASKAH RUU MKG OLEH MENTERI PERHUBUNGAN JUSMAN SYARFI DJAMAL UNTUK DISAHKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI. (25/08)/AGUNG SULISTIONO/PARLE

dapat dilakukan oleh Badan atau selain Badan. Badan menetapkan dan mengelola Sistem Jaringan Pengamatan yang terdiri dari stasiun-stasiun pengamatan.

Dia menerangkan Stasiun Pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang masuk sistem jaringan pengamatan, dilarang direlokasi kecuali mendapat izin Badan. Sedangkan khusus untuk pengamatan yang dilakukan oleh setiap kapal laut berukuran tertentu dan pesawat terbang Indonesia untuk kepentingan keselamatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan wajib dilaporkan kepada Badan.

Dalam RUU ini juga ditetapkan tentang kewajiban lembaga penyiaran dan media massa milik pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi public dan peringatan dini tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Khusus untuk kejadian ekstrem, oleh anjungan pertambangan lepas pantai, kapal laut atau pesawat udara yang sedang beroperasi di wilayah Indonesia, Hardi Soesilo menegaskan kejadian tersebut wajib seketika disebarluaskan kepada pihak lain dan dilaporkan kepada Badan.

Pada RUU ini, diatur pula bahwa untuk pelayanan informasi yang merupakan pelayanan informasi khusus dan pelayanan jasa dikenai biaya dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam menunjang penyelenggaraan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. RUU ini juga mengatur tentang keharusan peralatan pengamatan yang layak operasi dan dikalibrasi secara berkala.

Selain itu, UU ini memberi perlindungan terhadap sarana dan prasarana dan memberi tanggungjawab kepada Badan, Instansi Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah dan badan hukum Indonesia untuk mengamankan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Salin itu ditegaskan pula bahwa setiap orang dilarang merusak, memindahkan, melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sarana dan prasarana, termasuk frekuensi telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Dalam Undang-undang ini diatur tentang kewajiban Pemerintah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim melalui koordinasi kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan perubahan iklim yang akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Terkait dengan kondisi geografis dan keunikan kondisi Indonesia yang sangat peka terhadap perubahan factor Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam RUU ini mengatur

tentang kerjasama internasional dan menunjukan Badan sebagai wakil tetap (*permanent representative*) Pemerintah Indonesia di *world Meteorological Organization* (WMO).

Sedang, Penelitian, rekayasa dan pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian bangsa.

Lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan atau Warga negara Indonesia, wajib melaporkan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dan atau berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara, kepada Badan.

Khusus kepada lembaga asing, perguruan tinggi asing dan warga negara asing wajib mendapat izin, serta wajib mengikutsertakan secara aktif peneliti instansi pemerintah yang terkait.

UU ini juga memuat ketentuan pidana sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang baik, serta melindungi kepentingan hukum, memberikan efek jera kepada pelanggar

Sangat dibutuhkan

Anggota DPR RI Abdul Hakim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan posisi Indonesia secara

geografis terdapat pada daerah yang rawan bencana, yang berada pada tiga lempeng patahan. Selain itu, Wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terkait dengan faktor cuaca dimana masyarakat kita yang terkait dengan pelayaran, pertanian, penerbangan juga sangat membutuhkan informasi yang akurat tentang cuaca, iklim, dan hal terkait yang didalamnya.

Artinya dari sisi itu, informasi terkait Meteorologi, klimatologi dan geofisika yang dalam bahasa umumnya adalah tentang cuaca dan iklim sangat mendasar dibutuhkan.

Hanya saja karena payung hukum adalah keberadaan BMG diatur dalam Keppres, kemudian perintah kepada negara untuk memberikan informasi terkait dengan kecuacaan dari beberapa sektor masih tersebar dalam beberapa Undang-undang. Maka diharapkan dengan adanya UU tentang Meteorologi, Klimatologi dan geofisika diharapkan adanya jaminan terpenuhinya informasi yang berkesinambungan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun oleh pengambil kebijakan terkait dengan informasi tersebut.

Abdul Hakim mengatakan Undang-undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan seperti informasi public dan informasi khusus.

Informasi public adalah informasi rutin yang harus diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini tanggungjawabnya diberikan kepada Badan MKG yang harus secara rutin memberikan informasi sebagaimana diatur perundang-an.

Informasi yang sifatnya khusus misalnya dalam sektor penerbangan, pelayaran, sesuai dengan kebutuhan public dan masyarakat. Selain itu, dalam undang-undang ini diatur secara khusus dalam satu bab dimana agar pemerintah telah menyiapkan dana dan informasi tentang MKG supaya dapat dijadikan acuan maka ada bab khusus yang mengatur terkait dengan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta *stakeholder* lainnya dalam memanfaatkan informasi terkait dengan MKG yang dihasilkan oleh pemerintah.

Itu harus dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan atau keputusan penting lainnya. Misalnya di bab 7

ada kewajiban penggunaan informasi. Kepentingan lainnya yang dilakukan oleh MKG dilakukan oleh berbagai badan misalnya BMG, BUPP, LIPPI, TNI AU, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dirasa tidak efisien. Maka dengan adanya badan yang ditunjuk oleh UU BMKG itu dimana berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaannya.

Abdul Hakim menjelaskan bahwa nanti ada sebuah sistem yang dibangun badan lain selain BMKG dengan aturan-aturan yang akan diatur secara teknis.

Hal lain dalam UU yaitu mengatur terkait perizinan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing harus dilakukan melalui prosedur yang jelas terkait dengan BMKG karena informasi ini adalah sebuah aset sumber daya.

Kemudian dalam hal lain ditegaskan dalam UU ini bahwa informasi ini ada jaminan secara terus-menerus bisa diterima oleh masyarakat maka ada kewajiban media milik pemerintah untuk mempublikasikan hasil-hasil pengamatan yang dilahirkan oleh BMKG. "Intinya kita ingin memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Kalau kemudian tidak ada mediana mesti tidak bisa," jelas dia.

Ditambahkan lagi, dalam UU ini ada kewajiban media milik pemerintah untuk menyiarkan. Mengingat UU yang disetujui pemerintah yang tadinya hanya 7 bab 58 pasal sekarang berubah menjadi 17 bab dan 105 pasal. Karena kita ingin secara komprehensif

mengatur terkait dengan kegiatan MKG supaya hasilnya bisa menjamin masyarakat mendapatkan informasi lengkap terkait dengan BMKG.

Menurut Abdul Hakim semua badan diberikan kewenangan untuk berkoordinasi, kebijakan menjadi aspek koordinasi kenegaraan dengan presiden.

Bab 8 tentang kewajiban penggunaan informasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi MKG dalam penetapan kebijakan situasi terkait.

Selanjutnya Abdul Hakim menerangkan DPR dan pemerintah sangat antusias dalam mengesahkan UU ini, karena kita sudah membuat sebuah payung yang kokoh untuk melahirkan badan yang dilindungi oleh UU. Tapi katanya, sebaik apapun perundang-undangan tanpa ada konsistensi implementasinya pemerintah dan peran serta masyarakat, itu tidak bisa berjalan dengan maksimal.

DPR akan mengawal bagaimana pemerintah melahirkan bentuk deregulasi turunannya dan implementasi. Dan hal lain perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan anggaran, termasuk sosialisasi yang memegang peran penting. (as)



**Anggota DPR RI
Abdul Hakim
dari F-PKS**

Venna Melinda artis yang terpilih menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jatim VI (Tulungagung) mewakili Partai Demokrat menyatakan siap untuk fokus memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Komitmen saya jelas, karena telah mendapat dukungan suara rakyat sehingga menjadi anggota DPR tidak bisa menjadi *second job*. Kalau saya kemarin jadi artis karena main *jobnya* artis, tetapi sekarang berbeda," ujar artis dan pesinetron cantik menjawab Parlemenaria menjelang pelantikannya sebagai wakil rakyat 1 Oktober.

Peraih Puteri Indonesia 1994 dan None Jakarta 1993 ini menyatakan tekadnya untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai anggota DPR. "Kalau sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat makanya tentu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini akan saya kerjakan sepenuh hati, sepenuh jiwa," ujarnya mantap.

Bahkan lanjutnya, dia berencana untuk kuliah lagi, agar bisa lebih menambah wawasan karena berbeda latar belakang pendidikannya bidang ekonomi. Menurutnya, politik adalah suatu hal yang harus dipelajari dan cepat menyesuaikan diri, serta terus menerus mau belajar.

Isteri Abang Jakarta Irvan Fadilla yang lahir di Surabaya 29 Juli 1972 menyatakan, setelah dilantik sebagai anggota DPR dirinya akan membuat rumah Vena Melinda Center di Daerah Pemilihan (Dapil) Tulungagung Jawa Timur. Masyarakat disana meminta untuk

menampung aspirasi rakyat perlu dibangun rumah aspirasi, sebagaimana disampaikan saat sosialisasi kampanye lalu.

"Saya sudah tampung keinginan masyarakat bahwa Rumah Aspirasi atau Vena Melinda Center setiap harinya akan menampung aspirasi masyarakat sampai lima tahun ke depan. Inilah yang sedang saya persiapkan, termasuk staf dan tenaga ahli di Jakarta," jelasnya.

Meski sebagai anggota Dewan tidak hanya memikirkan Dapilnya saja tetapi paling tidak, dengan adanya rumah aspirasi maka akan terjalin hubungan dengan konstituen yang jelas. Bila hubungan dengan konstituen lebih dekat maka secara moral maka nilai idealisme tetap terjaga.

Bagi mantan pesinetron yang aktif sebagai instruktur senam ini, penting tugas di DPR berdasar idealisme walaupun bekerja untuk masyarakat Indonesia. Mengutamakan Dapil

hanya satu contoh kasus meski nanti ada kunjungan kerja dan tugas-tugas lainnya semua diarahkan untuk perjuangkan aspirasi daerah.

Persiapan Venna untuk memasuki tugas sebagai wakil rakyat tampaknya cukup baik terbukti dia berencana akan menjadi anggota Komisi X antara lain membidangi pariwisata, seni budaya dan pendidikan. "Saya pengennya di Komisi X karena sebelum ini *track recordnya* banyak berhubungan dengan pariwisata seperti None Jakarta dan Puteri Indonesia," ungkapny.

Di Tulungagung ia melihat komunitas kerja seni yang hidup dari kesenian seperti campur sari, ludruk sangat terkenal namun mereka terkendala ekonomi atau dana sponsor kalau akan mengadakan pagelaran.

Mereka kesulitan memikirkan ekonomi, *boro-boro* mau menggelar kesenian, banyak problemnya yang menghadang. Padahal *heritage* (warisan

Anggota DPR mantan artis dan Puteri Indonesia

Venna Melinda;

Siap Fokus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

budaya) berupa kesenian khas daerah seperti itu yang seharusnya dilestarikan. Kalau bisa *go publicnya* sama dengan musik pop di Indonesia, sehingga makin berkembang," Hal-hal seperti ini yang merupakan PR buat saya, bagaimana caranya pekerja seni bisa lebih berekspresi lagi di bidangnya dan sifat tradisionalnya tidak hilang begitu saja karena globalisasi," terang Venna.

Sedangkan masalah yang berhubungan dengan pendidikan, dia mengaku sudah bertemu dengan GTT (guru tidak tetap), mereka ingin sekali kesejahteraan lebih diperhatikan. Boleh dibilang mereka ujung tombak, rata-rata mereka di desa dan sebenarnya ingin lebih *all out* dan lebih produktif lagi.

"*Boro-boro* untuk mengembangkan diri, honorinya saja hanya Rp 50 ribu sebulan.

Itulah keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan di agenda kerja awal. di Komisi X. Termasuk bidang pemuda dan

olah raga, potensinya di Jatim banyak sekali. Berbagai potensi itu harus dikembangkan," ia menjelaskan.

Venna menegaskan kembali rumah aspirasi yang akan dibangun nanti tak hanya sebagai *media center* tentang program pemerintah yang mereka belum tahu, tapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap reses tiga bulan sekali akan buat program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat.

Ia sangat memahami keinginan masyarakat, anggota Dewan jangan datang hanya kalau perlu atau saat kampanye saja. Karena itu ia bertekad setiap reses akan membuat agenda yang sifatnya memberdayakan masyarakat sehingga lebih termotivasi. Dengan upaya itu ia optimis bisa mencari celah bagaimana masyarakat kita bisa terlepas dari krisis ekonomi yang masih melanda negeri ini. (mp, dw)

E.E. Mangindaan : Mengawal Pemerintah Optimalkan Pembangunan Pro Rakyat

Tokoh yang satu ini selalu tampil rapi, santun, dan tampak berwibawa ketika memimpin rapat-rapat di Komisi II DPR RI. Tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi masyarakat terutama masyarakat Sulawesi Utara, karena Evert Erenst Mangindaan atau biasa disebut E.E. Mangindaan adalah mantan Gubernur Sulawesi Utara di era tahun 1995 – 2000.

Terbayang dalam benak setiap orang yang mengenalnya, Mangindaan sosok yang sabar dan jarang sekali terlihat emosi. Bahkan saat memimpin rapat yang paling serius pun dengan perdebatan yang cukup panas, Mangindaan selalu dapat menetralsir suasana dengan tenang.

Berbicara masalah politik, Pria kelahiran Solo ini tentunya tidak asing lagi, karena sebagai seorang mantan Panglima Kodam sudah banyak mempelajari masalah politik negara, walaupun baru kulit-kulitnya saja.

Begitu diangkat menjadi Gubernur, disitulah mulai kelihatan karena Gubernur adalah pejabat publik yang dipilih oleh DPRD, berarti secara politis mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga bukan hanya kulit tetapi disinilah dia

terjun langsung ke politik. Jika sebelumnya baru kulit-kulitnya saja, di sini lebih dalam lagi mulai mengetahui isi-isinya.

Tentu saja Mangindaan selalu berhubungan dengan anggota DPRD Tingkat I maupun anggota DPRD Tingkat II. Sebagai seorang gubernur Mangindaan harus bersikap netral dan mengatur bagaimana politik harus sesuai dengan aturan.

Pada tahun 2002, tiba-tiba Mangindaan diajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu belum menjadi Presiden RI untuk bergabung dan membantu Partai yang baru saja didirikan yaitu Partai Demokrat.

Kebetulan latar belakang Mangindaan dengan Presiden SBY sama-sama dari Jawa Tengah. Mangindaan di partai tersebut diajak untuk menjadi Sekretaris Jenderal

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dari tahun 2003 – 2005.

Perjuangannya bersama teman-teman dari Partai Demokrat ternyata tidak sia-sia. Sebagai Partai baru di percaturan perpolitikan nasional di tahun 2004 mendapat perolehan suara yang cukup signifikan yaitu sebesar 7 (tujuh) persen.

Begitu Mangindaan terjun langsung ke dunia politik, maka mulailah dia untuk mempelajari secara serius masalah politik. Keseriusan itu juga dia wujudkan dengan berkuliah lagi di Universitas Terbuka, dan mengambil bidang yang ditekuninya sekarang yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Jakarta.

Selain di bangku universitas, Mangindaan banyak belajar masalah politik dari para pakar politik dan juga dari pengalamannya sebagai Sekjen Partai Demokrat. Mangindaan juga banyak belajar dari pengalamannya menjadi Ketua Komisi II DPR RI, yang berhubungan dengan politik pemerintahan tepatnya yang membidangi Departemen Dalam Negeri, Aparatur Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dan mitra kerja lainnya.

Pria yang pernah menjadi Penasehat Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia itu

menceritakan, ketertarikannya masuk pada Partai Demokrat atau yang lebih dikenal partainya pemerintah ini karena Partai Demokrat *platformnya* adalah partai nasional atau nasional religius.

Menurut Mangindaan, dia lebih tertarik masuk partai nasional karena sejalan dengan ideologi Pancasila yang tidak memfokuskan diri pada satu bidang saja, tapi fokusnya ke semua. Dalam arti, tidak melihat agama, tidak melihat suku dan

sebagainya.

Selain itu, setelah dipelajari secara seksama Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat isinya bagus dan punya jangkauan jauh sekali ke depan yaitu recovery reformasi dan rekonsiliasi.

Apalagi mengingat recovery kita masih terpuruk, jadi harus diangkat dan sesama anggota partai harus bersatu bahu membahu guna mencapai tujuan tersebut. Dicalonkannya SBY menjadi Presiden pada tahun 2004 juga suatu pilihan yang tepat karena Mangindaan tahu betul bahwa SBY itu pintar.

“Saya tahu siapa adik-adik kita yang bagus-bagus, dan salah satunya ya pak SBY itu dan kebetulan beliau yang terpilih jadi Presiden,” tutur Mangindaan.

Pada Pemilu Legislatif yang lalu, Mangindaan mencalonkan kembali menjadi calon legislatif periode 2009 – 2014 dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Dan perjuangannya untuk menyalurkan aspirasi



masyarakat Sulawesi Utara tersebut akhirnya membuahkan hasil. Terbukti masyarakat memilihnya kembali untuk duduk di kursi DPR pada periode mendatang.

Memang sekarang ini sorotan masyarakat terhadap citra DPR kurang begitu baik. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk maju lagi karena bagi Mangindaan itu adalah amanah rakyat dan pengabdian itu dapat dilakukan dimana-mana, dan bentuk pengabdian itu dia melakukannya di DPR ini.

Kebetulan juga sekarang ini dia punya pengalaman dan sudah punya bekal yang banyak, tinggal bagaimana melanjutkannya nanti. Kalau banyak orang mengatakan citra DPR buruk, rasanya pendapat tersebut kurang bijaksana. Karena buruknya citra DPR itu sebenarnya hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja.

Jadi ibarat peribahasa mengatakan "nila setitik rusaklah susu sebelanga" itulah yang terjadi sekarang. Padahal kalau kita benar-benar melihat masih banyak anggota DPR yang baik, dan potensial. Tentunya kita tidak dapat menyamakan perbuatan satu orang dengan prestasi yang telah dihasilkan dari anggota lainnya.

Mangindaan mengatakan, pada periode berikutnya dia ingin mengajak bersama-sama teman-teman di DPR menjaga dan menunjukkan bahwa sebagai wakil rakyat, maka perlu memperjuangkan aspirasi rakyat. Keberhasilan para wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat akan membuat kepercayaan rakyat akan kembali lagi. Apalagi kalau ditunjang dengan disiplin dan ahlak yang baik. "Kita semua harus ikut prihatin dengan menurunnya citra DPR, dan mari kita angkat kembali saya kira masih sanggup kita perbaiki," katanya bijak.

Sejalan Dengan Pemerintah

Masih banyak obsesi yang ingin dicapai pria yang dulunya mempunyai hobi sepak bola ini. Terutama yang ingin dia capai adalah bersama-sama anggota Partai Demokrat lainnya menjaga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan pembangunan yang pro kepada rakyat.

Sebagai anggota partai pemerintah, kita harus sejalan dengan pemerintah, sebaliknya kalau pemerintah ternyata ada kekurangan atau kesalahan kewajiban anggotalah untuk memberitahu, memperbaiki atau kita topang bagaimana sebaiknya dijalankan. Jangan kita



membiarkan begitu saja. Itulah gunanya kita mewakili rakyat Indonesia, harus mengawal pemerintah dengan sebaiknya, termasuk memperbaiki bila ada yang salah.

Apalagi jika sudah duduk di DPR yang terdiri dari berbagai macam partai, tentu banyak saran-saran dan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. "Jangan kita menganggap partai lain itu sebagai lawan, mereka itu adalah teman seperjuangan yang juga bisa menopang keberhasilan pemerintah," katanya.

Kadang partai-partai lain di DPR juga mempunyai prinsip-prinsip dan saran yang bagus sekali. Partai lain juga banyak ide bagus yang bisa diberikan kepada pemerintah, karena semua itu arahnya untuk rakyat.

Mangindaan juga punya obsesi, karena ini pemerintahan SBY yang terakhir, maka bagaimana mencari calon yang patut menggantikan SBY untuk maju lagi pada periode berikutnya.

Tentunya bersama-sama partai yang lain dia mengajak untuk mempersiapkan kader-kader yang terbaik agar pembangunan terus berkesinambungan, kepemimpinan nasional di negara kita tidak berhenti sampai di sini, bahkan bisa lebih baik dari pada yang lalu-lalu.

Sebagai anggota DPR tentunya telah banyak suka dan duka yang dilalui Mangindaan dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat. Namun hal itu dilaluinya dengan lapang dada. Baginya, suka dan duka itu lebih kepada dinamika politik yang terus berjalan di gedung parlemen.

Yang pasti sebagai representasi dari wakil rakyat dia bisa tetap mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan pengabdian itu tidak boleh berhenti selama hayat dikandung badan.

Kita harus dapat memberikan contoh kepada anak cucu kita, dan secara substansi kalau kita menjabat tidak ada pilihan lain kecuali kita terus memikirkan

bagaimana nasib rakyat, bagaimana memikirkan kemiskinan, pengangguran, dan bagaimana agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak.

Kebetulan di Komisi II yang membidangi pemerintahan, aparatur negara, kepresidenan, pertanahan, posisi di sini sangat politis sekali. Dan dia melihat kepentingan partai-partai sangat bervariasi, ada yang pro dan ada yang kontra. Pengalaman yang kurang enak tidak dikatakannya sebagai duka, tapi itulah perjuangan, dan perjuangan tidak kenal kata menyerah.

Begitu pun saat dia menjadi Gubernur, banyak sekali pro dan kontra. Tapi karena kita berpihak pada rakyat tidak usah ragu untuk tetap maju terus. Itulah prinsipnya untuk maju terus, tanpa pantang

menyerah. Tentunya jika seseorang mau mengabdikan mesti ada hambatan-hambatan yang dihadapi, dan halangan itu harus dapat dipecahkan dengan baik.

Hanya saja pengalamannya di Komisi II DPR, hambatan itu sangat dirasakan untuk kasus Pilkada, yang sebenarnya masalahnya ada dibawah. Dari masalah gugat menggugat jika seseorang terpilih dan ada yang tidak setuju.

Masalah sengketa Pilkada ini sering dilaporkan ke komisi II, padahal bolanya ada dibawah. Dalam hal ini Komisi II tidak boleh mengintervensi Pilkada, DPR hanya dapat memberikan dukungan politik bahwa keputusannya harus begini, keputusan sepenuhnya terserah pada KPU.

Sengketa Pilkada ini terjadi dimana-mana, dan hampir tiap bulan ada Pilkada. Namun Mangindaan menganggap semua itu adalah dinamika yang sangat memerlukan kehati-hatian, perlu kebijaksanaan di dalam mengambil sikap. Karena kalau salah mengambil sikap akan terjadi polemik, bahkan konflik di daerah. "Hal inilah yang kita takutkan," tuturnya.

Begitu juga menghadapi keinginan suatu daerah yang ingin dimekarkan. Pemekaran ini kalau tidak diikut, banyak yang datang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR. Padahal, tidak semudah itu suatu daerah dilakukan pemekaran. Harus dilakukan pemikiran yang mendalam bagaimana jika suatu daerah itu dimekarkan, akibatnya apa dan masih banyak hal lagi yang perlu dikaji lebih teliti.

Keluarga Demokratis

Mangindaan dibesarkan bukan dari keluarga politik. Orang tuanya baik ayah maupun ibunya adalah seorang guru yang mengabdikan ilmunya untuk anak-anak didiknya. Begitu juga dengan kakak dan adik-adiknya tidak ada satu orang pun yang tertarik menerjuni dunia perpolitikan dan juga tidak kenal militer.

Jika dia terjun ke militer dan perpolitikan nasional ini merupakan terobosan baru dalam keluarganya. Dia baru menyadari betul bahwa dia "lari

sendiri" berbeda dengan keluarganya yang menekuni bidang lain.

Setelah dia mempersunting Adelina M. Tumbuan, gadis yang dikenalnya di sebuah organisasi, dan dikaruniai tiga orang putra dan enam orang cucu. Putri sulungnya sekarang ini tinggal di Amerika bersama dua cucunya, dua cucu lainnya tinggal di Manado dan dua cucunya lagi tinggal di Jakarta.

Dalam keluarga, Mangindaan selalu membiasakan hidup dalam suasana demokrasi. " Saya punya prinsip di keluarga saya biasakan untuk demokrasi, anak-anak bebas memilih, silahkan pilih

"Saya tidak mau diganggu pada hari itu, kecuali satu saja ternyata menyangkut banyak orang, maka saya harus tinggalkan" tuturnya. Misalnya, waktu bertugas di militer kalau sudah tugas operasi apa boleh buat semua harus dijalankan.

Begitu pun ketika dia menjadi Gubernur dan Ketua Komisi II, harus dapat mengatur waktu sedemikian rupa. Bagaimanapun juga dia berpikir yang lain juga berkeluarga dan harus memberikan waktu untuk keluarga.

Kecuali pada saat-saat tertentu yang memang perlu diadakan rapat pada hari Sabtu dan Minggu, maka Mangindaan



Foto bersama keluarga. doc : kel.

kegiatan mana, sekolah mana, bahkan menikah pun silahkan pilih jodohnya masing-masing, karena merekalah yang lebih tahu pasangan yang cocok sebagai pendamping hidupnya," kata bapak dari tiga orang putra ini. Dan ternyata prinsipnya ini membuahkan hasil, karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun dari ke tiga putra putrinya yang punya masalah.

Sangat disadarinya betul menjadi anggota dewan bahkan menjadi Ketua Komisi II mempunyai waktu yang sedemikian padatnya. Namun lagi-lagi dia punya prinsip kalau hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari keluarga dan tidak bisa diganggu.

minta kesediaan anggota lainnya untuk meluangkan waktu sejenak meninggalkan keluarga.

Langkah ini diambil karena memecahkan satu masalah yang krusial yang bisa berakibat fatal bagi rakyat. Tapi yang jelas sepanjang tahun, dia lebih banyak memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu bersama keluarga tercinta.

Kebahagiaan Bersama Cucu

Dengan wajah berseri-seri yang memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga, Opa dari enam orang cucu ini menceritakan kebahagiaannya saat berkumpul dengan cucu-cucunya yang lucu-lucu.

Jika berkumpul dengan cucu, semua rasa lelah menghadapi padatnya jadwal

rapat dan segala kerumitan akan hilang begitu saja melihat celoteh-celoteh cucunya.

Mangindaan menyadari betul dia sangat memanjakan cucu-cucunya. Bahkan dia tidak berani melarang jika cucunya melakukan kesalahan. “Kalau saya melarang sedih betul rasanya jika kemudian sampai cucu saya mengatakan “Opa jahat,” ceritanya.

Padahal dengan berbuat begitu saya tahu betul kasihan anak dan menantu saya, dalam hal ini saya jadi tidak membina tapi terlalu memanjakannya. Saat memecah kaca saja saya mengatakan tidak apa-apa,

pulang hilanglah semua pikiran yang rumit tadi,” katanya menggambarkan kebahagiaan yang tak terhingga bersama cucunya.

Bahkan jika masa reses tiba, kerinduannya tak terbendung lagi ingin melihat dua cucunya yang berada di Amerika, maka “berlarilah” Mangindaan ke negeri paman Sam tersebut demi mengobati rasa kangennya. Begitulah Mangindaan mesti pandai-pandai membagi waktu demi cucu-cucunya.

Dalam berpolitik, Mangindaan selalu didukung penuh oleh sang isteri. Karena isterinya hobi berorganisasi, maka

tidak sulit baginya mendampingi sang suami menjadi seorang politikus. Karena senangnya berorganisasi, maka hampir organisasi apa saja diikuti, termasuk m e n y e n a n g i politik, sehingga kalau ada kegiatan politik, maka sering kali sang isteri menyumbangkan p e m i k i r a n - pemikirannya.

Ibarat pepatah mengatakan “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” itulah gambaran salah satu putra Mangindaan

yang juga menyenangkan terjun ke dunia politik. Putera bungsu Mangindaan ternyata mengikuti jejak sang ayah untuk terjun menjadi calon legislatif di tingkat provinsi.

Walaupun tahun ini belum lolos, tapi kesempatan itu masih sangat panjang karena usianya baru 26 tahun. Mangindaan menuturkan, biarlah dia banyak belajar masalah politik dulu, dan terjun langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu apa saja kegiatan yang telah dilakukannya untuk kepentingan rakyat.

Hobi Berolahraga

Sebagai seorang militer, fisik Mangindaan memang sudah terbiasa

untuk melakukan olah raga. “Olah raga apa saja pasti pernah saya lakukan, mau yang di meja seperti bridge, catur, bahkan sampai yang di lapangan,” kata Mangindaan.

Bahkan, katanya, sebelum masuk ke Akademi Militer di Magelang, dia pernah menjadi pemain sepak bola junior nasional di era tahun 1962. Namun karena masa depan olah raga saat itu kurang diperhatikan, maka masuklah ia ke Akademi Militer.

Di usianya yang sekarang, olahraga rutin tetap dilakukan demi menjaga staminanya. Namun bukan lagi olah raga berat yang dilakukan, melainkan golf dan tennis. Sudah menjadi jadwal rutin setiap hari Senin dan Jum’at melakukan olah raga tennis dan Sabtu Minggu bermain golf.

Sambil bermain golf, Mangindaan biasanya mengajak keluarga termasuk cucu-cucunya. Karena di area bermain golf tersedia fasilitas bermain anak-anak. Jadi, sambil menunggu Opa selesai berolah raga, maka sang cucupun dapat tetap bermain di lokasi itu.

Pemimpin Yang Bijak

Mangindaan termasuk pemimpin yang sabar, bahkan untuk marah saja rasanya sulit dilakukan. Dia termasuk pemimpin yang mampu mengendalikan emosinya dengan baik, dan mampu mengendalikan suasana rapat dalam suasana demokratis.

Kepemimpinan Mangindaan sudah terasah sejak ia masuk di akademi militer. Di sekolah calon Perwira ini memang diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian diteruskan ketika mengikuti Lemhanas juga diajarkan bagaimana memimpin yang baik itu.

“Bayangkan bertahun-tahun tiap sekolah diajarkan terus, sehingga saya terbiasa memimpin,” kata Mangindaan. Sebagai seorang pemimpin salah satu syaratnya dia tidak boleh otoriter. Selain itu, harus betul-betul bisa berkomunikasi sosial yang baik dengan rakyat. “Mungkin karena terbiasa itulah yang membentuk karakter saya untuk memimpin,” tuturnya.

Di ABRI, ada teori yang menyebutkan kalau mau jadi pemimpin ada 11 azas kepemimpinan yang harus dipatuhi. Diantaranya adalah, pertama, takwa,



KETUA KOMISI II DPR RI EE. MANGINDAAN MENANDATANGANI NASKAH RUU PELAYANAN PUBLIK DISAKSIKAN MENTERI NEGARA PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA TAUFIQ EFFENDI. (17/06);AGUNG SULISTIONO/PARLE

saya tidak berani melarang, apalagi jika kita sampai melarang akhirnya dia diam saja tidak mau bicara, wah sedih betul saya,” tambahnya.

Bahkan Mangindaan rela berbuat apa saja demi membahagiakan cucu-cucunya. “Ibaratnya kalau perlu saya ngutang kalau dia minta ini itu,” katanya.

Jika dulu kebahagiaan kita bersama anak-anak, sekarang ini sudah lebih beralih ke cucu-cucu. Di hari Sabtu dan Minggu biasanya Mangindaan mengajak cucunya jalan-jalan, entah ke mal atau pergi berenang.

Kadang di kolam renang, Mangindaan rela menceburkan diri ikut bersama cucu-cucunya di kolam yang dangkal tersebut. “Biar capek yang penting *happy*, saat

beriman, ke dua, *ing ngarso sung tulodo* yang artinya bisa menjadi tauladan, ke tiga, *ing madya mbangun karsa* artinya mengajak bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, *tut wuri handayani* yang artinya mengawal dari belakang, dan kita harus waspada artinya menjaga jangan sampai kita punya fungsi tidak berjalan dengan baik.

Selain itu sifat-sifat lain yang harus

partai dan sebagainya. Kita harus punya kemampuan-kemampuan manajemen itu.

Ke tiga, percaya pada diri sendiri, kepercayaan yang tinggi ini sangat diperlukan pada diri pemimpin. Percaya pada diri sendiri inilah perjuangan yang harus kita miliki dalam memimpin dan sebaiknya juga jangan sering mengeluh.

Ketiga fungsi ini harus dikuasai dan implementasi aplikasinya bagaimana itu harus dikuasai, jangan main-main karena ini adalah amanat sebenarnya dari konstitusi. Mangindaan juga berharap masalah kedisiplinan ini benar-benar dapat dipatuhi. Untuk itu perlu kiranya Tata Tertib DPR disusun kembali agar tidak terjadi polemik-polemik.

Dengan menegakkan disiplin sekaligus akan menaikkan citra dewan di mata masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap para wakil-wakilnya yang duduk di kursi parlemen.

“Saya yakin masih bisa diperbaiki, jika semua taat pada aturan-aturan yang ada. Sebagai wakil rakyat memang sudah seharusnya kita memberikan contoh yang baik dan jangan menunjukkan kemewahan, karena rakyat kita belum bisa melihat begitu,” kata Mangindaan mengakhiri perbincangannya dengan Parlementaria. (tt)



SAAT MEMIMPIN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE BOLAANG MONGONDOW SELATAN MANADO, SULAWESI UTARA. (16/07)/NITA JUWITA/PARLE

dimiliki kita harus sederhana, *legowo, bloko*. “Semua itu *leadership* yang saya pakai dan sudah sejak saya tentara selalu memakai filosofi itu,” kata Mangindaan yang fasih betul istilah kepemimpinan orang Jawa ini.

Seorang pemimpin juga harus mempunyai kemampuan *manage* dan punya *managerial* tinggi. Hal lain yang biasanya orang kurang memiliki adalah kepejuangan. Kepejuangan itu ada empat, pertama rela berkorban, kadang dalam keadaan sakit saya harus tetap hadir untuk memimpin rapat, ke dua, tidak kenal menyerah dalam arti sesusah-susahnya tugas-tugas di Komisi II saya tidak akan menyerah, saya tetap akan menyelesaikan tugas tersebut.

Sebenarnya, kata Mangindaan, hingar bingarnya perpolitikan itu sebagai ujungnya sangat kompromis. Kalau bicara politik tanpa power menurutnya itu *nothing*, power disini adalah manajemen, manajemen partaikah, manajemen lintas

Dengan menerapkan 11 asas kepemimpinan tersebut, Mangindaan bersyukur sudah hampir lima tahun menjadi Ketua Komisi II DPR, semua masalah dapat diselesaikan dengan lancar.

Di akhir bincang-bincangnya dengan Parlementaria, Mangindaan menaruh harapan besar pada anggota DPR terpilih hasil Pemilu Legislatif 2009. Yang terpenting dari anggota itu harus menguasai betul tugas dan fungsi anggota DPR yang terdiri dari tiga yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.



KETUA KOMISI II DPR RI EE. MANGINDAAN MENYERAHKAN DIM R UU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI MARDIYANTO WAKIL DARI PEMERINTAH DALAM RAPAT KERJA KOMISI II DENGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. (18/02)/EKA HINDRA/PARLE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Evert Erenst Mangindaan, S. IP**
2. Tempat dan tanggal lahir : Solo, 5 Januari 1944
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Status Perkawinan : Kawin
 - a. Nama Istri : Adelina M. Tumbuan
 - b. Jumlah Anak : 3 (tiga) orang
6. Alamat tempat tinggal : Jln. PPA Kav. 15/16, Rt. 005 Rw. 01 Bambu Apus, Cipayang Jakarta Timur.
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SMA B – Makassar
 - b. Akademi Militer Nasional – Magelang
 - c. SESKOAD – Bandung
 - d. SESKOGAB ABRI – Bandung
 - e. LEMHANNAS – Jakarta
 - f. Universitas Terbuka/ Fak. Ilmu Sosial dan Politik – Jakarta
8. Kursus/ Diklat yang pernah diikuti :
 - a. SUSJABTER TNI AD
 - b. SUSPATNAS (Kewaspadaan Nasional)
 - c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4-BP7)
 - d. SUSTAF TNI AD
9. Riwayat Organisasi :
 - a. Ketua Badan Timnas PSSI Jakarta (1983-1985)
 - b. Ketua Pengda PSSI Provinsi Irian Jaya (1992-1993)
 - c. Ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara (1995-2000)
 - d. Ketua Umum POR Maesa Pusat, Jakarta (1997-sekarang)
 - e. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Provinsi Sulut (2002-sekarang)
 - f. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jakarta (2003-2005)
 - g. Ketua Bidang POLHUKAM Dewan Pembina Partai Demokrat, Jakarta (2005-sekarang)
10. Riwayat Pekerjaan dan Alamat Pekerjaan :
 - a. DANTON s/d DAN YONIF KODAM I/ ISK/ ACEH (1965-1977)
 - b. DAN BRIGIF 12 KODAM III SILIWANGI/ JABAR (1985)
 - c. ASISTEN TERITORIAL. KODAM V BRAWIJAYA (1986-1987)
 - d. DANREM 084/ KODAM V BRAWIJAYA (1987-1988)
 - e. WAASOPS KASUM ABRI, JAKARTA (1988-1991)
 - f. PANGDAM VIII/ TRIKORA – MALIRJA / Anggota MPR-RI (1991-1993)
 - g. DAN SESKOAD/ TNI AD/ BANDUNG (1993-1995)
 - h. Gubernur Kdh Provinsi Sulawesi Utara / Anggota MPR-RI (1995-2000)
 - i. Penasehat Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (2000-2001)
 - j. Anggota DPR-RI/ Ketua Komisi II (2004 – sekarang)
11. Tanda Penghargaan :
 - a. SATYA LENCANA KARTIKA EKA PAKSI
 - b. SATYA LENCANA YUDHA DHARMA
 - c. BINTANG MAHA PUTRA PRATAMA
12. Riwayat Perjuangan :
 - a. OPERASI PENUMPASAN G 30 S PKI
 - b. OPERASI GPK ACEH
 - c. OPERASI PENUMPASAN GPK IRIAN JAYA



Komisi I DPR RI Tinjau Tiga PLB dan Resmikan Stasiun RRI Daerah Perbatasan

Sebanyak 12 Anggota Komisi I DPR RI didampingi 3 orang staf Sekretariat Jenderal DPR RI serta 6 Penghubung Departemen meninjau tiga Pos Lintas Batas (PLB) di Prop. Kalimantan Barat yang dimulai dari PLB di Aruk, Kabupaten Sambas.



GUBERNUR KALBAR CHRISTIANDY SANJAYA DIDAMPINGI BUPATI SAMBAS BURHANUDDIN ARASYID, DANDIM ENTIKONG DAN KAPOLRES SAMBAS MEMBERIKAN PENJELASAN MELALUI PETA DI PERBATASAN ENTIKONG KEPADA KETUA TIM KUNKER KOMISI I DPR RI THEO L. SAMBUAGA DAN ROMBONGAN. (15/07)/EKA HINDRA/PARLE

Kita hari ini, akan melakukan perjalanan melalui darat ke Aruk untuk melihat secara langsung kondisi Pos Lintas Batas di lapangan,” kata Ketua Tim Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, saat reses baru-baru ini.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat menyatakan kecewa, pasalnya hingga puluhan kali perwakilan dari Pemerintah Pusat datang ke Kalbar namun sampai sekarang persoalan perbatasan di Kalbar

tetap sama. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya.

Dalam kunjungannya Tim Komisi I DPR RI didampingi Bupati Sambas Burhanuddin Arasyid, pejabat Pemkab dan Muspida Sambas serta jajaran Kodam IV Tanjungpura.

Ia mengatakan, tujuan kunjungan kerja Komisi I DPR RI yaitu ke tiga PLB di Aruk Kabupaten Sambas, Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Jasa Kabupaten Sintang dan juga akan meresmikan stasiun RRI di perbatasan sekaligus meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong.

Karena itu, kata Theo, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga kawasan yang akan dijadikan PLB tersebut, untuk menyerap aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala peresmian.

”Padahal Indonesia sudah siap membuka tiga PLB itu, dari segi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya,” katanya.

Sebelumnya, Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Kalimantan Barat yang sekarang berubah menjadi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama telah mengajukan tiga Perpres kepada Pemerintah Pusat.

Tetapi hingga kini Perpres itu belum disahkan, yaitu Perpres mengenai Badan Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara, Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) dan RTR Kasaba (Kalimantan, Sarawak dan Sabah).

Anggota Komisi I DPR RI Sabam Sirait, menyarankan agar Pempprop. Kalbar mengalokasikan dana khusus untuk membiayai program pembangunan di perbatasan.

Menurutnya, dana tersebut bisa bersumber dari bagi hasil pusat dengan daerah yang persentasenya dirundingkan bersama.

”Mesti daerah menyiapkan anggaran khusus untuk perbatasan. Tak perlu menuntut otonomi khusus. Memang saya nilai, pemerintah pusat masih kurang perhatian terhadap perbatasan.”

Theo menambahkan, setelah melakukan kunjungan kerja tersebut pihaknya akan membawa permasalahan yang ditemukan dilapangan untuk dibahas pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009.

Peresmian Siaran LPP RRI Entikong

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI

Theo L. Sambuaga di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, meresmikan siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

"Bagi kami, ini merupakan terobosan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan memelihara persatuan serta citra nusantara di Wilayah perbatasan," kata Theo.

Theo juga mengatakan, salah satu fokus kehadiran Radio daerah Perbatasan itu ialah memberdayakan masyarakat di sekitarnya agar semakin maju sekaligus tangguh menjadi benteng nusantara maupun etalase republik dalam pergaulan antarbangsa.

"Mari kita semua rakyat di perbatasan terus memelihara persatuan dan kesatuan serta menghargai pluralitas sebagai salah satu citra bangsa sekaligus kekuatan menentang berbagai intervensi asing," tandasnya dalam acara siaran langsung oleh RRI.

Stasiun Produksi RRI Entikong di kawasan Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB) ini, menurutnya, dapat menjadi 'sabuk pengaman' informasi bagi penguatan kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Pami Hadi, yang ikut mendampingi Kunker Komisi I DPR, mengatakan dengan diresmikannya siaran RRI di daerah perbatasan, akan dapat memperkuat kedaulatan NKRI. "Meskipun kecil di mata, peresmian siaran RRI di perbatasan akan dapat memperkuat kedaulatan NKRI," ujar Pami Hadi.

Pami Hadi menambahkan, untuk kedepan RRI memiliki target akan melakukan siaran di sepanjang perbatasan Indonesia (Kalbar) – Malaysia Timur (Sarawak), dan di lima perbatasan, yaitu Pos Lintas Batas Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Entikong Kab. Sanggau), Badau (Kab. Kapuas Hulu), PLB Jasa (Kab. Sintang).

Ia mengatakan, dengan diresmikannya siaran radio perbatasan, merupakan bentuk kepedulian RRI untuk melayani dalam memberikan informasi, hiburan, pendidikan, kesehatan serta pelestarian budaya sebagai pemersatu bangsa.

"Dari sinilah akan terpancar informasi ke semua kawasan perbatasan dan seluruh Nusantara, bahkan keseluruh dunia," katanya.

Stasiun RRI Daerah Perbatasan ini dipancarkan melalui gelombang FM3 KW dengan radius siaran 40 Km.



Provinsi NTT

Sementara itu, Tim Kunker Komisi I ke Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai keamanan di Provinsi yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga ini harus terus ditingkatkan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau yang besar dan kecil, diantaranya Flores, Sumba, dan Timor Barat, serta pulau-pulau kecil lainnya.

Sebagai pulau yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Australia dan Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sangat rawan terhadap tindakan kejahatan internasional.

Untuk mengetahui secara langsung keamanan daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan kedua negara tetangga tersebut, Komisi I DPR dalam reses masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 mengadakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza (F-BPD) beranggotakan enam orang anggota yaitu, Djoko Subroto (F-PG), FX. Soekarno (F-PD), Imam Suhardjo (F-PPP), Chudlary Syafe'i Hadzami (F-PPP), Usamah Muhammad Al Hadar (F-PPP), dan Djoko Susilo (F-PAN).

Dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi I DPR Komandan Korem 161/Wirasaki, Kolonel Inf. Dody Usodo Hargo menjelaskan, permasalahan utama yang ada di Provinsi NTT adalah keadaan geografis NTT yang terdiri dari kepulauan sehingga

menyulitkan TNI dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Korem 161/WS membentuk beberapa Komando daerah Militer (Kodim) yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di NTT. Selain itu, pihak Korem 161/WS juga membangun pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran garis batas negara.

Namun, keadaan pos-pos penjagaan yang berada di pulau-pulau terluar kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu Dody meminta dukungan Komisi I DPR untuk perbaikan pos-pos penjagaan di pulau-pulau terluar. "Kami mohon dukungan Komisi I DPR untuk kiranya dapat membantu kebijakan dalam perbaikan sarana dan prasarana yang ada di pos-pos penjagaan yang ada di pulau terluar," pinta Dody.

Selain itu Dody menjelaskan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran garis batas negara, pihak TNI mengadakan operasi pengamanan perbatasan antara RI dan Timor Leste di sepanjang perbatasan darat yang bertujuan untuk mencegah penyelundupan dan pasar gelap, serta mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai basis perlawanan eks pejuang pro integrasi.

Operasi itu menurut Dody bertujuan agar tercipta stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Selain itu, agar terjamin utuhnya wilayah perbatasan dengan tidak terjadinya pergeseran atau hilangnya patok batas.

Dody menambahkan, operasi pengamanan wilayah perbatasan ditujukan agar terjaganya wilayah perbatasan dari pelintas batas ilegal dan penyelundupan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. "Banyak sekali didapati bahan-bahan kebutuhan pokok bersubsidi yang dijual ke wilayah Timor Leste oleh masyarakat Indonesia karena harganya lebih mahal di Timor Leste," jelas Dody.

Anggota Tim Kunker Komisi I DPR, Usamah Muhammad Al Hadar mengatakan, Komisi I DPR terus berusaha memberikan dukungan anggaran terutama untuk membangun pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau terluar. "Salah satu prioritas dari

Karena menurutnya, para prajurit TNI yang berdinasi di pulau-pulau terluar memiliki resiko tugas yang lebih besar daripada para prajurit TNI yang berdinasi di daratan.

LPP TVRI

Anggota Komisi I DPR Imam Suhardjo meminta seluruh staf LPP TVRI Kupang untuk meningkatkan kreatifitas dalam memproduksi siaran televisi. Hal tersebut dikatakan Imam saat bertemu dengan jajaran LPP TVRI, RRI, LKBN Antara, dan KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur di gedung LPP TVRI Kupang.

"Diperlukan kreatifitas yang tinggi untuk memproduksi siaran agar tidak memakan biaya yang besar, mengingat

tidak bisa diterima dengan jelas karena kondisi peralatan pemancar yang kurang baik, dan biaya pemeliharaan yang sangat terbatas.

Tetapi lanjut Jani, pada 18 Mei 2009 yang lalu siaran TVRI NTT sudah menjadi lebih baik pada semua arah. Peningkatan kualitas pemancar siaran dan penambahan jangkauan wilayah siaran TVRI ini karena mendapat peralatan baru bantuan dari Spanyol dengan kekuatan yang lebih besar.

Jani menambahkan, untuk melakukan penghematan biaya, pihak TVRI NTT telah melakukan perangkapan profesi, dan sekali perjalanan dilakukan produksi banyak paket acara.



KETUA TIM KUNKER KOMISI I DPR RI YUSRON IHZA MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA DAN YONIF 743/PSY KUPANG SEKALIGUS MENINJAU PERUMAHAN PRAJURIT. (15/07)/OLLY/PARLE

Markas Besar TNI adalah melaksanakan pengamanan daerah-daerah perbatasan, untuk itu kita mendukung segala upaya Mabes TNI," jelas Usamah.

Usamah menambahkan, selain membangun pos-pos penjagaan, TNI juga diminta untuk membangun perumahan dan membangun sarana komunikasi yang dapat menunjang kinerja para prajurit TNI yang berdinasi di pulau-pulau terluar. Hal tersebut menurut Usamah dimaksudkan agar para prajurit TNI yang berjaga di pulau-pulau terluar dapat merasa betah dan tidak bosan tinggal di pulau yang terpencil tersebut.

Sementara itu, Imam Suhardjo meminta pihak TNI juga memperhatikan kesejahteraan para prajurit TNI yang berdinasi di pulau-pulau terluar Indonesia.

anggaran TVRI Kupang sangat minim," ujar Imam.

Imam mengakui tidak mudah mengelola LPP TVRI dan RRI di NTT karena kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar. Imam juga menegaskan, diperlukan anggaran yang cukup besar untuk menunjang kinerja LPP TVRI dan RRI di NTT.

Sementara itu, Kepala Stasiun LPP TVRI Kupang, Jani Yosef mengatakan, TVRI NTT merupakan stasiun penyiaran yang wilayah operasionalnya mencakup wilayah propinsi NTT, yaitu 21 Kabupaten yang tersebar di pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor.

Jani juga mengakui, selama 15 tahun terakhir ini, siaran TVRI sebagian sangat

Jani juga meminta dukungan Komisi I DPR terkait upaya memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah terkait rencana penggunaan satelit, sehingga kondisi geografis yang sulit terjangkau siaran lokal dapat diperoleh jalan keluar.

Propinsi Sumatera Selatan

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan, Anggota Tim Kunker Komisi I DPR, DPR, Effendy Choirie (F-KB) mengatakan Indonesia adalah negara besar, tetapi belum tentu efektif di dunia internasional apabila rakyat kita miskin, tidak sehat, tidak menghormati HAM, tidak demokratis, tidak peduli lingkungan, tidak punya kekuatan pertahanan yang kuat dan efektif.

Hal tersebut dikatakan Effendy saat

pertemuan antara Tim Kunker Komisi I DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Sidharto Danusubroto (F-PDIP) dengan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Sochib, beserta jajarannya di Makodam II/Sriwijaya.

“Saya mengakui memang negara kita sangat besar, tapi sangat disayangkan masyarakat masih miskin, dan belum memiliki pertahanan yang kuat, sehingga kebesaran negara kita tidak efektif,” jelas Effendy.

Effendy menambahkan, pada intinya telah terjadi perubahan paradigma yang luar biasa dari berbagai system, yang tentunya mempengaruhi bagaimana seharusnya TNI kita menjalankan tugasnya menjaga pertahanan NKRI, mengingat Indonesia

Anggaran untuk pertahanan terbagi menjadi lima bagian yaitu, Departemen Pertahanan RI, Mabes TNI, dan tiga angkatan di tubuh TNI. Hal tersebut mengakibatkan TNI belum memiliki alat-alat pertahanan yang tergolong canggih.

Selain permasalahan alat-alat pertahanan, Gus Choi juga menyoroti masalah profesionalitas prajurit TNI. Menurutnya, untuk menciptakan prajurit TNI yang profesional, diperlukan anggaran yang besar terutama untuk pendidikan dan latihan para prajurit TNI mulai dari tingkat Tamtama, Bintara maupun Perwira.

“Merawat, mendidik dan menjadikan seorang Tamtama, Bintara dan Perwira itu mahal, dan untuk profesional itu memang harus dilengkapi dengan dana yang

beberapa waktu yang lalu dengan negara Malaysia.

Tjahyo mengingatkan kepada pihak TNI dan Polri agar koordinasi yang baik tersebut bukan hanya pada jajaran komandan saja, tetapi juga pada jajaran prajurit di lapangan.

Tjahyo menyayangkan masih adanya konflik diantara para prajurit TNI dan Polri di tingkat bawah yang terkadang memakan korban jiwa. “Harus terjalin koordinasi yang baik diantara dua institusi ini, bukan hanya di tingkat komandan, tetapi juga di tingkat bawah,” kata Tjahyo.

Selain masalah koordinasi, Tjahyo juga menyoroti permasalahan masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kodam II/Sriwijaya. “Kebutuhan personel TNI



TIM KUNKER KOMISI I DPR RI DIPIMPIN SIDHARTO DANUSUBROTO BERDIALOG DENGAN JAJARAN POLRI DI SUMBAR. (14/07)/DONNY/PARLE

negara kepulauan, bukan negara daratan.

Politisi yang biasa dipanggil Gus Choi ini juga mengatakan apakah struktur TNI khususnya TNI AD dari tingkat Pusat sampai tingkat Kodam dan Korem masih ideal dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini dan yang akan datang, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena menurutnya, peperangan bukan lagi mengandalkan gerilya darat melainkan perang udara atau perang laut dengan menggunakan senjata canggih.

Gus Choi menilai struktur TNI AD sekarang ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Hal ini berhubungan dan terkait dengan anggaran yang di berikan oleh Mabes TNI yang dinilainya sudah tidak jadi produktif dan tidak melahirkan apa-apa.

Effendy juga mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk TNI secara keseluruhan masih sangat kurang.

memadai,” kata Sidharto.

Komisi I DPR menurutnya terus berjuang agar anggaran TNI ke depan dapat ditambah sehingga TNI dapat memiliki alat-alat pertahanan yang canggih dan tidak tertinggal dari negara-negara tetangga. Selain itu diharapkan agar kedepan personel TNI mulai dari Tamtama, Bintara hingga Perwira dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Koordinasi antara Polri dan TNI

Sementara itu, Anggota Tim Kunker Komisi I DPR lainnya Tjahyo Kumolo meminta ada koordinasi yang baik antara TNI dan Polri di Sumatera Selatan. Menurut Tjahyo, koordinasi tersebut sangat diperlukan guna mengantisipasi adanya berbagai gangguan keamanan di Sumatera Selatan.

Menurutnya, gangguan yang datang tersebut bisa dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri seperti yang terjadi

sungguh memprihatinkan,” ujar Tjahyo.

Tjahyo mengakui anggaran yang dialokasikan untuk TNI masih jauh dari cukup. Karena itu dirinya berjanji untuk terus memperjuangkan kenaikan anggaran TNI di masa yang akan datang.

Tim Kunker Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 Anggota DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sidharto Danusubroto (F-PDIP), didampingi sejumlah anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Guntur Sasono (F-PD), Dion Hardy (F-PG), Marcus Silano (F-PD), Arief Mudatsir Mandan (F-PPP), Happy Bone Zulkarnaen (F-PG), Joeslin Nasution (F-PG), Hajriyanto Y. Thohari (F-PG), Antarini Malik (F-PG), Tjahyo Kumolo (F-PDIP), Suparlan (F-PDIP), R.K. Sembiring Meliala (F-PDIP), Dedi Djamaludin Malik (F-PAN), Effendy Choirie (F-KB), dan Mutammimul U’la (F-PKS). **(eka, olly, doni)**

Komisi II DPR Soroti Banyaknya Tenaga Honorer Yang Belum Diangkat PNS

Permasalahan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi sorotan Tim Komisi II DPR saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara.



TIM KUNGER KOMISI II DPR RI DIPIPIN E.E. MANGINDAAN BERDIALOG DALAM PERTEMUAN DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN. (16/07)/NITA JUWITA/PARLE

Saat melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulut yang diwakili Flora Krisen dan Asisten I Setdaprov Sulut Makagansa, Tim Kunker Komisi II DPR menemukan masih ada 119 tenaga honorer di lingkungan Pemda Sulut yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tim yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD), juga didampingi oleh anggota DPR lainnya yakni Ferry Mursyidan Baldan, Rustam Tamburaka, Ida Fauziah, Soewarno, Yasonna Laoly, Chozin Chumaidy, Djuhad Mahja, Anwar Yunus, Pieter Wona, Jazuli Juwaini, dan Jamaluddin Karim.

Selain ke Provinsi Sulawesi Utara, Komisi II juga menurunkan dua tim lainnya yaitu ke Provinsi

Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) dan Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin Wakil Ketua H. Eka Santosa (F-PDIP).

Dalam pertemuan tersebut, Mangindaan menegaskan agar 119 tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan untuk segera diangkat dan diakomodir pada penerimaan CPNS tahun 2009 melalui proses seleksi. "Jangan sampai pemerintah diskriminatif dan membiarkan status tenaga honorer daerah itu mengambang," tegas anggota dari Dapil Sulut ini.

Mangindaan yang juga pernah menjabat Gubernur Sulut di era orde baru menyebutkan, bahwa DPR tengah melakukan pembenahan tentang penerapan manajemen kepegawaian, termasuk pada pola dasar karir serta peningkatan

kinerja.

Selain itu, Mangindaan juga meminta semua Bupati dan Walikota untuk berhenti merubah data pegawai honor daerah, "Harus diingat, data honor daerah yang berhak diusulkan menjadi CPNS harus lima tahun keatas, jangan karena faktor keluarga, baru setahun menjadi honor langsung diusulkan," tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa data pegawai honor daerah yang paling berantakan dan kacau terjadi di Kabupaten/Kota, untuk itu ia mengharapkan agar data yang diusulkan ke pusat harus valid dan tidak berubah-ubah.

Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Kunker lainnya Ferry Mursyidan Baldan (F-PG) meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), untuk

menata kembali admisnistrasi terkait tenaga honorer hingga ke daerah.

“Jangan ciptakan masalah baru bagi tenaga honorer karena tidak adanya penataan administrasi yang baik,” kata Ferry.

Menurut Ferry, DPR sering menemukan banyak kasus terkait sejumlah tenaga honorer yang lama mengabdikan dan sudah masuk database namun tidak diangkat-angkat, sementara tenaga honorer baru langsung diangkat PNS.

Untuk itu, dia mengharapkan status tenaga honorer daerah yang sudah lama mengabdikan, untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui mekanisme seleksi.

Kesimpulannya, seluruh anggota Tim Kunker Komisi II mengharapkan pihak pemerintah daerah memiliki database yang jelas mengenai jumlah tenaga honorer di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setdaprov Sulut Makagansa menerangkan, khusus reformasi birokrasi telah diterapkan sesuai aturan, misalnya di BKD, dulunya jumlah PNS 106 orang sekarang tinggal 56 orang. Begitu juga dengan telah diberlakukannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi, “Khusus Tunjangan Kinerja Daerah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Flora Krisen selaku perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulut menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan yang diberikan anggota Tim Kunker Komisi II tersebut, dan lebih lanjut ia memaparkan, BKD Sulut menurut Flora tengah melakukan beberapa langkah kebijakan antara lain, pengurangan batas umur pensiun dari eselon II yakni yang dulunya 58 tahun, tetapi sekarang harus 56 tahun.

Hal tersebut ungkap Flora, dilakukan sesuai dengan peraturan Gubernur mengenai peningkatan kinerja yang dalam hal ini pembinaan karir guna mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

“Dikeempatan ini saya jelaskan, yang menjadi persoalan BKD Sulut, masih ada daerah kabupaten/kota, yang dalam hal pengangkatan eselon II tidak berkonsultasi dengan Gubernur terlebih dahulu,” papar Flora.

Padahal, tambahnya, perihal pengangkatan tersebut, harus mendapat persetujuan Gubernur dan sesuai dengan PP 32 tahun 2009 pasal 30 ayat 2.

Mengomentari hal tersebut

sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya merasa heran kenapa proses pengangkatan eselon II dan rolling jabatan tidak dikonsultasikan dengan gubernur, menurutnya di masa pemerintahannya dulu ketika dia menjabat Gubernur Sulut, permasalahan tersebut tidak pernah terjadi.

Pengadaan pegawai merupakan salah satu langkah strategis dalam manajemen sumber daya manusia, mengingat pegawai merupakan penentu keberhasilan organisasi saat ini maupun masa yang akan datang.

Pengadaan pegawai negeri sipil yang salah akan menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari dan pemborosan yang luar biasa. Demikian pula pengadaan pegawai yang mengarah pada jumlah dan kualitas yang tepat akan menjadi sumber daya terpenting bagi kemajuan organisasi pemerintah di masa yang akan datang.

Pegawai yang kompeten dalam arti mempunyai pengetahuan, keahlian atau keterampilan serta perilaku kerja yang baik, akan menghasilkan kinerja dan produktivitas kerja yang tinggi.

Dukung Sistem Pola Karir PNS

Masalah PNS juga menjadi sorotan Tim Komisi II yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI mendukung usulan Gubernur Bali untuk membuat suatu sistem perencanaan karir bagi jajaran pegawai negeri. Terhadap usulan tersebut, Komisi II menghargai dan akan menindaklanjuti usulan tersebut agar dapat segera terealisasi.

Dukungan ini diberikan Tim Komisi II DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN). Kunjungan kerja ke provinsi tersebut juga diikuti 15 anggota lainnya,



WAKIL KETUA KOMISI/KETUA TIM KUNKER KOMISI II DPR RI SAYUTI ASYATHRI TUKAR MENUKAR CINDERAMATA DENGAN GUBERNUR BALI MADE MANGKUPASTIKA SEUSAI PERTEMUAN DENGAN JAJARAN PEMDA BALI. (15/07)/SRI HASTUTI/PARLE

Mangindaan mengatakan perihal pengangkatan pejabat eselon II dan rolling jabatan di kabupaten/kota harus segera diselesaikan pasalnya pengangkatan tersebut tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pemprov yang dalam hal ini adalah gubernur.

“Jika ada pengangkatan eselon II di Kabupaten/Kota tidak di konsultasikan dengan gubernur, sekretaris propinsi harus memanggil sekda dan memberi pembinaan

yaitu dari F-PG, H. Sulaiman Effendi, Mustokoweni Murdi, H. Abdul Nurhaman, F-PDIP, Tumbu Saraswati, Sutjipto, Ganjar Pranowo, F-PPP, Lena Maryana, TGK. H. Muhammad Yus, F-PD. Ignatius Mulyono, Sugiyardi, F-PAN, Andi Yuliani Paris, H. Hermansyah Nazirun, Saifullah Ma'shum (F-KB), H. Mahfudz Siddiq (F-PKS) dan Ryaas Rasyid (F-BPD).

Anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ryaas Rasyid mengatakan, perencanaan sistem pola karir ini sangat diperlukan, mengingat dalam kurun waktu 64 tahun, negara kita masih belum punya satu pola karir. "Bagaimana kita akan mewujudkan good government, kalau sistem pola karir di pemerintahan tidak kita miliki," kata Ryaas.

Dia melihat di beberapa daerah, banyak pegawai didistorsi oleh pilkada. Begitu gubernur maupun bupati terpilih maka yang pertama diambil untuk duduk dalam pemerintahannya adalah dari tim suksesnya baik untuk ditempatkan sebagai kepala dinas atau asisten. Jadi, kata Ryaas, begitu gubernur dan bupati terpilih adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya tidak mendukung dalam pilkada.

Menurut Ryaas, hal ini sangat persepsif, seharusnya walaupun kita benci pada seseorang tapi jika orang itu mempunyai kompetensi, maka orang tersebut harus ditempatkan pada posisi yang benar, tidak menempatkan berdasarkan perasaan.

Ryaas menghimbau kepada gubernur, jika menunggu sistem pola karir yang direncanakan dari pusat, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sambil menunggu, sebaiknya Bali bisa mengambil prakarsa sebagai pelopor bagaimana menerapkan satu pola karir yang berbasis kompetensi.

"Perlu dibangun satu standart

minimum kompetensi, misalnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, harus ada standart kompetensi minimal," kata Ryaas.

Sehingga jangsan sampai terulang kembali kasus di beberapa daerah khususnya di Sulawesi Selatan dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh tamatan IAIN, hanya karena dia mempunyai hubungan dekat dengan bupati.

Hal ini, ujarnya, memang tidak dilarang oleh UU dan bupati mempunyai kewenangan menempatkan siapa saja hanya mengacu kepada pangkat.

Kalau Bali bisa memulai pola ini, bahkan mungkin nantinya model Bali bisa dipakai sebagai acuan untuk



pola karir secara nasional. Suatu sistem karir pegawai negeri yang berbasis kompetensi yang dimulai dengan penetapan standart-standart normatif tentang minimum politikasi dalam jabatan-jabatan strategis.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan, sejak awal telah mengusulkan adanya keputusan presiden yang memberikan panduan dalam implementasi sistem pola karir di daerah.

Selama ini, kata Made, pihaknya telah berusaha menerapkan prinsip "the right man on the right place" berdasarkan latar belakang pendidikan, pendidikan teknis fungsional, serta pengalaman jabatan.

Menurut Made, dia juga menerapkan tidak adanya perpanjangan usia pensiun. Jadi begitu usia mencapai 56 tahun, saat itu juga pegawai tersebut harus pensiun. Hal ini diterapkan untuk memberi kesempatan kepada pegawai lain yang berpotensi, namun belum mendapat kesempatan.

Untuk pembinaan karir, pihaknya memberikan kesempatan bagi PNS untuk menempuh pendidikan lanjutan serta pendidikan diklat. Pada tahun 2009, anggaran diklat mencapai Rp 530 juta, sedang beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 mencapai Rp 234 juta.

Kecewa Gubernur Sumbar Tak Hadir

Di Provinsi Sumatera Barat, Tim Kunker Komisi II DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Eka Santosa (F-PDIP) kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Sumbar saat tim mengunjungi Provinsi tersebut.

"Kita ingin meminta pertanggungjawaban Politik dari Gubernur Sumbar, yang utama kita mengharapkan pernyataan kebijakan Gubernur karena Asda I tidak dapat mengambil kebijakan atau keputusan," terang Eka saat menggelar Konferensi Pers usai rapat dengan KPUD Sumbar.

Menurut Eka, pejabat yang mewakili tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan terkait program Pemerintah Daerah, misalnya sinkronisasi UU No.32 tentang otonomi daerah dengan agraria. "Kita sangat perhatian terhadap Pemprov Sumbar, karena itu kita ingin melegitimasi kekhasan Sumatera Barat agar dapat dimasukkan di dalam UU nantinya,"katanya.

Dia menambahkan, penataan tanah yang terkait UU Agraria memang harus diletakan dalam bingkai UU yang merangkum

keanekaragaman di berbagai daerah. “Yang perlu dipikirkan adalah UU Otda dikaitkan dengan UU Agraria seperti masalah Ulayat,”terangnya.

Sebelumnya, Eka mengaku senang saat diundang Gubernur di kantor kerjanya, namun ternyata yang hadir bukan Gubernur tetapi hanya pejabat teras Pemda. “Sama seperti acara hari ini, harusnya yang hadir Panwaslu namun tidak hadir bahkan telat, ini artinya kita sesama lembaga harus saling menghormati, karena itu secara konstitusional kedudukan lembaga negara harus diletakkan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita sangat kagum terhadap Provinsi Sumbar yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta dan Agus Salim,”ungkapnya.

penerimaan tamu oleh Pemprov Sumbar. “Saya sebagai putra daerah malu dengan perlakuan seperti ini,”terangnya.

Menurutnya, dirinya tidak menemui lagi keramahan, peradaban di Sumbar. “Pemda ini perlu dengan dukungan anggota DPR, bahkan seluruh Indonesia datang ke Komisi II DPR menyampaikan aspirasinya namun tidak pernah terlihat Sumbar datang ke Senayan,”katanya.

Eka mengatakan, secara protokoler DPR bisa menolak

DPR dibundel dan dijilid serta disampaikan dengan baik kepada Pemda,”terangnya.

Menurut Eka, Komisi II DPR akan mengevaluasi dan membahas masalah ini di dalam internal Komisi II DPR. “Jangankan Gubernur, warga negara saja bisa dipanggil oleh DPR sebagai institusi negara,”jelasnya.

Terkait data kependudukan, Eka Santosa mengatakan, data kependudukan sebaiknya jangan terlalu di ekspand keluar negeri apalagi terkait pengembangan Sistem



KETUA TIM KUNKER/WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI EKA SANTOSA KECEWA SAAT BERDIALOG DENGAN PEMDA SUMBAR, KPU KABUPATEN/KOTA SUMBAR GUBERNUR BERHALANGAN HADIR TERKAIT MASALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA. (16/07)/SUGENG IRIANTO/PARLE

Sementara Zuhendri Chaniago (F-PBR) mengatakan, secara konstitusi DPR sangat kecewa dan sangat memalukan secara kelembagaan. “Sebelumnya jadwal sudah dikirim 2 minggu sebelumnya oleh sekretariat komisi ke Pemerintah daerah Sumbar,” katanya. Bahkan tadi telah disampaikan Gubernur menerima kita saat di kantor Gubernur, namun ternyata tidak hadir dan diwakili oleh Sekda dan jajarannya. “ini tidak biasa daerah dalam menerima tamu,”katanya.

Hal senada disampaikan Andi Wahab DT. Majokayo (F-PG), dirinya sangat malu terhadap

ketidakterdatangan Gubernur namun dirinya menganggap ada problem besar terkait pelestarian tradisional kekhasan Minangkabau. “Karena itu kita butuh respons dari pimpinan daerah,”katanya.

Dia menambahkan, hal ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa dan karena itu pemda harus ada prioritas terhadap berbagai persoalan. “Kita semua datang dengan perwakilan Sekab, Sekneg, artinya ini perjalanan resmi dan konstitusional,”katanya. Bahkan, papar Eka, Pemda tidak memberikan jawaban tertulis dan respon yang baik terhadap berbagai persoalan. “Ini pertanyaan

Induk Administrasi Kependudukan (SIAK). “Kita merencanakan target single identity number segera tuntas sehingga permasalahan seperti DPT Pemilu legislatif dan Pilpres tidak terulang kembali,”ujarnya.

Eka mengakui, dana yang dianggarkan dalam APBN untuk menyusun administrasi kependudukan memang masih terbatas. Namun, hal tersebut harus segera dioptimalisasikan guna menuntaskan penataan administrasi kependudukan. “Jangan sampai adanya campur tangan asing, kita ingin anggaran terkait kependudukan murni dari dalam negeri,”terangnya. (tt,nt,si)

Pembangunan Infrastruktur NTT Lambat, Perlu Rencana Menyeluruh

Komisi V DPR RI yang membidangi masalah Perumahan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dari 14 s.d 16 Juli 2009. Dari kunjungan diperoleh masukan bahwa kondisi pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur sangat lambat dan kurang terencana.



KETUA KOMISI/KETUA TIM KUNGER KOMISI V DPR RI AKHMAD MUQOWAM MENINJAU DERMAGA PELABUHAN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR. (14/07)/SURATNO/PARLE

Untuk itu Komisi V DPR RI memandang perlu untuk segera dibuat *grand design* pembangunan infrastruktur di NTT yang saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Diakui bahwa setelah Komisi V melakukan kunjungan ke NTT 2004, sudah ada perkembangan meski masih sedikit.

Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Ahmad Muqowam dengan anggota Yosep Umar Hadi, Josef A. Nae Soi, Soekotjo Said, Rahman Syagaff, Anwar Fatta, Aji Massaid, Djoko

Suwindi, Sabri Saiman, Hasyim Karim, Eddy Wahyudi, dan Achmad Chudori.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Aji Massaid, mengatakan tentang perlunya *grand design* infrastruktur transportasi di NTT untuk jalur-jalur logistik. Hubungan antar moda harus terintegrasi sehingga bisa menjangkau pulau-pulau terpencil” ungkap Massaid. Dengan konsep yang terpadu lanjut Aji Massaid, Trans NTT akan bisa dikembangkan. Selama ini menurut dia, NTT belum banyak perkembangan pembangunannya.

Hal senada diungkapkan Josef A.

Noe Soi (FPG) bahwa pembangunan infrastruktur di NTT perlu konsep yang terpadu antara rencana pembangunan kabupaten/kota yang dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Anggota dari daerah pemilihan NTT ini juga mengusulkan agar NTT segera membangun pusat-pusat pertumbuhan. “Tak mungkin semua daerah kita bangun secara serentak,” tandas Josef.

Sementara itu Anggota Komisi V Djoko Suwindi mengharapkan agar jalur utara Nusa Tenggara Timur segera diwujudkan. Jalur tersebut menurut Djoko Suwindi sangat dibutuhkan bagi pengembangan sektor pertanian dan sektor perkebunan, yang menjadi tulang punggung perekonomian NTT.

Dengan demikian, hasil pertanian dan perkebunan di daerah seperti Manggarai tidak akan sia-sia. Selain itu Joko Suwindi mengusulkan bagaimana seluruh moda transportasi di NTT baik darat, laut dan udara dapat disinergikan dengan baik.

Pada pertemuan tersebut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Eston Nuai mengatakan bahwa NTT merupakan daerah yang sangat rawan kekeringan, mengingat musim hujan hanya berlangsung empat bulan saja (Desember-Maret). Hal ini menyebabkan sebagian daerah sering mengalami paceklik, kekurangan pangan. Belum lagi banyaknya serangan hama timus dan belalang.

Lebih lanjut Eston menjelaskan bahwa saat ini NTT masih ada hampir 250 ribu pengungsi Timor Leste

yang tentunya perlu penanganan yang memadai baik dari penyediaan pemukiman, dan makanan." Ibaratnya NTT itu orang miskin menanggung orang susah" cetusnya.

Meyinggung infrastruktur, Wagub Eston, mengatakan NTT memiliki struktur tanah yang mudah bergeser terkena gempa mengingat NTT berada di daerah patahan. Sehingga untuk perawatan infrastuktur tersebut butuh dana yang besar.

Pulau Tidak Bernama

Masalah lain yang juga disoroti Komisi V adalah banyaknya pulau di NTT yang belum mempunyai nama. Untuk itu anggota Komisi V Djoko Suwindi meminta agar Pemerintah NTT segera memberi nama bagi pulau-pulau yang sampai saat ini belum diberi nama tersebut.

Menjawab pertanyaan Komisi V DPR, Wakil Gubernur NTT mengatakan bahwa konsep pembangunan NTT berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang disinkronkan dengan rencana pembangunan nasional. Dijelaskan bahwa di jalur utara NTT sudah ada kawasan potensial sebagai daerah pengembangan.

Menyinggung tentang banyaknya pulau-pulau yang belum mempunyai nama dijelaskan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan nama-nama pulau-pulau yang belum mempunyai nama. Wagub memberi contoh Pulau Tikus, Pulau Kera dll. Namun diakui bahwa belum semua pulau diberi nama.

Secara konsep rencana pembangunan terpadu sudah disiapkan pemerintah daerah akan tetapi banyak infrastuktur yang belum tersedia..

Masalah pembiayaan pembangunan infrastuktur di daerah adalah banyaknya jalan propinsi yang masuk menjadi jalan nasional. Selain itu juga tumbuhnya kebutuhan

perumahan bagi rakyat.

Saat mengunjungi Pelabuhan Tenau Kupang, Komisi V melihat bahwa tingkat pemanfaatan (utility) dari pelabuhan Tenau Kupang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari aktifitas kepelabuhanan di Tenau Kupang, sangat sepi. Kalau pelabuhan-pelabuhan lain kegiatan hilir mudik kapal menonjol namun di Pelabuhan Tenau Kupang hal itu tidak terlihat. Untuk itu Komisi V berharap agar infrastruktur Pelabuhan Tenau Kupang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi warga.

Sementara itu Ketua Komisi V Ahmad Muqom pada pertemuan dengan Administratur Pelabuhan

berharap agar pihak manajemen Pelabuhan Tenau Kupang dapat segera mengimplementasikan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Masalah Air di Kupang

Sementara itu saat melakukan kunjungan ke PDAM Kupang, Komisi V mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang mengusulkan perlunya dibangunnya jalan poros tengah yang diharapkan akan dapat membuka akses jalan 6 kecamatan di Kabupaten Kupang yang selama ini masih terisolir. Akses ke daerah tersebut selama ini , lanjut Bupati Kupang hanya bisa ditempuh melalui kendaraan roda dua.



TIM KUNKER KOMISI V DPR RI DALAM PENINJAUAN LANGSUNG MENEMUKAN MESIN PENYULINGAN AIR LAUT YANG TIDAK TERTANGANI DENGAN NILAI MILIARAN RUPIAH TERBENGKALAI (15/07)/ SURATNO/PARLE

Tenau Kupang mengatakan bahwa Tata Kepelabuhanan Nasional saat ini masih kurang terbangun dengan baik. Otonomi tidak dilaksanakan secara efektif.

Hal itu terlihat dari kurang lebih 4000 pelabuhan yang ada saat ini kurang tertangani secara efektif. Komisi V, lanjut Muqom sangat mendorong agar pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan ini dapat mendorong pelaksanaan fungsi pemerintahan dan bisnis. Dia juga

Akses jalan di jalur pantai utara sangat sulit untuk dikembangkan mengingat jalur tersebut harus melewati kurang lebih 100 jembatan besar dan kecil sehingga yang pasti akan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar. Jalur pantai utara lebih cocok untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan jalur laut.

Selain masalah akses jalan yang sangat bermasalah, Bupati Kupang Ayub Titu Eki juga mengemukakan

masalah kekurangan air yang setiap saat melanda Kupang. Bupati mengusulkan agar tiap-tiap desa bisa dibangun bendungan yang dapat menampung air pada musim penghujan hanya berkisar empat bulan setiap tahun. Selain itu perlu dikembangkan sumur-sumur bor yang dapat menghasilkan air minum bagi penduduk.

Masalah lain yang muncul, lanjut Titu Eki adalah masih banyaknya warga yang kehidupannya mengandalkan ladang berpindah. Bupati mendorong agar warganya mau hidup dengan mengolah ladang tetap sehingga akan memudahkan pembinaan untuk meningkatkan produksi pangan. Kondisi pertanian ladang berpindah inilah yang menyebabkan warga Kupang tetap miskin.

Kehilangan air tinggi

Sementara itu PLT Direktur Utama PDAM Kupang Masya Djonu mengatakan masalah pokok PDAM Kupang adalah Teknik pemipaaan yang masih kurang, ketersediaan air baku yang masih sedikit serta persoalan jaringan distribusi. Masalah lainnya, lanjut Masya Djonu adalah tingkat kehilangan air di Kupang masih sangat tinggi sekitar 41 persen.

Dijelaskan Dirut PDAM Kupang bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi tingkat kehilangan air ini akan diupayakan bisa ditekan menjadi 23 persen tahun 2012, serta membenahi jaringan distribusi.

Menanggapi penjelasan Dirut PDAM Kupang, anggota Komisi V Aji Massaid mengatakan bahwa PAM Kupang perlu secara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pemda dapat ikut melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab masalah kebutuhan air. Sehingga tingkat kehilangan air sedikit dapat teratasi.

Sementara itu Djoko Suwindi mengusulkan agar PDAM Kupang dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mencari

solusi kekeringan yang selalu melanda di Kupang. Sehingga bisa dicarikan solusi pemecahan kesulitan air bagi warga Kupang.

Masalah air juga disoroti Rahman Syagaff bahwa untuk mengurus air bersih di kabupaten/kota perlu memperhatikan Tata Ruang yang ada. Tidak semua harus ada di kabupaten/kota. Untuk itu perlu koordinasi untuk menghindari konflik kepentingan di daerah tersebut.

Ketua Komisi V Ahmad Muqom mengatakan bahwa DPR sangat peduli terhadap kebutuhan primer masyarakat yang berupa air. Komisi V berjanji akan membantu mencari solusi terhadap masalah pengelolaan air di Kupang, tetapi dia minta agar dilakukan terlebih dahulu peningkatan kinerja termasuk kelembagaan PDAM. Komisi V melihat bahwa masalah pengelolaan air di Kupang bukan pada status kewenangan tetapi lebih pada kelembagaan. "Untuk itu perlu diselesaikan terlebih dahulu kelembagaan yang ada" ujar Muqom. Selain itu perlunya perencanaan penyulingan air secara besar-besaran.

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut ditemukan juga adanya proyek dengan nilai miliaran rupiah terbengkelai begitu saja tanpa ada manfaatnya bagi masyarakat. Satu Proyek di Kecamatan Pura yang berupa Proyek Penyulingan Air Laut dengan nilai Rp. 3 milyar lebih yang dibangun tahun 2004 hanya dapat dimanfaatkan selama dua tahun, dan sejak awal tahun 2006 proyek penyulingan air laut tersebut terbengkelai, tidak lagi dioperasikan untuk penyulingan air laut.

Menurut Camat Pura, Nico karena masyarakat tidak lagi mampu untuk membiayai operasional alat penyulingan air laut yang berupa penyediaan solar 200 liter/hari. Sebelumnya masyarakat dikenakan pembiayaan untuk penyediaan solar untuk operasiasasi mesin penyulingan tersebut Rp. 25 ribu/KK namun saat ini masyarakat merasa keberatan dengan beban biaya tersebut.

Proyek kedua yang juga terbengkelai adalah proyek Rumah

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berada di dekat pantai Kupang. Proyek Rusunawa ini merupakan proyek Departemen Pekerjaan Umum dengan total nilai Rp. 9,6 miliar yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya. Namun pada tahun 2007 anggaran yang turun baru 20 persen. Sampai saat ini anggaran untuk proyek tersebut tidak turun lagi, sehingga proyek terhenti.

Berdasar pantauan *Parlementaria*, proyek Rusunawa tersebut baru selesai pada tahap pondasi dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara kebutuhan warga akan rumah susun tersebut sebenarnya sudah sangat mendesak.

Menanggapi temuan itu Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqom dan rombongan merasa kaget, karena selama ini tidak dilaporkan pemerintah. Masyarakat di Kecamatan Pura sebenarnya sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan minum. Sementara itu kondisi alam di daerah tersebut yang berbatu-batu sangat sulit ditemukan sumber air. Kalau ada sumurpun air yang ada rasanya payau.

Untuk itu Komisi V DPR mengharapkan kiranya Pemerintah Daerah Alor dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan solar 200 liter/hari agar mesin penyulingan tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan air minum warga.

Terhadap proyek Rusunawa yang juga terbengkelai, Ketua Komisi V DPR, Ahmad Muqom mengatakan bahwa sampai saat ini PU tidak pernah memberitahu tentang proyek Rusunawa di Kupang tersebut. Untuk itu masalah proyek Rusunawa di Kupang yang terbengkelai ini menjadi temuan dan akan dipertanyakan saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan umum. (**rat**)

Komisi VI DPR Sesalkan Ketidakhadiran Direksi BUMN Se-Kalteng

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto (F-PDIP) menyesalkan ketidakhadiran para Direksi BUMN se-Kalimantan Tengah. Pasalnya, kehadiran Direksi diperlukan untuk melihat kebijakan dan mengevaluasi serta memonitoring kinerja BUMN terkait.



KETUA KOMISI VI DPR RI/TIM KUNKER TOTOK DARYANTO MENYERAHKAN PLAKAT KEPADA PIMPINAN PT. JAMSOSTEK DAN PT. JASA RAHARJA CABANG JAMBI I. (09/08)/SURONO/PARLE

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN,” kata Ketua Tim Kunker Hasto Kristiyanto dalam pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Kalteng (PT. Telkom Tbk, PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Permina (Persero), PT. PLN (Persero), di Kantor PLN Kalteng, Selasa (11/8).

“Hal ini merupakan tugas konstitusi

dari parlemen dalam mengevaluasi kinerja BUMN,” tegasnya.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, lanjut Hasto, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tambah Hasto.

Menurutnya, peran BUMN sangat penting saat ini. Oleh karena itu, lanjutnya, ketidakhadiran para Direksi BUMN Kalteng akan menjadi nota protes Komisi VI DPR kepada Kementerian Negara BUMN. Karena kunjungan kerja Komisi

VI ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

Ketidakhadiran para Direksi BUMN Kalteng, kata Hasto, bukan persoalan penting atau tidak penting, tapi persoalan bagaimana kita memformulasikan suatu kebijakan yang sekaligus mengevaluasi bahkan memonitoring terhadap kunjungan kerja Komisi VI di lapangan.

Strategi Korporasi

Hasto menambahkan, BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian negara diharapkan dapat menjadi pemicu bagi perkembangan perekonomian nasional. “Kita tidak boleh tergantung kepada energi dari luar. Karena itu, PLN yang bergerak di sektor energi harus mempertaruhkan seluruh kemampuannya,” terangnya.

Dia menjelaskan, BUMN-BUMN strategis seperti Pertamina, PLN memiliki peran penting sebagai aspek kepentingan kedaulatan ekonomi. “Peran kedua BUMN tersebut sangat besar karena mempertaruhkan seluruh kemampuannya agar tidak tergantung kepada energi dari luar,” jelasnya.

Menurutnya, kita harus yakin bahwa Pertamina dan PLN secara politik akan mencoba mencari solusi dalam langkah-langkah penyelesaian demi peningkatan korporasi itu sendiri. “Karena kuatnya kepentingan seringkali memang apa yang terjadi dalam peta geopolitik itu juga berpengaruh di dalam strategi korporasi dari Pertamina,” terangnya. Hasto mengungkapkan, kasus yang terjadi di Exxon Blok Minyak Cepu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kompetisi perebutan energi dari negara-

negara besar.

“Dalam konteks strategi korporasi BUMN strategis secara khusus memang dikaruniai masuk di dalam bisnis lain yang memang sangat efektif seperti Telkom yang memang punya kepemimpinan secara korporasi sangat kuat,” katanya.

Dia mengharapkan, Jamsostek harus memiliki keberpihakan di dalam pengembangan di daerah-daerah tertinggal. Sehingga kalau memang belum memberikan konsiderans terhadap daerah-daerah tertinggal mungkin proporsionalnya adalah kepada pendekatan konsumen. Artinya alokasi dana-dana CSR lebih banyak dialokasikan di Pulau Jawa dengan mempertimbangkan asas skala prioritas. “Perlu ada terobosan-terobosan dari kebijakan korporasi sehingga daerah-daerah tertinggal menjadi skala prioritas di dalam alokasi dana-dana CSR, tidak hanya di Kalimantan Tengah tapi dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Dia mengharapkan, Telkom yang berada di wilayah Kalimantan Tengah dapat memberikan terobosan-terobosan dan menciptakan ruang komunikasi yang tidak terbatas dan memiliki makna dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. “Kami mengharapkan apa yang disampaikan tadi sebagai *roadmap* Kalimantan Tengah dapat sungguh-sungguh dilaksanakan sehingga minimum paling tidak dalam komunikasi itu kita bisa berharap Kalteng dua atau tiga tahun lagi kondisinya sudah lebih baik, sehingga pengembangannya dapat menjadi pelopor BUMN strategis tersebut,” katanya.

Sinergi BUMN

Hasto mengatakan, Komisi VI DPR mengusulkan adanya sinergi BUMN yang satu dengan yang lainnya, “pembangunan diciptakan dari bawah, sebagai aspirasi dari bawah sehingga dapat memajukan daerah tersebut sesuai dengan potensi daerahnya,” katanya.

Dia menambahkan, sebelumnya, Komisi VI DPR mendapat kritik dari Gubernur Kalteng mengenai pendekatan kebijakan anggaran yang tidak memperhatikan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki daerah. “Seperti Kalteng kalau kita lihat punya batubara. Karena itu kebijakan politik ekonominya lima-sepuluh tahun kedepan harus



mempertimbangkan dan melihat Kalteng sebagai energi supply yang memang cukup kuat, karena memang disini punya batubara,” terangnya.

Menurutnya, potensi batubara dapat meningkatkan produksi dan pengembangan industri alat berat sehingga dapat berkembang menjadi kluster industri yang memang didukung oleh kemampuan sumber daya alamnya. “Lebih-lebih itu juga ditopang oleh perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebaik-baiknya, sehingga sinergi BUMN itu penting,” tuturnya.

Perkembangan perekonomian, lanjut Hasto, tidak terlepas dari peran kapasitas energi khususnya listrik. “Tolak ukur peradaban yang awal itu diukur oleh adanya listrik. Sehingga kami mengharapkan kalau perlu kita bersama-sama berteriak dan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada Komisi VI apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan progress pengembangan pembangkit listrik tersebut,” ujarnya.

Pilar Roda Perekonomian

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Kunker Hasto Kristiyanto juga menjelaskan bahwa Komisi VI DPR yang membidangi BUMN selalu menekankan dari aspek politik ekonomi bagaimana mendorong BUMN untuk benar-benar mampu menjadi pilar pengembangan ekonomi nasional. “Sehingga campur tangan negara melalui BUMN benar-benar dapat mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, energi, infrastruktur dan

keuangan,” jelasnya.

Dengan demikian, tegasnya, kontribusi BUMN terhadap pengembangan di Provinsi Kalimantan Tengah, tentu saja dalam prospektif strategi korporasi. Dimana BUMN selain mengemban tugas untuk memberikan suatu keuntungan bagi negara, juga memiliki satu tugas untuk berkonsentrasi kepada *core business* yang ditekuninya dan mengembangkan melalui strategi-strategi korporasi suatu pengembangan usaha, kata Hasto seraya menambahkan yang diharapkan sejalan dengan visi dan misi dari pemerintah.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, secara politik dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi, karena memang pemerintah daerah mencanangkan bagaimana Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi daerah yang tidak hanya berswasembada pangan, tetapi juga mampu berdaulat di bidang pangan. “Sehingga nantinya menjadi sentral pengembangan industri-industri yang bergerak di bidang pangan,” ujarnya.

Regional base structure yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus terus-menerus diperkuat dan ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat diaplikasikan khususnya pada daerah-daerah lain yang ada di seluruh Kalimantan, harapnya.

Sebagai contoh potret adalah perkembangan PTPN XIII dan Pupuk Kaltim dimana kedepan harus diberikan semacam referensi supaya pembangunan ekonomi juga merata kepada BUMN lain. Referensi pembangunan ekonomi regional



TIM KUNKER KOMISI VI DPR RI YANG DIPIMPIN HASTO KRISTIYANTO MENINJAU LOKASI INDUSTRI ROTAN DI DESA HAMPENGAN KECAMATAN KATINGAN HILIR, KALTENG. (10/08)/ IWAN ARMANIAS/PARLE

yang demikian harus didasarkan pada *resources* yang dimiliki oleh tiap daerah, sehingga fokus kebijakan perusahaan tidak berorientasi pada korporasi semata tetapi pada kepentingan daerah, tuturnya.

Potensi Rotan Kalteng

Sebanyak 85 persen bahan baku rotan dunia dihasilkan Indonesia, terutama dari Kalimantan Tengah. Dengan asumsi potensi produksi rotan sebanyak 250 ribu ton hingga 400 ribu ton per tahun. Rotan merupakan salah satu hasil perkebunan andalan dari Kalimantan Tengah, rotan ini sering di ekspor ke China untuk dijadikan bahan baku furniture.

"Potensi Kalimantan Tengah sebagai sumber raw material rotan sangat besar sehingga pengembangan kluster sebagai industri rotan diharapkan dapat berkembang pada masa mendatang," kata Ketua Tim Kunker Hasto Kristiyanto saat meninjau ke lokasi Industri Rotan Desa Hampengan Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah, Senin, (10/8).

Menurut Hasto, Komisi VI bergerak di bidang sektor riil dan akan terus menerus berusaha meningkatkan produksi rakyat seperti produksi rotan. "Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas rakyat untuk berproduksi menjadi perhatian utama komisi VI," tambah Hasto.

Saat ini, terang Hasto, Komisi VI akan melakukan pembatasan-pembatasan

baik lagi," jelas Hasto.

Sementara anggota Tim Kunker Komisi VI Aria Bima (F-PDIP) mengatakan, saat ini sudah ada satu peningkatan bertahap, dimana bahan baku ini tidak hanya dikirim begitu saja tetapi sudah mulai dalam bentuk barang jadi. Seperti kursi, meja atau kerajinan-kerajinan lainnya. "Ini merupakan bagian dari program kerja Komisi VI dan Pemerintah Kabupaten Katingan, bagaimana caranya agar ada tehnik-tehnik yang lebih besar lagi," ujarnya. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan agar peningkatan masalah kualitas serta jumlah produksi rotan semakin hari semakin baik dan banyak.

Komisi VI akan selalu mensupport diadakannya pameran-pameran dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya, Kabupaten Katingan bisa mengikuti kegiatan ini sebagai suatu sarana promosi dan memasarkan barang-barang hasil kerajinan.

Terkait dengan peralatan produksi rotan, dirinya percaya Departemen Perindustrian tetap komit mengembangkan mesin-mesin yang bisa mempercepat proses

untuk ekspor bahan mentah dari rotan. "Hal ini akan menjadi suatu perjuangan dari Komisi VI," katanya.

Hasto menilai, produksi sumber bahan baku rotan dari Indonesia memiliki kekuatan daya tawar di dunia internasional. "Kita mengharapkan pengembangan industrinya lebih

produksi di sekitar Kabupaten Katingan, terangnya.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Katingan Surya meminta pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap industri rotan di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah dengan membuka pengembangan industri rotan dan jaringan untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkan. "Sehingga visi dan misi Kabupaten Katingan menjadi pusat industri dan perdagangan rotan di Indonesia bisa terwujud," jelasnya.

Direktur Umum Industri Rotan Kabupaten Katingan Sonny menambahkan, walaupun sumber bahan baku disini cukup melimpah tapi kita tidak



ingin selamanya menjadi sumber bahan baku. "Kita ingin membuat suatu ekspor barang jadi," tuturnya.

Sementara itu seorang pelaku usaha rotan Cirebon, Suhermanto, mengatakan mereka berencana membangun sentra industri furniture rotan di lokasi penghasil bahan baku rotan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kedepan, lanjut Suhermanto, sentra furniture rotan tidak lagi hanya ada di Cirebon tapi di luar Cirebon yaitu di Kalimantan Tengah.

Diambahkan, upaya itu dilakukan karena mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah kabupaten setempat bahkan mendapatkan kemudahan berbagai fasilitas.

"Bupati Kabupaten Katingan berkeinginan, Katingan harus menjadi sentra industri rotan di luar Jawa," terangnya. (Iwan)

Pemerintah Daerah Harus Perhatikan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Reses masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Bengkulu dan Lampung.



Tim juga melakukan peninjauan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan perempuan dan anak Rumah Sakit Bhayangkara Makasar, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Anak Pemulung dan Anak Jalanan "Bina Keluarga Sejahtera" jalan Pelita Utara No.9, Panti Sosial Asuhan Anak Rahmatullah Batua jalan TMP Komplek BBD No.116, dan Kube kerajinan keranjang rotan Kelurahan Penambu

TIM KUNGER KOMISI VIII DPR RI YANG DIPIMPIN CHAERUNISA DIDAMPING KEPALA RUMAH SAKIT POLRI D. AGUS M MENINJAU RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLRI SEKALIGUS BERDIALOG DENGAN PENGHUNI PANTI ASUHAN DI KUBE, MAKASAR. (22/07)/ AGUNG SULISTIENO/PARLE

Kunjungan kerja ditujukan untuk menyerap aspirasi secara langsung di daerah yang berkaitan dengan bidang kerjanya, yakni Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aspirasi yang didapatkan akan ditindaklanjuti untuk dibahas oleh Komisi VIII bersama Pemerintah.

Dalam Kunjungan tersebut, Komisi VIII juga didampingi oleh mitra kerjanya, diantaranya Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII di Propinsi Sulawesi Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Hilman Rosyad Syihab, yang beranggotakan Chairunnisa (F-PG), Mesir Suryadi (F-PG), Sjahrir Sjafruddin, Marwah Daud Ibrahim (F-PG), Gatot Luprijantomo, Widada Bujowiryono

(F-PDIP), Moch. Hasib Wahab (F-PDIP), I Nyoman Gunawan (F-PDIP), Edy Jauzie Muhsin Bafadal (F-PPP), Nurul Iman Mustopa (F-PD), Adji Farida Padmo (F-PD), Latifah Iskandar (F-PAN), Badriyah Fayumi (F-KB), Choirul Sholeh Rasyid, Ali Mudhorie (F-KB), Al-Yusni (F-PKS), Anwar Shaleh (F-BPD), Stefanus Amalo (F-PDS).

Dalam Kunjungan di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar, Kunjungan Kerja yang berlangsung sejak tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2009, Komisi VIII mengadakan pertemuan dengan Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Kanwil Depag, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala Polda Sulawesi Selatan.



kecamatan Tallo, Makasar.

Selanjutnya, Komisi VIII mengunjungi Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan guna melakukan peninjauan MTs Hasyim Asy'ari jalan Paros Tanatea Banyorang, dan Karang Taruna Surulangi. Kabupaten Maros juga mendapatkan perhatian dari Komisi VIII, guna meninjau MA DDI Cambalangi Desa Tumpabiring Kecamatan Bontoa.

Anggota DPR RI Mesir Suryadi mengatakan Pemerintah Daerah jangan memandang sebelah mata lembaga



IMAM SUPARDI, KETUA TIM KUNKER KOMISI VIII DPR RI BERDIALOG DENGAN JAJARAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG SEKALIGUS MENINJAU EMBARKASI HAJI. (04/08)/IQBAL/PARLE

pendidikan keagamaan. Menurutnya Pemda dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, Kamis (23/7), di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

Mesir Suryadi Politisi fraksi Partai Golongan Karya mengutarakan Surat Keputusan Bersama tiga menteri mengenai larangan pemda memberikan bantuan kepada instansi vertikal telah dicabut. "Pempenrintah Daerah jangan ragu memberikan bantuan kepada Pesantren, Madrasah, atau pendidikan keagamaan lainnya," kata anggota pemilihan Nusa Tenggara Barat itu.

Banyak tempat pendidikan keagamaan yang tidak tertangani dengan kondisi yang memprihatinkan. Mesir mengharapkan penyelenggara dapat mengajukan permohonan dengan mengajukan proposal yang menunjang. "Selain dapat dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga dapat mengandalkan APBD, agar dapat menunjang pendidikan keagamaan," katanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dia menjelaskan pendidikan keagamaan dapat didanai oleh APBN, APBD tingkat I ataupun APBD tingkat II.

Selanjutnya, dia mendesak agar penyelenggara pendidikan keagamaan selain melaksanakan program pemerintah pendidikan 9 tahun, juga harus

memperhatikan kualitas pendidikan.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan Bahri Mappiasse menjelaskan melakukan program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Program tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar, dan peningkatan metode pembelajaran dan kurikulum yang berbasis kompetensi.

Sebagai indikator keberhasilan program tersebut, pendidikan keagamaan di Sulawesi Selatan, telah telah

mencapai kelulusan para siswa pada tahun ajaran 2007-2008 mencapai 92,56% dari total peserta ujian nasional untuk madrasah (MI, MTs dan MA), serta tingginya minat belajar para guru untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam Kesempatan Komisi VIII Kunjungan Kerja ke Propinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bantuan dari Departemen Agama. Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok Kerja Guru Agama Budha Sulawesi Selatan, NGNP Sulawesi Selatan, Guru Honorer Sulawesi Selatan, Guru SNB, Pembina SNB, Madrasah Sanawiyah Hasim Ashari, Pure Mandira Taman Sari Kota Palopo Sulawesi Selatan, Bantuan Pembinaan Sekolah Minggu Dinmas Depag, Bantuan Pembinaan Sekolah Tinggi Dinmas Kristen Depag, Al-iklas Kabupaten Gowa, Pesantren Hasimhasari Kabupaten Bantaeng, Madrasah Aliah DDI Kabupaten Maros, Almubarak Kabupaten Gowa.

Hari Anak Nasional

Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli, Mesir Suryadi yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat. Selain itu dia menegaskan pentingnya penanganan anak-anak jalanan, anak peminta-minta, anak yang tidak berpendidikan.

Dia mengkhawatirkan penanganan terhadap anak terlantar. Menurut pantauan Mesir masih banyaknya anak jalannya

yang meminta-minta di jalanan ataupun mengamen di sudut jalan.

Mesir memberikan perhatiannya terhadap kejadian penanganan kasus perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi Tangerang. Dia mengatakan hal itu tidak seharusnya terjadi. Perlu adanya peran dari Departemen Agama, Departemen Sosial dalam memberikan motifasi kepada masyarakat. "Beasiswa anak miskin menjadi jawaban awal," tegasnya.

Selanjutnya dia mengutarakan terhadap perkataan yang telah disampaikan kepada Menteri Sosial bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak mampu menekel atau mengusahakan, menampung dan memelihara dengan APBD, tarik ke Pusat kembali.

Dia mengharapkan Pemerintah dapat menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. "Kita hargai mereka (anak terlantar), kita pelihara mereka, tidak hanya beri makan tetapi juga pendidikannya," tambah Mesir.

Selain itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Masnah Sari yang mendampingi Kunjungan Kerja Komisi VIII tersebut, meminta kepada Kanwil Departemen Agama selaku pihak pemerintah yang mempunyai kewajiban sebagai penyelenggara perlindungan anak, untuk memberikan ketentuan untuk tidak menikahkan atau tidak memberikan rekomendasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menikahkan anak dibawah umur.

Dtur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) kewajiban orang tua untuk tidak menikahkan anaknya pada usia dini. (as)

Lampung

Pada kunker Komisi VIII di Propinsi Lampung dipimpin Wakil Ketua komisi VIII H. Imam Supardi serta didampingi oleh 8 orang anggota komisi VII yaitu, H. Safriansyah (FPP), Sjaiful Rachman (FPP), H. Zaenuddin (FPD), H. Umung Anwar Sanusi (FPKS), Tiurlan B Hutagaol (FPDS), HJ Siti Soepami (FPDIP), dan HJ Kurniati (FPDIP).

Saat melakukan dialog dengan Departemen Agama Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi Lampung Syaroni meminta tim Kunker Komisi VIII DPR untuk memperluas

embarkasi haji guna meningkatkan kenyamanan untuk jemaah haji. "Kita menginginkan adanya pemekaran status pengelolaan haji di Lampung menjadi embarkasi dengan alasan jumlah calon jemaah haji yang terdaftar sudah melebihi kuota haji di Provinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Syaroni Masum di hadapan anggota Dewan.

Menurutnya, pemerintah pusat memberikan kuota sebesar 6000 orang calon jemaah haji sedangkan calon jemaah haji yang terdaftar di Kanwil Agama Lampung sudah 16.000 orang calon jemaah haji.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Imam Supardi mengatakan, hal ini akan segera di bahas dengan Departemen Agama sesuai kunjungan kerja ini. "Kita akan segera mengundang Menag untuk melaporkan hasil temuan kita di lapangan," paparnya.



TAUFIQLRAHMAN KETUA TIM KUNKER KOMISI VIII DPR RI BERTALOG DENGAN PARA TOKOH AGAMA SEKALIGUS MENINJAU TEMPAT PERIBADATAN (PURI). (22/07)/SUPARDI/PARLE

Dia menambahkan. Dirinya akan menyampaikan seluruh masukan kepada pemerintah pusat dan akan memperjuangkannya sampai akhir masa jabatannya yang tinggal 2 bulan ini.

Pada kunjungan ke Provinsi Lampung, tim Kunker Komisi VIII DPR menyerahkan sumbangan dari Departemen Agama dan Departemen Sosial secara simbolis kepada sejumlah madrasah, panti asuhan dan tempat-tempat ibadah seperti vihara bodhicitta di Kabupaten Pringsewu. "Kabupaten Pringsewu ini adalah Kabupaten yang baru saja dimekarkan, karena itu kita harus

memberikan dorongan dan bantuan kepada Kabupaten ini agar tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya" tandasnya

Bupati Pringsewu H.I Masdulhaq mengatakan, Kunjungan Komisi VIII DPR-RI sangat penting bagi Kabupaten Pringsewu khususnya di bidang sosial, agama, perlindungan anak, perempuan dan penanggulangan bencana alam, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung.

Pada akhir kunjungan tim kunker, rombongan Komisi VIII DPR-RI menyempatkan diri menghadiri acara penutupan festival Krakatau ke-19 dan Lampung expo ke 8 tahun 2009 di gedung Graha wangsana Bandar Lampung



terus meningkat setiap tahun. Karena itu diharapkan adanya penambahan kuota haji dan menetapkan porsi haji bagi masing-masing Kabupaten/Kota agar jemaah mendapatkan kepastian untuk berangkat.

Kepada Tim Komisi VIII DPR, Kakanwil Depag Bengkulu Taufiqurrahman menyatakan, sampai tanggal 16 Juli 2009 jumlah jemaah haji yang telah mendapatkan porsi berangkat sebanyak 4.675 orang. "Kita telah menyampaikan data jumlah penduduk agama Islam Propinsi Bengkulu ke Dirjen Penyelenggaraan Haji sesuai data yang ada sebanyak 1.834.719 untuk menentukan kuota haji tahun 1429 H," ujarnya.

Ditambahkan, pada tahun 2009 ini Propinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 1.614 jemaah. Dari data yang ada maka jemaah yang menunggu (*waiting list*) sebanyak 3.061 orang. Jumlah tersebut akan menjadi persoalan bagi calon jemaah yang bersangkutan mengingat tiga tahun ke depan, mereka penunggu tersebut baru dapat diselesaikan.

Dalam soal pelaksanaan UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, di Propinsi ini telah mulai disikapi oleh masyarakat umum. Ini terlihat sudah banyaknya kaum ibu-ibu yang mengadakan langsung ke polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga sudah melaksanakan sosialisasi langsung ke masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli perempuan. (as, iq, dw)

yang di undang oleh Gubernur Lampung Syahrudin Z.P, Acara tersebut juga dihadiri gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah.

Pada kesempatan tersebut, Syahrudin meminta Komisi VIII DPR-RI mendesak pemerintah agar memperhatikan serta membangun infrastruktur penting yang masih kurang di wilayah provinsi Lampung.

Penambahan kuota haji

Dari kunjungan kerja ke Propinsi Bengkulu, Tim Komisi VIII DPR menerima laporan bahwa minat masyarakat Bengkulu untuk menunaikan ibadah haji

KORBAN FLU BABI DI RSUP PADANG KARENA KELALAIAN PENCEGAHAN

Adanya satu orang korban meninggal karena suspect flu babi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Jamil Padang, bukannya kegagalan Dinas Depkes namun kelalaian yang ada pada pencegahan yang tidak jalan. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPRRI Hasanudin Said, Ak saat melakukan kunjungannya ke Provinsi Sumbar pada Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2008/2009 pertengahan Juli lalu.

Dijelaskan Hasanudin Said, adanya Suspect flu babi di Rumah sakit Padang, karena ketidak mampuan mendeteksi Suspect flu babi di Bandara Padang, untuk itu DPR RI akan mengusulkan dalam tahun yang akan datang bisa dianggarkan alat mendeteksi Suspect flu babi, di Bandara Padang.

Kepada Tim Komisi IX, Direktur umum, SDM dan Pendidikan RS Dr. M. Jamil Padang, Aguswan mengatakan, pasien Suspect flu burung/babi beberapa waktu lalu belum bisa dipastikan apakah pasien penderita Suspect flu babi, atau karena hal lainnya.

“Yang jelas kalau ada pasien yang mengalami demam tinggi dengan gejala klinis seperti gejala flu babi atau flu burung, akan diisolasi dan dirawat layaknya pasien yang positif terjangkit virus mematikan itu. Untuk kebenarannya akan diketahui dari hasil lab yang lebih akurat yang dikirim ke Jakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya Aguswan mengatakan, RS Dr.M.Jamil Padang sudah berumur 56 tahun, didirikan pada tahun 1953, tahun 1998-2003 mendapat bantuan dari Austria (Vamed) berupa alat-alat rumah sakit, dengan counter budget dari APBN untuk pembangunan gedung RS.

Diakui Aguswan, dari Sumbar saja ada 6000 s/d 8000 orang per tahun berobat ke RS Malaysia dan Singapura, yang menjadi tantangan bagi RSUP M.Jamil, Padang. Setelah diteliti sama saja fasilitas dan mutu RS



Malaka, Kualalumpur dan Singapura. RS M. Jamil kalah karena iklan dan cara memberikan pelayanan serta sikap dan perilaku profider perlu diperbaiki.

Minimnya Sarana Kesehatan RSUD Sawahlunto

Dalam kunjungannya ke RSUD Sawahlunto, terungkap masih minimnya sarana kesehatan termasuk lampu dan meja operasi. Dengan keterbatasan sarana pendukung itu, kegiatan operasi pasien yang seharusnya bisa diatasi RSUD, terpaksa dirujuk kerumah sakit yang lebih lengkap peralatannya.

“Sebagian besar peralatan di RSUD Sawahlunto peninggalan zaman Belanda” keluh Direktur RSUD Sawahlunto dr. Eviniola, saat pertemuan Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan

dan Ketenagakerjaan kunjungi kota Sawahlunto, Sumbar, dikediaman rumah Wakil Wali Kota Sawahlunto, Erizal Ridwan. Ia menjelaskan, untuk mengatasi kondisi tersebut perlu revitalisasi peralatan secara bertahap, diantaranya peralatan rontgen.

“Tahun 2007 RSUD mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat Rp2 miliar, namun sejak tahun 2008 dan 2009, bantuan tersebut tidak diterima lagi. Karena itu kami berharap Komisi IX DPR RI bisa mencarikan solusinya. APBD Sawahlunto dan dana alokasi khusus jelas tidak mampu memenuhinya” tutur Erizal Ridwan.

dr. Eviniola mengatakan, RSUD tipe C ini banyak dikunjungi pasien dari luar daerah seperti Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya sekitar 52 %. Tingkat kunjungan rata-rata 4.000 orang per hari.

Pengangguran bertambah

Selain masalah layanan kesehatan, Kota Sawahlunto juga terbelit persoalan pengangguran. Terutama setelah ditutupnya kuasa pertambangan batu bara menyusul peledakan tambang dalam Bukit Bual 16 Juni lalu.

“Dari jumlah penduduk Sawahlunto 55.430 orang, angkatan tenaga kerja sebanyak 36.806 orang. Diantaranya bekerja 13.748 orang dan pengangguran 1.156 orang” ungkap Kadis Pemberdayaan masyarakat/ Ketenagakerjaan Sawahlunto, Maryusfi.

Selanjutnya Maryusfi mengatakan persoalan mendasar ketenagakerjaan adalah rendahnya ketrampilan. Mereka lebih banyak mencari nafkah sebagai pekerja kasar.

Sementara itu Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku Utara menemukan fenomena menarik soal kondisi infrastruktur kesehatan di Ternate.

Dalam kunjungan pertamanya ke Provinsi Maluku Utara, Komisi IX DPR melakukan peninjauan ke RSUD Chasan Boesoeri Ternate. Saat melakukan peninjauan ke RSUD tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR sempat menyaksikan membludaknya pasien anak, sampai-sampai ada pasien yang menempati koridor di rumah sakit tersebut.

Hal tersebut mengundang pertanyaan anggota Komisi IX DPR. Kepala RSUD Chasan Boesoeri Dr. Idhar Sidi Umar menjelaskan, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin terkait jumlah pasien anak yang tidak bisa ditampung, hal ini terkait karena fasilitas ruangan yang kurang cukup memadai. Kebijakannya, mereka akan dialihkan ke rumah sakit lain yang terdekat. “Percuma saja kita tampung mereka di sini tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan,” tegas Idhar.

Idhar juga menambahkan, bahwa pihak Rumah Sakit memiliki mobil ambulance yang dipersiapkan untuk mengantar apabila tidak mampu menampung. “Kita punya mobil ambulance yang siap mengantar jika

RSUD tidak mampu menampung lagi,” jelas Idhar. Namun masyarakat lebih memilih yang terdekat dari tempat tinggalnya.

Perawat berstatus Honorer

Dalam kunjungan kerjanya ke RSUD Chasan Boesoeri tersebut, Tim Komisi IX DPR di dampingi Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ketua Tim Kerja Komisi IX Umar Wahid Hasjim (F-KB) mengharapkan agar pemerintah Provinsi mempercepat pengembangan infrastruktur rumah sakit tersebut.

Saat berada di ruang UGD (Unit Gawat Darurat). Kepala RSUD Chasan Boesoeri, Dr. Idhar Sidi Umar

melakukan penolakan terkait dengan pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Idhar menjelaskan bahwa kebanyakan pasien yang datang ke RSUD tanpa membawa kartu Jamkesmas dan surat-surat yang menyatakan bahwa pihaknya adalah keluarga yang kurang mampu. Bahkan menurut Idhar masyarakat masih tidak mengerti dan mengetahui prosedur yang telah diberikan. “Masyarakat kurang memahami prosedur, tetapi pihak RSUD tetap melayan,” jelasnya.

Anggota Tim Komisi IX DPR, Mariani Akib Baramuli (F-PG) menegaskan, terkait penanganan warga yang tidak mampu, agar jangan



dihujani berbagai pertanyaan dari beberapa anggota DPR RI, terkait dengan penanganan pasien, jumlah para perawat, dan juga daya tampung RSUD. Yang menarik, Tim Komisi IX DPR mengorek soal kesejahteraan para pekerja atau SDM yang ada. Idhar menjelaskan, sejauh ini masih 30-an tenaga perawat masih berstatus honorer dan gajinya sebesar Rp. 1 juta per bulan. Jelas Idhar.

Terkait dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Anggota Komisi IX DPR Kasmawati Tahir Z. Basalamah mempertanyakan apakah RSUD Chasan Boesoeri pernah

sekedar janji tetapi ditepati. “Nantinya saat warga tidak mampu datang masih lagi diwajibkan uang muka dulu baru dirawat,” ujar Mariani.

Namun, kepala rumah sakit Idhar Sidi Umar langsung mengomentari terkait dengan pernyataan tersebut. “Sementara ini sudah ditangani sesuai dengan prosedur dan bagi mereka yang tidak mampu tetap akan dirawat di kelas tiga,” tandas Idhar.

Sementara itu dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Komisi IX DPR menemukan dua pemegang kartu Jamkesmas justru di pungut biaya pengobatan. Kenyataan

tersebut di temukan langsung Anggota Tim Kunker Komisi IX DPR yang di pimpin Umar Wahid Hasjim yang didampingi oleh 17 orang Anggota Tim Kunker saat melakukan peninjauan ke rumah sakit RSUD Jailolo, Maluku Utara.

Dua pasien tersebut adalah Flora Toly dan Yustina yang sementara menjalani perawatan di ruang IRNA (Instalasi Rawat Inap) kelas III. Keduanya menjelaskan kepada Ketua Tim, bahwa dirinya mengaku telah mengeluarkan ratusan ribu rupiah. "Saya masuk rumah sakit sudah dua hari, sudah kurang lebih Rp. 300 – Rp. 400 uang yang saya keluarkan untuk membayar biaya masuk dan membayar obat. Rinciannya biaya perawatan Rp. 150 ribu dan beberapa kali untuk biaya obat". Jelas Flora.

Salah satu anggota Tim Kunker Komisi IX yang ditemui usai melakukan peninjauan M. Fansurullah Asa (F-PAN) mengatakan rumah sakit ini bisa dikenai sanksi, karena memungut biaya berobat dari warga pemegang kartu Jamkesmas.

Politisi PAN itu mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran melalui APBN setiap tahun ke seluruh rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia untuk membayar tagihan biaya perawatan kesehatan para pemegang kartu Jamkesmas yang tak lain warga miskin dan kurang mampu.

Atas kenyataan itu, Ketua Tim Kunker Komisi IX Umar Wahid Hasjim (F-KB) kemudian meminta direktur RSUD Jailolo Atty Tutupoho, agar memperbaiki manajemen pelayanan RSUD Jailolo, jika tidak kasus tersebut bisa menjadi temuan dan akan diproses lebih lanjut.

Dirut RSUD Jailolo Atty

Tutupoho yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa hanya obat yang masuk daftar Jamkesmas yang bebas biaya. Diluar daftar Jamkesmas, obat yang digunakan dikenakan biaya.

Pasien atas nama Flora Toly dikenakan biaya karena obat yang direkomendasikan dokter untuk mempercepat penyembuhannya diluar daftar obat Jamkesmas. Pasien itu juga saat masuk tidak menunjukkan kartu Jamkesmas. "Pasien tidak sempat menunjukkan kartu Jamkesmas yang dimilikinya sehingga dia diberlakukan pasien umum, tapi setelah dia menunjukkan kartu Jamkesmas seluruh biaya perawatan



yang sudah terlanjur dikeluarkan akan dikembalikan," tegas Atty.

Dokter Arthur Makapuan, yang merekomendasikan obat pada Flora Toly pemegang kartu Jamkesmas, mengatakan bahwa dirinya merekomendasikan buskupan (Buskupan adalah obat diluar daftar formularium, yang ditanggung dalam daftar Jamkesmas) untuk penyakit yang di idap Flora.

"Tindakan medis yang harus saya lakukan saat itu adalah bagaimana menyembuhkan rasa sakit pada perutnya, tanpa menimbulkan masalah atau kerumitan dikemudian hari saat menjalani rawat inap, maka saya memberi dia buskupan. Obat kolik yang masuk daftar Jamkesmas namanya papaverin".

Namun berdasarkan pengalaman, Arthur menambahkan bahwa buskupan lebih efektif. Obat tersebut harganya Rp. 22 ribu. "Otomatis obat buskupan harus dibayar, karena bukan obat yang masuk dalam daftar formularium," tambahnya.

Flora masuk RSUD Jailolo pukul 02.00 WIT dan tak sempat menunjukkan kartu Jamkesmas. "Maka kami berlakukan dia seperti pasien umum". Jelas Arthur.

Temuan Tim Kunker Komisi IX DPR menggugah perhatian Kadis Kesehatan Halmahera Barat Dr. Hizkia Hohakay. Bahwa pihaknya akan memanggil dua orang petugas

ferifikator obat yang ditugaskan Dinkes di RSUD Jailolo untuk dimintai penjelasan mengapa hingga pasien pemegang kartu Jamkesmas diminta membayar biaya perawatan dan obat-obatan. "Kami akan panggil petugas ferifikator, untuk menjelaskan obat-obat mana saja yang masuk dalam daftar formularium," ujarnya.

Temuan tersebut, juga ikut menjadi sorotan Ketua DPRD

Halmahera Barat, Beny Andhika Ama. Beny mengatakan DPRD sebenarnya telah mewanti-wanti Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar menyediakan dana terkait meski sudah ada pembiayaan dari APBN.

"Jangan kita mengejar PAD melalui orang sakit. Karena itu dewan dalam pembahasan anggaran meminta pemerintah untuk menyiapkan dana itu," tegasnya.

Direktur RSUD Jailolo, Atty Tutupoho membantah bahwa peserta Jamkesmas yang berobat di RSUD dipungut bayaran. "Saya tegaskan sekali lagi, RSUD Jailolo tidak pernah memungut pasien Jamkesmas," ia menambahkan (**ad, jay**)

Komisi X DPR RI Kaget Atas Ketidakjelasan Anggaran Pendidikan

Anggota Komisi X DPR Munawar Sholeh mengaku kaget atas ketidakjelasan Pemprov Lampung terhadap anggaran 20 persen untuk pendidikan, sebagaimana dilontarkan Sekretaris Bappeda Lampung, Edarwan.



Padahal Undang-undang yang kami buat tersebut sudah sangat jelas. Kalau seperti ini berarti sosialisasinya kurang mengena,” kata Munawar pada pertemuan Komisi X DPR dan Pemprov Lampung, di Bandarlampung, Bandarlampung, Senin (12/7).

Dai mengakui, persepsi antara Komisi XDPR dengan pemerintah berbeda terkait anggaran 20 persen dari APBN.

“Kami memandang anggaran untuk pendidikan belum mencukupi 20%, karena itu harus di luar gaji guru dan kedinasan,” kata dia dalam kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009 itu.

Namun, kata Munawar, Mahkamah Konstitusi telah “menyelamatkan” wajah pemerintah dengan memasukkan gaji guru dalam cakupan 20 persen tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Edarwan,

menanyakan kejelasan tentang persentase anggaran pendidikan tersebut yang diambil dari APBN atau APBD.

Ia meminta kejelasan apakah hanya pendidikan formal, namun pihaknya melihat pendidikan non-formal pun perlu mendapatkan suntikan dana tersebut.

“Kami memandang kegiatan pendidikan non-formal yang juga untuk meningkatkan taraf ekonomi dan modal kerja dimasukkan dalam program tersebut,” kata dia.

Edarwan memperinci, sebaran alokasi dana pendidikan tahun 2009 yakni untuk belanja tidak langsung pendidikan 6,6 persen, belanja langsung dinas pendidikan 51,9 persen, hibah pendidikan 5,4 persen, pos bantuan pendidikan 6,7 persen, dan belanja pendidikan pada SKPD diluar dinas pendidikan atau sebaran mencapai 29,4 persen.

“Untuk alokasi APBD sektor pendidikan masyarakat tersebar ke 28 SKPD,” katanya.

Sementara itu, anggaran untuk pendidikan tersebut yang dialokasikan dari APBD Lampung Rp312 miliar dari total Rp1,563 triliun atau mencapai 20,12 persen.

Banyak Perguruan Tinggi Tidak Mandiri

Wakil Ketua Komisi X DPR Didik J Rachbini mengatakan banyak lulusan perguruan tinggi tidak mandiri, sehingga sebagian hanya sebagai pencari kerja dan meningkatkan persentase pengangguran.

“Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja di level pendidikan tersebut,” kata Didiek usai bertemu dengan unsur perguruan tinggi di Lampung, di Universitas Lampung (Unila), saat kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008—2009, Bandarlampung, Selasa (13/7).

Ia menjelaskan, kualitas mental dan kemandirian sebagian besar lulusan dari perguruan tinggi masih kurang, sehingga setelah lulus hanya menadahkan tangan mencari kerja.

“Para lulusan itu bukan membuat terobosan-terobosan untuk kemandiriannya, tetapi hanya menanti dapat pekerjaan,” terang dia.

Didiek yang hadir bersama sejumlah anggota Komisi X lainnya, menjelaskan bangsa ini memiliki kemampuan kewirausahaan yang tergolong rendah di dunia.

“Untuk mengatasi itu semua adalah melalui pendidikan. Ini suatu tantangan bagi para pendidik,” katanya. Sebab, lanjutnya, dengan pendidikan dapat mengubah mental, karena itu perlunya kurikulum yang mengajarkan ke arah perubahan tersebut.

“Ini menjadi tantangan bagi dosen dan pengajar lainnya. Tidak hanya memberikan pendidikan teknis,” kata dia.

Didik juga menambahkan, dalam pembahasan undang-undang kepemudaan

dimasukkan tentang kewirausahaan dan kepemudaan.

Menurut Didik J. Rachbini, kepala rombongan Komisi X itu, kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan fungsi DPR dalam hal pengawasan legislasi dan penganggaran serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Sesuai jadwal DPR RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008–2009, kami dari Komisi X yang mengkhususkan bidang Depdiknas,

badan hukum pendidikan, sertifikasi dosen, persoalan riset, masalah kurangnya tenaga guru di Lampung, sekolah rintisan berstandar internasional, pemisahan antara pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi hingga persoalan terpinggirkannya posisi taman kanak-kanak (TK) dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unila Wan Abas Zakaria mengatakan sangat sepatat dengan rencana Dewan memisahkan kementerian pendidikan nasional untuk mengakomodasi

tapis baik di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi,” ungkapnya.(et)

DPR JANJI BERI INSENTIF PUSTAKAWAN

Terbatasnya sumber daya manusia tenaga pustakawan yang profesional di bidang perpustakaan menjadi perhatian khusus Komisi X saat melakukan pertemuan dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. DPR berjanji akan memberikan tunjangan profesi kepustakawanan.

“Dengan adanya tunjangan profesi pustakawan, diharapkan masyarakat semakin banyak yang ingin menjadi pustakawan,” ujar Ketua tim kunjungan kerja Komisi X DPR, Irwan Prayitno (F-PKS) dengan didampingi 13 anggota tim kunker, di Kalsel, kemarin.

Adapun anggota yang mengikuti kunker Komisi X DPR ke Kalsel yakni Murhana Wati Samsi (F-PG), Gusti Syamsumin (F-PG), Ebby Djauharie (F-PG), Buddy Asmara (F-PG), H.Soeratal (F-PDIP), Deddy Sutomo (F-PDIP), Hafidz Ma’some (F-PPP), Daromi Irdjas (F-PPP), Balkan Kaplale (F-PD), Jafar Nainggolan (F-PD), Ade Firdaus (F-PAN), Joko Santoso (F-PAN), dan Timotius Timbul Darsoatmodjo (F-BPD)

Menurut Irwan, jumlah pustakawan di seluruh Indonesia jumlahnya sangat sedikit dan sangat dirasakan kurang. Hal ini disebabkan sedikitnya motivasi masyarakat menjadi pustakawan dan kurangnya biaya tunjangan kesehatan.

“Ini akan menjadi suatu persoalan yang perlu dibahas termasuk anggaran buku, pemeliharaan dan sebagainya,” katanya.

Walaupun persoalan perpustakaan saat ini menjadi milik daerah tetapi menurut Ketua Komisi X DPR, tetap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perlu dianggarkan untuk melindungi keberadaan perpustakaan dan jumlah pustakawan yang semakin berkurang.

Sebelumnya Sekretaris Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusmiati Soekimo mengungkapkan permasalahan krusial adalah terbatasnya tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan (S1) Ilmu Perpustakaan termasuk tenaga terampil yang berlatar belakang (S1) teknologi informasi.



Depbudpar, Kemenagpora, dan Perpustakaan melaksanakan kunjungan untuk melakukan komunikasi yang intensif antara DPRRI khususnya Komisi X dengan pemda dan lembaga masyarakat di Provinsi Lampung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung,” kata dia.

Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, serta utusan dari perguruan tinggi swasta lainnya.

Didik memaparkan beberapa pokok bahasan yang harus ditanggapi oleh pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di antaranya mengenai persoalan

kepentingan perguruan tinggi dan riset dengan pendidikan dasar dan menengah. “Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan pendidikan tinggi serta memajukan dunia riset di perguruan tinggi,” kata dia.

Mengenai kepemudaan, Agustian staf pengajar muda dari Umitra meminta Dewan mengerahkan semangat generasi muda ke arah ekonomi kreatif yang kini marak di negara Asia.

“Dunia pendidikan kita harus memiliki konsep yang spesifik, misalkan kewirausahaan atau ekonomi kreatif dari tingkat dasar, menengah atas, hingga perguruan tinggi.

“Thailand, Singapura, Vietnam sekarang telah mengerahkan 20 persen anggarannya untuk dialokasikan kepada membangun ekonomi kreatif bagi generasi mudanya. Hal ini dapat diterapkan di Lampung, misalkan membangun sekolah dengan konsep ekonomi kreatif khusus

“Hal ini dirasakan ketika memasuki era teknologi informasi,” katanya.

Kemudian, masih banyak perpustakaan yang belum memiliki tenaga profesional di bidang perpustakaan terutama untuk perpustakaan/madrasah. Akibatnya banyak perpustakaan yang tidak dapat dikelola secara optimal.

“Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kebijakan nasional dalam pengangkatan tenaga profesional di bidang perpustakaan seperti halnya guru dan tenaga medis,” ujarnya.

Dalam hal anggaran sekolah, UU No.43/2007 disebutkan anggaran perpustakaan sekolah adalah 5 persen dari anggaran sekolah belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum

yang dipimpin Irwan Prayitno (F-PKS) di kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, kemarin.

Dirinya juga menyesalkan penilaian UAN yang hanya berfokus pada nilai mata pelajaran. Karena tidak sedikit para murid yang mendapatkan nilai memuaskan dengan grade 9 tetapi dengan hanya satu mata pelajaran tidak lulus maka murid tersebut sudah dianggap tidak lulus UAN.

Mantan Kepala Wilayah Prov Kalimantan Selatan, Kasim sepakat jika kewenangan UAN dilaksanakan secara desentralisasi. Ia pun tidak setuju jika pelaksanaan UAN sebagai penentu kelulusan. UAN harus dilaksanakan sebagai bentuk tes peningkatan mutu pendidikan.

itu. Semua keputusan fraksi mempunyai dalil yang sama-sama kuat,” katanya. Sedangkan Hafidz Ma’some (F-PPP) menilai UAN harus tetap dilaksanakan tetapi tidak sebagai ukuran penentuan lulus atau tidak. Pada kenyataannya, pemerintah bersikap terbalik dengan sikap UAN sebagai penentu kelulusan.

Permasalahan sekarang dengan diadakannya UAN adalah banyaknya murid yang tidak lulus UAN. Oleh sebab itu UAN perlu dilakukan evaluasi kembali apa tetap dilaksanakan atau tidak. Jika tetap dilaksanakan formatnya harus dirubah bukan sebagai penentu kelulusan.

Dengan umur DPR yang tinggal



DIALOG TOKOH MASYARAKAT, BUDAYAWAN DAN PIMPINAN PTN/PTS TERKAIT KURANGNYA TENAGA PROFESIONAL DIBIDANG PERPUSTAKAAN DENGAN TIM KUNGER KOMISI X DPR RI DIPIMPIN IRWAN PRAYITNO. (14/07)/DIAN ARIVANI/PARLE

ada kesamaan apresiasi terhadap pentingnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah oleh instansi lainnya yang seharusnya membina perpustakaan sekolah/madrasah tersebut.

Kewenangan UAN

Sejumlah praktisi pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan meminta kewenangan Ujian Akhir Nasional diberlakukan secara Desentralisasi. Selama ini UAN lebih dianggap sebagai penentu kelulusan tanpa adanya peningkatan mutu pendidikan dan peran serta daerah dalam memberikan nilai.

“Dengan desentralisasi maka ada kewenangan daerah dalam memberikan nilai pada ujian. Selama ini guru hanya diberi kewenangan mengajar, tetapi ketika ujian peran guru diabaikan,” ujar H. Mawardi selaku Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kalimantan Selatan saat bertemu Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

“Jika perlu UAN tidak ditujukan kepada murid tetapi kepada sekolah untuk menilai kemampuan dari para Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga terlatih lainnya untuk menentukan standar sekolah,” katanya.

Lebih lanjut Kasim meminta UAN dilakukan peninjauan kembali atau bahkan mengalihkan fungsi sebagai pengendali peningkatan mutu pendidikan nasional daripada UAN lebih dianggap sebagai suatu masalah.

Menanggapi pernyataan, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno (F-PKS) mengungkapkan sikap Komisi X terhadap UAN sampai saat ini tidak ada keputusan mutlak untuk mendukung ataupun menolak UAN secara tegas. Dalam komisi ada Fraksi yang mendukung, menolak, dan ada yang berada di tengah-tengah.

“Konsekuensinya Komisi X sulit untuk memutuskan dengan posisi seperti

2 bulan, pihaknya akan tetap membuat catatan pekerjaan rumah bagi anggota Komisi X DPR mendatang. UAN harus dikembalikan sesuai dengan Undang-undang sebagai pemetaan.

“UAN tidak mendidik tetapi membuat peserta didik dan pendidik untuk menjadi tidak sportif,” ungkapnya. Contoh nyata, pendidik ketika ujian berlangsung banyak yang mengajar. Atau murid yang tidak siap melaksanakan UAN tetapi murid tersebut masih lulus.

Hafidz dapat memahami jika guru daerah mengeluh ketika dirinya telah bekerja sekian puluh tahun namun hasilnya tidak ada. Hal ini harus diperhatikan pemerintah dengan evaluasi diri.

“Siapa pun yang menjadi menteri pendidikan maka UAN harus di evaluasi”.
(da)

KESEDERHANAAN WARNAI HUT MPR-DPR-RI KE-64

Peringatan Hari Ulang Tahun MPR-DPR-RI ke 64 yang berlangsung Jumat 28 Agustus 2009 berbeda dengan suasana ulang tahun sebelumnya. Kesederhanaan mewarnai peringatan hari ulang tahun kali yang hanya diisi Pidato Ketua DPR yang menguraikan perjalanan sejarah DPR sejak dilantik 1 Oktober 2004 hingga di ujung pengabdian yang akan berakhir 30 September.

Peringatan HUT kali ini begitu sederhana, tidak ada tumpeng, tidak ada karaoke atau menyanyi bersama maupun Pagelaran Wayang Kulit. Suasana ini bisa jadi karena bersamaan waktunya dengan bulan Ramadhan terlebih ulang tahun ini merupakan peringatan terakhir bagi anggota DPR periode 2004-2009. Bagi yang terpilih lagi masih cukup bersemangat, tetapi bagi yang akan meninggalkan gedung wakil rakyat Senayan sudah bersiap untuk mengisi kegiatannya di luar gedung DPR.

juga terasa lebih istimewa karena dihadiri sejumlah tamu dari Kamboja. "Sidang Paripurna HUT MPR/DPR hari ini dihadiri oleh Delegasi Sekretariat Jenderal Senat dan Sekretariat Jenderal National Assembly Parlemen Kamboja," ujar Agung.

Kedatangan tamu tersebut dalam rangka *study mission* yang dipimpin Mr. Oum Sarith, Sekretaris Jenderal Senat dan Mr. Leng Peng Long, Sekretaris Jenderal Assembly Parlemen Kamboja.

Dalam sambutannya, Ketua DPR mengajak seluruh

2004-2009 sesungguhnya merupakan implementasi lebih lanjut dari cita-cita reformasi yang muncul tahun 1998. Dalam rangka mengemban amanat rakyat dan tuntutan reformasi tersebut, Agung menjelaskan bahwa DPR bertekad merintis reformasi parlemen yaitu upaya menyempurnakan mekanisme, system dan prosedur kerja DPR RI.

"UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru disetujui DPR akan menjadi landasan bagi terwujudnya *parliamentary reform*," katanya seraya berharap DPR hasil Pemilu 2009 dapat melanjutkan apa yang telah dirintis DPR 2004-2009.

Lebih jauh, Ketua DPR menjelaskan bahwa pada periode pasca reformasi yang dilalui melalui amandemen UUD 1945 telah memberikan kepada Dewan posisi yang sangat kuat didalam menjalankan fungsi-fungsinya.

"Amandemen ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, juga mengatur adanya lembaga-lembaga negara yang baru dalam system kenegaraan dengan pengaturan fungsi dan kewenangannya masing-masing," jelas Ketua DPR RI Agung dengan



"Sidang Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR kali ini merupakan yang terakhir kita lakukan, karena masa bakti DPR RI masa keanggotaan 2004-2009 akan berakhir pada tanggal 30 September mendatang," kata Ketua DPR Agung Laksono.

Perayaan hari jadi Dewan tahun ini



Anggota Dewan untuk melakukan refleksi perjalanan dan dinamika DPR

khususnya pada lima tahun terakhir. "Melibatkan diri kita sebagai Anggota Dewan dalam gerak langkah dalam menyerap, memenuhi dan menyalurkan aspirasi rakyat," kata Agung.

Implementasi reformasi

Ia menilai dinamika DPR RI

menambahkan, DPR periode 2004-2009 telah meletakkan dasar yang baik dan berharap dapat diteruskan oleh DPR periode 2009-2014. "Jika periode 2004-2009 saya sebut periode transisi peletakan dasar berdemokrasi dalam parlemen, maka periode 2009-2014 merupakan periode pemantapan," tegasnya.

Tugas DPR pada periode pemantapan adalah tidak hanya menata dan membangun kembali demokrasi, tetapi harus mengarahkan pelaksanaan

tugas konstitusionalnya pada perwujudan stabilitas nasional yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat pondasi perekonomian nasional yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketua DPR Agung Laksono kembali mengingatkan akan pentingnya peneguhan komitmen segenap anggota Dewan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat untuk memulihkan kepercayaan rakyat yang dinilai Ketua DPR mulai pesimis dengan kinerja DPR.

Peneguhan komitmen Dewan ini dilakukan melalui proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang terpancar dari hati nurani melalui mata hati yang direfleksikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku dalam mengemban amanat rakyat.

membuat **gerah**.

N a m u n menurut Ketua DPR, itulah ciri khas yang menjadi tugas pers sebagai salah satu pilar demokrasi. “Tanpa kritikan, DPR tidak akan maju. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, untuk dapat membangun DPR sebagaimana yang dikehendaki rakyat,” tandasnya.

Kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR, Ketua DPR juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan peranannya

dalam memberikan dukungan kepada Dewan. Dia berharap, ke depan Setjen akan lebih professional dalam melaksanakan tugas bagi DPR periode 2009-2014 yang akan segera bekerja tanggal 1 Oktober 2009.

Secara khusus, Agung Laksono juga menyampaikan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “Atas nama Dewan dan pribadi menyampaik

permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan DPR dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya,” ia menambahkan.

Di bidang legislasi, Ketua DPR memperkirakan hingga akhir masa tugas 30 September 2009 Dewan akan menuntaskan lebih 175 RUU untuk disahkan menjadi UU, dari target Prolegnas sebanyak 284 RUU. Dari UU tersebut yang cukup fenomenal adalah UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU Pelayanan Publik dan UU tentang Kewarganegaraan serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

UU ini mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam penegakan



dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

SECOND TRACK DIPLOMACY

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan diplomasi parlemen sebagai *second track diplomacy* yang sangat intensif dilakukan sepanjang tahun 2004-2009. “Cukup banyak anggota DPR yang berkiper dan juga berperan di dalam upaya peningkatan hubungan bilateral kesemuanya itu ditujukan bagi perjuangan kepentingan Indonesia di tataran percaturan internasional,” kata Agung.

Menurut Agung, langkah dewan ini sejalan dengan pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia. DPR merupakan anggota aktif Inter Parliamentary Union yang beranggotakan 153 parlemen sedunia. “DPR juga menggas dan mengawal organisasi parlemen regional yaitu ASEAN Inter Parliamentary Organization (AIPO) yang ditransformasi menjadi Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

“DPR sangat berperan didalam APA yang didirikan pada tahun 2006 dan sekarang ini Ketua DPR menjabat sebagai Presiden APA untuk kurun waktu dua tahun. Ketua DPR juga menjabat sebagai Presiden Forum of Asia Pasific Parliamentarians for education (FASPPED). (mp, bs, si)

Tanpa kritik, DPR tak maju

Ada hal yang menarik dari Pidato Ketua HUT ke-64 MPR/DPR-RI di depan Sidang Paripurna, merupakan pidato terakhir bagi DPR periode 2004-2009 juga sebagai salam perpisahan karena para anggota Dewan akan lengser dari Senayan.

Salah satu hal yang menarik adalah ucapan terima kasih Ketua DPR kepada pers yang selama ini telah meliput dan menyebarkan berita-berita DPR kepada publik. “ Atas nama Pimpinan dan anggota Dewan kami sampaikan terima kasih kepada insane pers yang telah membantu mensosialisasikan lembaga DPR, mendorong dan bahkan mengkritisi lembaga DPR yang seringkali



Sayonara DPR...

Vokalis DPR Yang Lengser Dari Senayan

Pemilu Legislatif yang dilaksanakan 9 April 2009 telah berlalu, hasil perolehan suara mencatat tiga partai besar menduduki urutan teratas yaitu Partai Demokrat menduduki urutan pertama, Partai Golongan Karya urutan ke dua dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menduduki urutan ke tiga.

Banyak tokoh di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 yang tergusur dalam pemilu legislatif kali ini. Padahal, anggota-anggota yang tidak terpilih itu banyak kalangan yang menilai adalah anggota-anggota yang potensial dan memiliki kemampuan mumpuni, selalu kritis dalam rapat-rapat.

Tokoh DPR dari Partai Amanat Nasional yang tidak terpilih lagi antara lain, Abdillah Toha (Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen), Sayuti Asyathri (Wakil Ketua Komisi II), Andi Yuliani Paris (mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu), ekonom Didik J. Rachbini (Wakil Ketua Komisi X) dan Alvien Lie (anggota Komisi VII).

Sementara tokoh dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang tidak terpilih lagi antara lain Abdullah Azwar Anas (anggota Komisi VIII), Saifullah Mashum (mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan anggota Komisi II), tokoh perempuan Nursyahbani Katjasungkana (Komisi III), Badriah Fayumi (Komisi VIII) dan Masduki Baidlowi (Wakil Ketua F-KB).

Adapun di Fraksi Partai Golkar, anggota yang tidak terpilih diantaranya adalah Happy Bone Zulkarnain (Komisi I), Rustam Tamburaka (Komisi II). Sedangkan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera antara lain Rama Pratama (Komisi XI) dan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diantaranya Lena Maryana (anggota Komisi II).

Selain anggota yang mencalonkan lagi tetapi tidak terpilih, ada beberapa anggota DPR potensial lainnya yang memang tidak mencalonkan lagi. Seperti, Drajad Wibowo (F-PAN), Yuddy Chrisnandi (F-PG), Bomer Pasaribu (F-PG), Chozin Chumaidy (F-PPP) dan masih banyak sederet nama lainnya yang partainya tidak memenuhi Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5% bagi partai-partai politik peserta Pemilu 2009.

Banyak kalangan menyayangkan anggota-anggota DPR yang masih muda dan potensial ini tidak terpilih pada periode mendatang. Padahal mereka-mereka ini dianggap cerdas, matang pengalaman berpolitikanya dan tidak tercela.

Namun kekalahan ini tentunya harus diterima dengan lapang hati dan jiwa besar, karena masih banyak kesempatan bagi mereka untuk terus berkarya dan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya bagi bangsa dan negara.

Dari sekian banyak tokoh DPR, Parlemenaria menampilkan beberapa anggota yaitu Ferry Mursyidan Baldan, Yuddy Chrisnandi, Abdullah Azwar Anas, Andi Yuliani Paris, dan Andreas Pereira, sebelum mereka mengakhiri masa baktinya hingga akhir

September 2009.

Anggota dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan, salah satu anggota dewan yang menjadi langganan media massa untuk dijadikan nara sumber. Media massa mencatat, telah banyak prestasi yang telah dihasilkan anggota dari daerah pemilihan Jabar ini.

Ferry pernah menjadi Ketua Komisi II DPR, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh, Ketua Pansus RUU Pemilu, Ketua Pansus RUU Pilpres dan masih banyak jabatan yang pernah diembannya.

Dari sederet nama anggota dewan, Ferry termasuk anggota yang vokal, berprestasi, dan disiplin.

Banyak kalangan menyayangkan pada Pemilu Legislatif lalu, Ferry tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan periode 2009-2014.

Menanggapi tidak terpilihnya dalam Pemilu Legislatif lalu, dengan bijak dia menjawab semua itu harus dapat diterima dengan "legowo". Kalau saya tidak terpilih, berarti rakyat yang memilih saya hanya sedikit. Dan semua harus menghargai pilihan rakyat," kata Ferry bijak.

Dalam proses berdemokrasi, kita harus siap untuk kalah dan menang, karena menurutnya itu adalah bagian dari hiruk pikuknya perpolitikan.



foto: supardi/parle

Yuddy Chrisnandi : Konsisten Dan Taat Aturan

Menurut anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi, pada pemilu legislatif lalu, sebetulnya dia tidak ada niat untuk mundur dari keanggotaan DPR dengan tidak mencalonkan lagi pada periode ini.

Namun, kata Yuddy, saat proses pencalonan dia menilai partainya tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuatnya sendiri dan juga tidak aspiratif terhadap dukungan masyarakat di konstituennya. Sehingga menurutnya, ada ketidakadilan dengan ditematkannya ia di nomor urut empat, padahal dia sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Sekretaris Korwil Partai Golkar di Jawa Barat.

Yuddy juga tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela selama berkiprah di parlemen. "Saya mendarmabaktikan prestasi dan dedikasi untuk partai, dan didukung oleh konstituen Partai Golkar dari daerah pemilihan saya yaitu Jabar 8," kata Yuddy.

Dia menambahkan, semua kota di Jabar 8 (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu) merekomendasikan namanya. Tidak ada satupun catatan negatif selama dia mengabdikan kepada rakyat sebagai anggota DPR.

Namun yang terjadi, saat penetapan daftar urut calon anggota legislatif, usulan dari bawah yang meminta Yuddy ditempatkan pada nomor urut paling atas, diturunkan menjadi nomor 4.

Pada Pemilu yang lalu Yuddy sudah menduduki nomor dua, padahal pada waktu itu dia bukan sebagai anggota DPR. Namun ketika sudah berprestasi dan membuktikan dedikasinya sebagai

wakil rakyat, justru ditempatkan di nomor empat.

"Keanehan inilah yang tidak bisa saya terima secara pribadi, oleh karena pada saat itu saya meminta agar nomor urut saya dikembalikan sebagaimana usulan rakyat pendukung Golkar di daerah ke nomor 1, atau sekalian saja saya ditaruh di nomor urut paling bawah 9," kata Yuddy.

Protes Yuddy itu tidak membawa perubahan-perubahan seperti yang dia inginkan. Yuddy menganggap telah terjadi kesemena-menaan, sebagai pejuang demokrasi, pejuang hak asasi manusia dia tidak bisa diperlakukan seperti itu.

Akhirnya, kata Yuddy, dia berpikir untuk apa sebuah jabatan tanpa kehormatan. Yuddy menganggap jabatan tidak terlalu penting dibandingkan dengan prinsip-prinsip untuk menegakkan keadilan dan aturan. Dengan besar hati akhirnya Yuddy mengundurkan diri dari pencalonan anggota DPR periode 2009-2014.

Yuddy mengakui, banyak teman-temannya yang menyayangkan keputusannya. Namun tujuannya bukan hanya sekedar mempertahankan atau mendapatkan jabatan, tetapi ada prinsip-prinsip yang lebih penting dalam kehidupan yaitu konsisten, taat aturan. "Itulah kenapa saya kemudian tidak maju kembali dalam pencalonan anggota DPR," jelasnya.

Walaupun dikecewakan Partainya, namun Yuddy tetap memiliki loyalitas yang tinggi. Terbukti dia tidak keluar dari Partai Golkar, kendati tawaran untuk masuk ke partai-partai lain pada saat itu demikian banyak. Bahkan partai lain memberikan tempat yang terhormat jika ia mau pindah menjadi calon anggota DPR dari partai tersebut. Hal itu tidak dilakukan karena sekali lagi bukan jabatan yang dicari tetapi

kehormatan dan prinsip-prinsip hidup itulah yang lebih penting.

Kebesaran hati Yuddy ditunjukkan saat pemilu legislatif, dia hadir berkampanye untuk teman-temannya sesama caleg Golkar, bahkan ketika Ketua Umum Partai Golkar datang ke wilayah Jawa Barat, dia pun berkampanye hadir di situ untuk memenangkan Partai Golkar. "Itulah sikap patriotisme yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman di partai Golkar atau di partai-partai lain. Kita boleh saja kecewa pada orang, pada pimpinannya, tetapi kita harus tetap memiliki semangat untuk menjaga partai," tuturnya bijak.

Yuddy mengatakan, selagi partai Golkar masih membutuhkan kehadirannya, dia akan tetap mengabdikan diri kepada partai berlambang pohon beringin itu. Untuk itu, dia menawarkan kemampuan, pengalaman, semangat, gagasan-gagasan dan visi yang dimiliki untuk membangun partai Golkar agar lebih kuat dan bangkit bagi masa yang akan datang.

Hal itulah yang mendorong dia mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode mendatang "Ini merupakan sebuah upaya saya untuk bisa mengabdikan diri kepada partai Golkar sejauh partai Golkar memang membutuhkan kehadiran saya," tambahnya.

foto: supardi/parle

Pencalonan Yuddy ini dengan sebuah gagasan bagaimana partai Golkar ke depan. mampu bangkit kembali seperti partai Golkar sebelumnya. Namun semua itu tergantung dari hasil Munas nanti, apakah dia terpilih atau tidak.

Yuddy menegaskan, pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar hendaknya jangan dilihat dia sebagai seorang Yuddy Chrisnandi, tapi ini merupakan representasi dari sebuah ide, semangat dan idealisme kolektif teman-teman yang bergabung dan mendorongnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

“Jadi ini bukan maunya saya sendiri, tapi melaksanakan amanah untuk mengejawantahkan idealisme dari teman-teman yang menginginkan kembalinya partai Golkar sebagai partai yang memiliki harkat, martabat, kehormatan dan jati diri sebagai partai perjuangan,” katanya.

Golkar didirikan oleh para pejuang sebagai partai perjuangan. Sebagai partai perjuangan, orang yang bergabung didalamnya harus mau berkorban, mau bersama-sama berkarya dan membangun sesuatu.

Oleh karenanya, sebagai partai perjuangan basis ideologinya adalah Pancasila, dan itulah akar historis partai Golkar, doktrinnya karya kekaryaan. Dalam arti, setiap orang dituntut untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi lingkungannya, bagi organisasi, dan bagi partainya.

Doktrin karya kekaryaan itu melihat orang karena prestasinya, kemampuannya, integritasnya, jati dirinya, dan loyalitasnya, bukan semata-mata melihat orang dari sisi materialisme. Sementara landasannya adalah kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan. “Semangat inilah yang ingin kami kembalikan apabila saya memimpin partai Golkar, karena itu ruhnya,” tuturnya.

Untuk mencapai itu, ada program sukses Golongan Karya yang disebut dengan Catur Sukses Golongan Karya. Pertama adalah sukses konsolidasi, ke dua sukses Pilkada, ke tiga sukses Legislatif dan ke empat sukses

Pemilihan Presiden.

Keempat catur sukses ini setiap catur sukses ada implementasi programnya. Program-program tersebutlah yang merupakan kebijakan-kebijakan partai Golkar terukur untuk bisa mencapai target-target, sehingga di tahun 2014 nanti partai Golkar akan kembali menjadi partai pemenang pemilu, partai yang kader-kadernya diberbagai macam daerah menjadi walikota, bupati atau gubernur.

Yuddy melihat, secara mayoritas, kader partai Golkar yang solid secara organisasi mencerminkan kombinasi generasi baru dan generasi lama. Dan yang lebih menonjol di tingkat pusat dimana generasi baru mencapai 70 persen dan generasi senior 30 persen, di daerah tingkat I, 60 persen generasi baru dan 40 persen generasi senior, di daerah tingkat II berimbang, generasi senior 50 persen dan generasi baru 50 persen.

Yang terpenting, bagaimana menyatukan semua elemen di partai Golkar sehingga bersinergi dan akan membawa pada sukses legislatif dengan sistem dan metode yang mendekatkan si calon pada rakyat.

Dalam menentukan anggota DPR nanti harus betul-betul tidak pernah tercela, berprestasi, dedikasi, loyalitas, berkemampuan, dan juga harus mengakar yang dibuktikan dengan dukungan dari akar rumput melalui representasi organisasi kepartaian.

Dengan demikian akan memudahkan masuk dalam Pemilu Presiden, dimana nantinya kita akan menyiapkan Presiden dari Partai Golkar jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpresnya.

Mengomentari banyaknya anggota potensial yang tidak terpilih lagi, menurut Yuddy, sebetulnya rakyat tidak bisa disalahkan sepenuhnya, ini juga kesalahan partai didalam melakukan rekrutmen politik lalu menyusun daftar calon menempatkannya pada nomor urut dan penempatan pada masing-masing daerah.

Kalau partai juga turut bertanggung jawab bahwa orang-orang potensial di partai itu diproyeksikan untuk terpilih, dia bisa terpilih, tapi tentunya dengan

menempatkan calon tersebut pada urutan nomor satu atau dua.

Ke depan, kita mengharapkan pada sistem distrik, oleh karena itu siapapun yang akan menjadi anggota DPR nanti partai harus melakukan sebuah proses rekrutmen dan seleksi yang mampu menghasilkan calon anggota DPR yang dekat dan mengakar dengan rakyat.

Jika diberlakukan sistem distrik, calon tidak terlalu banyak, hanya sejumlah orang yang akan dipilih di daerah tersebut. Jadi setiap partai paling banyak hanya menempatkan orang sesuai dengan perolehan sebelumnya. Misalnya, partai Golkar di DKI dapatnya 2 kursi, cukup dua orang saja yang dicalonkan yang paling kuat, tidak perlu sampai 12 kursi. Tentunya, ini menjadi tantangan bagi partai untuk menghasilkan kader-kader yang memang berkualitas dan mengakar.

Untuk itu Yuddy berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian anggota DPR terpilih. Pertama, menyadari bahwa anggota DPR itu wakil rakyat bukan wakil partai, bukan wakil pemerintah, sehingga lakukanlah yang terbaik apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh rakyat. Jadilah sejatinya pembela rakyat, jadilah patriot dan pahlawan yang membela kepentingan rakyat.

Ke dua, jaga diri, jaga integritas, jangan tergoda oleh hal-hal yang sifatnya materi apalagi sampai terjerumus pada tindak pidana korupsi. Menjadi anggota DPR itu semua serba ada, semua fasilitas ada, gaji lebih dari cukup, tinggal bagaimana sekarang gaji yang diterima dari rakyat itu diabdikan bagi kepentingan rakyat. Jadi jaga diri baik-baik jangan mudah tergoda.

Yang ke tiga, jangan berhenti belajar, pelajari seluruh regulasi yang ada di DPR, semua keputusan-keputusan DPR, pelajari bagaimana mengawasi pemerintah, bagaimana mengawasi buget dan bagaimana proses legislasi, lalu bersuaralah. (tt, sw)

Abdullah Azwar Anas : Kekalahan Bagian Dari Proses Politik

tidak turun sama sekali.

Sebelumnya Anas terpilih menjadi anggota dewan periode 1999-2004 di dapil Jawa Timur 3 yang meliputi daerah Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Saat itu Anas memperoleh 135.667 atau terbanyak nomor tiga setelah Aly Maskur Musa dan Khofifah Indarpariwansa.

“Seandainya saya masih tetap di daerah pemilihan saya, walaupun ditempatkan di nomor urut 10 saya tetap optimis, tapi sayangnya saya tidak diberi ruang yang cukup di tempat itu,” kata Anas.

Dengan dipindahkannya ke dapil baru menurut Anas ini adalah bagian dari proses politik yang harus diterima oleh siapapun ketika terjun ke dunia politik. Sehingga siapapun yang sudah terjun ke politik harus siap menghadapi keadaan, termasuk keadaan yang sama sekali mungkin tidak dia duga termasuk yang dialaminya.

Hal itu tidak hanya dialami anggota dari Fraksinya saja, tapi beberapa teman-temannya dari fraksi lain juga mengalami hal yang sama. Sebagai contoh, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi dari Fraksi Partai Golkar yang ditempatkan pada urutan nomor empat. “Padahal siapa yang tidak tahu prestasi dan dedikasi dari mereka berdua,” ujarnya.

Anas menambahkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan. Pertama, memang adanya gagal kompetisi di daerahnya dan ke dua memang sejak awal karena faktor-faktor tertentu calon ini tidak didisain untuk jadi. Misalnya, tidak

di nomor bagus, kemudian tidak di dapilnya dan faktor lainnya.

Jadi, kata Anas, tidak terpilihnya seseorang menjadi anggota dewan itu harus diterima sebagai bagian dari proses politik. Ternyata kinerja di DPR itu tidak menjadi ukuran dari partai politik untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh kadernya. Memang partai mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menurutnya itu menjadi wewenang partai untuk mengambil keputusan terkait dengan calon-calon legislatif yang akan dimunculkan. Menurutnya, sehatnya partai politik itu akan menjamin adanya proses seleksi kaderisasi yang lebih baik.

Tidak terpilihnya Anas pada DPR periode mendatang menjadi pengalaman berharga baginya, dan dia menghargai sebagai bagian dari proses politik yang ke depan mendorongnya untuk lebih dewasa menghadapi semua itu.

Anas menuturkan, tidak ada niat baginya untuk pindah ke partai lain. Karena baginya track record itu penting, pindah partai itu bukan soal pindah pekerjaan, pindah partai bukan soal mutasi pekerjaan, tetapi ada platform ideologi yang sesuai dengan seseorang. “Saya merasa bahwa partai saya ini cocok platform dan ideologinya dengan saya. Bahwa sekarang ada riak masalah-masalah partai ini hanya soal supir saja, soal teknis organisasi yang kebetulan seperti ini yang kemudian harus saya terima keputusannya,” kata Anas bijak.

Menjawab pertanyaan Parlementaria apakah dia akan maju lagi pada periode mendatang. Anas mengatakan, masih cukup waktu

foto: doeh/parle

Anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdullah Azwar Anas merupakan salah satu anggota DPR muda dan berpotensi yang tidak terpilih lagi untuk duduk pada kursi dewan periode mendatang.

Menurut Anas (panggilan akrabnya), saat pemilihan dia dipindah ke daerah pemilihan (dapil) baru yaitu dapil 7 Jawa Timur (Ponorogo, Nganjuk, Pacitan) yang memang belum pernah terlibat di dalam proses pembinaan. “Jadi dapil itu baru sama sekali bagi saya,” kata Anas. Karena itu ketika partai mengirimnya ke sana, dia sudah tidak serius dan tidak pernah sama sekali turun ke dapil itu.

Alasannya, rakyat sekarang ini membutuhkan bukti dari kerja wakil rakyat dari pada janji. Dalam waktu yang singkat itu dia merasa tidak mampu memberikan bukti secara maksimal kepada rakyat, konstituen yang baru. Selain itu juga membutuhkan waktu meyakinkan rakyat. Untuk itulah akhirnya dia

bagaimana mempersiapkan lima tahun ke depan supaya bisa lebih baik. Menurutnya, ada beberapa agenda politik didaerahnya dan dia ingin menunggu hasil survey yang baru nanti, dan sekaligus mempersiapkan diri supaya lebih matang agar ke depan bisa lebih baik.

Anas menambahkan, dalam sisa waktu yang hanya tinggal beberapa minggu saja, yang terpenting sekarang ini berkonsentrasi menuntaskan tugas-tugas dewan dengan baik. Selain itu, dia juga perlu mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada rakyat dengan tuntas.

Oleh karena itu, dia menggelar laporan pertanggungjawaban publik kepada konstituen, yang diumumkan di media cetak dan melalui undangan yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 rakyat yang

mewakili dari berbagai konstituen yang ikut dalam pertemuan laporan pertanggungjawaban publik.

Menurut Anas, anggota DPR itu generalis tidak spesifik teknis yang memahami tugas-tugas yang ada di komisi. Oleh karena itu, menurutnya DPR ke depan harus mau belajar keras, selain perlu ada supporting system dalam arti staf ahli perlu diperkuat, staf ahli yang kuat akan memberi spirit dan support kepada dewan untuk bisa mempertajam setiap masalah, setiap agenda yang akan disampaikan kepada mitra.

Karena, kalau anggota DPR tidak kuat, tidak mempunyai data yang cukup dan asal bunyi, tentunya tidak begitu dihitung oleh eksekutif sebagai bagian dari mitra kerja. Ke depan, DPR juga harus membangun mitra strategis dengan kelompok-kelompok lain. Dalam arti kalau misalnya

di Komisi V harus membangun kelompok strategis dengan YLKI dan lain-lain.

Kepada anggota DPR baru Anas berharap, sekarang ini situasinya sudah semakin terbuka, karena itu pemahaman masing-masing anggota dewan ke depan perlu ditingkatkan terhadap substansi masalah yang spesifik terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam arti, anggota-anggota DPR itu lebih maksimal untuk memahami bidang tugasnya di tingkat komisinya masing-masing.

“Saya yakin ke depan ini akan banyak peluang untuk mendorong agar anggota DPR lebih baik dan saya optimis dengan anggota DPR baru yang mau bekerja keras, agar muncul anggota DPR yang produktif dan anggota DPR yang akan disegani oleh mitranya,” kata Anas. (tt,sw)

Andi Yuliani Paris: Perlu Perbaiki Undang-Undang Pemilu

Terkait banyaknya persoalan dalam proses pemilu 2009, termasuk kegagalan-kegagalan beberapa tokoh yang berpotensi, Anggota DPR dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris berpendapat perlu dilakukan perbaikan terhadap UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Ia mencontohkan, diberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara pemilu, yang diduga menerima suap, dan untuk kepentingan penyelidikan yang bersangkutan harus diberhentikan sementara.

“Pokoknya siapapun yang masih menjabat sebagai penyelenggara pemilu, demi

kepentingan penyelidikan harus segera diberhentikan sementara, untuk menghindari kemungkinan menghilangkan barang bukti., tidak hanya berbentuk uang. Tapi implikasinya ketika menerima uang bisa merubah C1,” tegasnya

“Sanksi tegas juga diberikan kepada masyarakat atau siapapun yang menerima uang. “Karena kalau hanya mengatur si pemberi uang saja, masyarakat bisa mengatakan tidak menerima uang,” katanya.

Politisi PAN ini menegaskan, Undang-undang adalah hal-hal yang normatif dan baik. Namun ketika ada deviasi bukan Undang-undang yang salah, tapi ada sesuatu yang memang harus diperbaiki.

“Secara normatif sudah bagus tapi mungkin memang ada yang

harus diperbaiki, seperti Undang-undang Pemilu tidak mengatur sanksi untuk



foto: eka hindra/parle

penyelenggara yang menerima uang, yang terbukti tidak netral,” tegasnya

Lebih lanjut ia mengatakan, semua pihak tentu berharap KPU benar-benar mandiri, tapi fakta dilapangan, jika dilakukan sampling dari semua caleg, ternyata mayoritas menyatakan memang kemandirian dari penyelenggara pemilu ini masih jauh dari yang diharapkan UU No 22 tahun 2007

Menurut Andi, orang yang mempunyai latar belakang partai pasti sudah dikaderisasi oleh partainya sehingga tentu dia akan menjaga kepentingan partainya, tidak ada kepentingan lain yang terkait dengan uang.

Ia mengatakan bukan berarti masing-masing partai harus punya keterwakilan, namun sebaiknya jangan sampai Undang-undang melarang mereka masuk menjadi penyelenggara pemilu.

“Hal-hal seperti inilah yang perlu kita ubah dalam Undang-undang pemilu. Tidak harus dibatasi non partai untuk menjadi penyelenggara pemilu. Sekarang dibatasi, tidak boleh dari partai,” terangnya

Penuh kecurangan

Pemilu 2009 sangat banyak kecurangan. Andi mengisahkan pada pemilu 2004, seusai pemilihan dirinya bisa langsung duduk manis di rumah menunggu hasil. Tapi pada Pemilu 2009 kalau tidak di jaga, suara bisa hilang. “Kalau sekarang tidak bisa setenang itu, kita harus mengecek suara dari kabupaten ini – itu, karena memang penyelenggaranya ada indikasi tidak netral,” katanya

Ia menyadari dengan sistem suara terbanyak, masyarakat tidak tahu persis caleg yang dipilih. Masyarakat masuk ke dalam pramagisme, banyak yang tidak tahu potensi caleg yang akan dipilih, mereka juga banyak yang tidak tahu fungsi DPR dan DPRD. Andi

sangat menyayangkan hal ini terjadi, padahal seharusnya masyarakat memilih yang terbaik.

“Ketika ukuran mereka adalah pragmatisme, biasanya caleg-caleg yang tidak punya selling point menggunakan cara-cara money politic agar dirinya bisa di beli. Akhirnya menghasilkan anggota DPR ataupun DPRD yang tidak dapat memenuhi tuntutan multi fungsi DPR yang diamatkan UUD,” tukas Andi

Saat dimintai komentarnya terhadap anggota terpilih hasil pemilu 2009, ia mengatakan bukan kapasitas dirinya untuk menilai, tapi kata dia, mayoritas mereka bukan berasal dari kader partai yang sesungguhnya, banyak yang instant.

“Partai itukan tugasnya memberikan pendidikan politik, pendidikan politik itu tidak hanya ketika dia menjadi caleg, tapi sudah di tempa lama. Saya sebagai orang PAN akan punya ideologi berbeda dengan partai lainnya. Nah itu nilai-nilai yang dibentuk oleh pelatihan, visi-misi dari partai,” terang Andi

“Idiologi ini harus tercermin ketika kita menjadi anggota DPR,” tambahnya.

Ia mencontohkan, Amin Rais sangat selektif terhadap hutang luar negeri, ini sudah menjadi ideologinya sebagai anggota DPR yang mewakili Fraksi PAN, untuk melakukan seleksi ketat terhadap pinjaman luar negeri untuk program-program pembangunan di Indonesia

Kembali ke UUD 1945

Ketika ditanya harapannya kepada anggota DPR terpilih, dirinya menjawab harus kembali ke UUD 1945 bahwa fungsi anggota adalah legislasi, pengawasan dan anggaran. “Tidak cukup banyak anggota DPR yang menggeluti legislasi,” katanya

Menurutnya, fungsi legislasi ini tidak harus duduk di legislasi,

tapi berada di komisipun tetap punya tugas dan kedudukan sama, sehingga tentu memerlukan ketekunan, kesabaran serta masuk ke hal-hal yang detail dan harus mau belajar.

Ia mengakui, setiap anggota DPR punya staf ahli, namun sebagai wakil rakyat katanya tidak boleh hanya tergantung kepada staf ahli, anggota DPR harus punya knowledge yang cukup, juga harus tahu bagaimana menyerap aspirasi masyarakat.

Kelemahan Anggota DPR lanjutnya, tidak semua anggota DPR membaca laporan BPK, padahal laporan itu sebagai dasar untuk menyetujui anggaran periode mendatang.

“Harus bacalah, duduk. Fungsi legislasi itukan harus banyak duduk, membaca Undang-Undang sebab jika kita duduk, kita bisa tenang berpikir visioner, terus berpikir bahwa setiap pasal itu punya dampak bagi rakyat Indonesia,” pesan Andi

Terkait rencana pribadinya setelah tidak lagi menjadi Anggota DPR, ia mengaku ada banyak hal yang akan dikerjakan, terutama dalam koridor mengasah kemampuan intelektual, demi menjaga idealismenya.

Sedangkan untuk rencana Pemilu 2014, jika sistemnya tidak diubah, dimana potensi saling mencurangi sesama caleg tidak bisa diredam, dirinya tidak terlalu optimis untuk mencalonkan. “Tapi jika sistemnya bisa diubah, dimana tidak ada lagi ruang untuk melakukan money politic, itu saya masih mikir-mikir,” ujarnya. (sw,tt)

Andreas Pareira : Kegagalan ini adalah Resiko Berpolitik

foto: suwarni/parle

Menanggapi kegagalan dalam mencalonkan diri pada Pemilu 2009, Anggota Komisi I DPR Periode 2004-2009 Andreas Pareira menganggap hal tersebut merupakan resiko berpolitik, resiko dari sistem pemilihan yang terbuka, sistem proporsional terbuka.

Dia menyayangkan banyaknya perubahan-perubahan yang membuat sistem pemilu menjadi tidak konsisten yang sangat merugikan peserta calon legislatif.

"Itu adalah pilihan rakyat. Tapi saya pribadi menyayangkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi ditengah jalan. Misalnya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penggunaan suara terbanyak. Hal ini diputuskan ditengah jalan, ketika sedang berproses," tukasnya

Dengan keputusan itu lanjutnya, akan mempengaruhi cara dan strategi berkampanye. Kelemahan sistem yang sekarang juga menyebabkan ketidakpastian, KPU sendiri belum menetapkan caleg terpilih.

Namun Politisi dari F-PDIP ini menghimbau semua pihak dapat menerima dengan lapang dada, karena proses berdemokrasi di Indonesia memang masih belajar menuju demokrasi mapan.

Menanggapi banyaknya keraguan berbagai pihak terkait anggota terpilih 2009, Ia mengakui bahwa anggota terpilih adalah pilihan rakyat. "Tapi apakah pilihan tersebut sudah tepat, itu hal yang beda,"katanya.

Menurutnya bukan hanya para caleg yang belajar terhadap perubahan-

perubahan, masyarakat juga masih dalam

proses belajar. Karenanya, dalam menentukan pilihan pun sangat variatif, bahkan pilihan itu diputuskan masyarakat tanpa ada satu dasar pegangan yang kuat

Dia menyayangkan sikap masyarakat yang memakai prinsip pragmatis dalam membuat keputusan. Hanya karena hal-hal yang bersifat materi dengan jumlah sedikit, tapi hal itu bisa merubah keputusan mereka, atau hanya karena popularitas, seperti kaum selebritis dapat mempengaruhi pilihan-pilihan tadi. Boleh dikatakan tidak ada hubungan signifikan antara yang berprestasi di parlemen dengan tingkat keterpilihan.

Andreas lebih setuju jika partai yang menentukan nomor urut, sehingga orang akan memilih partai. Dia yakin bagi partai yang ingin maju dan berkembang, akan menetapkan caleg yang benar-benar kualified.

Menurutnya, Pemilu 2009 bisa dikatakan sebagai penyelenggaraan Pemilu terburuk. "Kalau sistemnya buruk, pelaksanaannya buruk, prosesnya juga tidak bagus bagaimana kita bisa mengharapkan output yang baik," ujarnya

Dia berpendapat, Sistem Pemilu 2009 harus diubah, karena terlalu banyak varian-variananya. Dalam kenyataan sekarang, tiap Pemilu ganti sistem, dan kita tidak pernah melihat kekurangan dan kelebihan sistem itu.

Perbaiki UU Politik

Terkait dengan sistem pemilu, Andreas mengatakan perlu perbaikan terhadap paket UU Politik, yakni UU Partai Politik, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk itu ia berpendapat, Pemilu akan datang harus merubah UU Pemilu dan UU pelaksana Pemilu. "Perlu ketegasan dan sikap konsisten terhadap sistem yang kita gunakan,"katanya.

Andreas berharap anggota terpilih periode 2009-2014 akan menjadi lebih baik. "Dengan kritik dan masukan dari masyarakat, saya yakin akan lebih baik,"katanya

Politisi yang duduk di Komisi I ini belum mempunyai rencana pasti mencalonkan diri kembali untuk 5 tahun mendatang. Ia sangat menyadari untuk pencalonan memerlukan persiapan yang matang dalam segala hal.

"Modal sosial, modal ekonomi dan kapabilitas individu, gabungan tiga modal inilah yang akan mendukung seseorang dapat mencalonkan diri menjadi anggota dewan," katanya. (sw,tt)

Paparan Sekjen DPR di depan Parlemen Korsel: Dukung Proses Demokrasi Lewat Seni Wayang dan Pendidikan



Demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan maju telah membuka mata negara-negara sahabat khususnya negara-negara di kawasan Asia. Proses perkembangan demokrasi Indonesia melalui masa transisi yang tidak mudah, era reformasi yang ditandai dengan demo mahasiswa/I hingga tragedi semanggi I dan II mewarnai perjalanan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Arus perubahan dari mahasiswa prinsipnya juga menuntut berkurangnya kesenjangan antara harapan rakyat dengan kinerja parlemen yang memang dinilai tidak aspiratif. Rakyat menuntut DPR RI sebagai pengawal demokrasi yang dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. “Perubahan strategis inilah yang perlu diantisipasi agar DPR RI dapat tampil sebagai lembaga yang dipercaya dapat menyalurkan aspirasi rakyat,” papar Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh.

Politik kita sekarang ini, mulai mengarah kepada proses pendewasaan diri, perjalanan bangsa dalam mencapai kemerdekaan hingga seperti sekarang ini telah dilalui dengan perjuangan dan tetesan darah para pejuang. Kita patut berbangga ternyata proses demokrasi di Indonesia menarik perhatian negara tetangga, misalnya saja Korsel, belum lama ini, Sekjen DPR RI diundang

oleh Parlemen Korea Selatan untuk memaparkan mengenai perkembangan demokrasi di parlemen dan peran serta Sekjen DPR RI dalam menunjang proses demokrasi yang ada.

Menurut Sekjen DPR RI, tujuan Sekretariat Jenderal ke Korea Selatan dalam rangka memaparkan dan menjelaskan mengenai upaya Sekjen DPR RI dalam merespon lingkungan strategis membangun Demokrasi melalui pengembangan budaya dan pendidikan. “Pemilihan topik ini dilakukan karena adanya perubahan iklim strategis di Indonesia yaitu adanya arus perubahan politik yang didorong oleh para mahasiswa yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang lalu, yang sampai saat ini masih berlangsung,” papar Sekjen DPR di hadapan parlemen Korsel.

Kita akui, proses demokrasi membutuhkan media komunikasi yang tepat sasaran sehingga masyarakat Indonesia dapat merespon setiap perubahan yang

terjadi saat ini. Kita meyakini bahwa bangsa yang besar mempunyai pandangan visioner serta keyakinan, keuletan dan kecerdasan dalam mencapai cita-cita perjalanan bangsa kita. “perlu adanya pemerintahan yang baik dan demokrasi rakyat secara bersama-sama sehingga proses demokratisasi sebagai lingkungan strategis dinilai akan berjalan dengan baik jika DPR RI dapat mendekati diri dengan rakyat begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Medium komunikasi memegang peranan penting khususnya kegiatan budaya dan pendidikan, dengan menyelenggarakan pertunjukan wayang dan penyebaran nilai-nilai kepeloporan, kerja keras dan pembaharuan melalui anggota masyarakat yang berprestasi dibidang pekerjaannya atau biasa disebut teladan menjadi salah satu cara mendekati diri wakil rakyat dengan konstituennya. “Menyelenggarakan pertunjukan wayang dan menghadirkan para teladan dalam sidang paripurna merupakan dua kegiatan

budaya yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, yang diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai lokal yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa,”kata Sekjen DPR.

Menurut Sekjen, pemilihan wayang sebagai bentuk budaya yang dipertunjukkan di gedung parlemen adalah karena wayang merupakan ekspresi budaya yang autentik bagi bangsa Indonesia. Setiap pertunjukan wayang dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak sebagai kesatuan yang ada. Mereka itu adalah dalang sebagai orang yang memainkan dan menggerakkan wayang sesuai dengan tema dan alur cerita yang ditentukan.

Selain itu, adanya waranggana yaitu sekelompok orang yang memainkan alat musik yang disebut gamelan dan ketiga adalah pesinden yaitu perempuan yang melantunkan nyanyian yang berasal dari naskah-naskah Jawa kuno.

Berdasarkan sejarahnya Wayang telah dikenal sejak zaman prasejarah yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia memeluk kepercayaan (animisme) berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar.

Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Terdapat versi wayang yang dimainkan oleh orang dengan memakai kostum, yang dikenal sebagai wayang orang, dan ada pula wayang yang berupa sekumpulan boneka yang dimainkan oleh dalang. Wayang yang dimainkan dalang ini diantaranya berupa wayang kulit atau wayang golek. Bahkan sekarang berkembang proses pembuatan dan pagelaran wayang menggunakan media digital disebut dengan istilah e-wayang. Cerita yang dikisahkan dalam pagelaran wayang biasanya berasal dari Mahabharata dan Ramayana.

Cerita-cerita di wayang mengandung nilai kreatifitas, proses spiritual dan nilai moral lainnya yang membawa nilai kebajikan bagi masyarakat. Wayang bukan hanya seni pertunjukan semata tetapi juga tidak terpisahkan dari ekspresi budaya di Indonesia yang tidak hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa, tetapi juga Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok. “Wayang sebagai budaya mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya, termasuk adat istiadat, etika, dan pelajaran moral,”tutur Sekjen.

Menurut Sekjen, salah satu alasan menyelenggarakan pertunjukan wayang di DPR RI dengan didukung Setjen DPR merupakan salah satu cara mendekatkan diri para wakil rakyat dengan komunitas

dari para tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki peran serta besar di lingkungannya. Setjen bersama dengan pemerintah menghadirkan tokoh-tokoh pelopor pada berbagai bidang kehidupan untuk hadir di sidang paripurna saat pidato kenegaraan Presiden RI. “Kita menyebutnya teladan atau penduduk teladan, mereka merupakan contoh karena tingginya integritas, pekerja keras, perilaku baik, dan pelopor yang harus dicontoh oleh masyarakat lainnya dan diharapkan dapat memiliki dampak bagi anggota komunitas lainnya,”kata Sekjen

Setiap acara paripurna kenegaraan, Setjen DPR RI menghadirkan sekitar 1.740 orang yang terdiri dari berbagai macam profesi seperti guru, pelajar, tenaga medis, transmigran dan sebagainya. Penyeleksian

para tokoh pelopor tersebut bertujuan mempercepat proses pembaharu yang secara alamiah berjalan lambat. “upaya mendorong terbentuknya anggota masyarakat berprestasi dari semua segmen sosial penting dilakukan,”katanya.

Dia menambahkan, kelompok pembaharu meliputi kaum pengusaha, intelektual, profesional, birokrat, pemuda, aktivis LSM, dan lain-lain. Mereka semua diikat oleh kesamaan platform yaitu memperjuangkan nilai-nilai

independensi, pengabdian, kepeloporan dan kerja keras.

Kegiatan wayang dan kehadiran para teladan di DPR dapat dijadikan modal politik sebagai sebuah kesadaran berbangsa melalui implementasi nilai-nilai warisan budaya demi terbentuknya generasi yang berkualitas dan bermartabat, “Hal ini merupakan upaya DPR RI dalam membangun karakter bangsa, suatu kesadaran kebangsaan yang memaknai bahwa ikatan sosial, kerja keras dan semangat kepeloporan merupakan seperangkat nilai yang harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia,”ujarnya.



masyarakat yang ada. “Pertunjukan wayang membawa dampak besar dalam penyampaian nilai-nilai internalisasi kepada masyarakat,”katanya.

Pada tingkatan sosial, terang Nining, wayang memiliki posisi yang khusus karena wayang merupakan salah satu bentuk seni yang dapat menjembatani berbagai status sosial di masyarakat dan dapat membangun nilai-nilai emosional dan intelektual. Artinya dengan kata lain wayang, memiliki nilai tambah didalam berbagai aspek dasar di sendi kehidupan masyarakat. “Nilai-nilai tersebut dapat di temukan didalam pertunjukan wayang seperti character dan alur cerita wayang,”papar Nining.

Internalisasi lewat pendidikan

Selain melalui kebudayaan, Sekretariat Jenderal juga berusaha menginternalisasikan nilai-nilai demokratisasi melalui pendidikan

BKSAP DPR-RI; DARI SENAYAN KE KANCAH GLOBAL

Selain melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR-RI juga mengadakan hubungan luar negeri yang merupakan bagian dari fungsi diplomasinya. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh DPR-RI khususnya hubungan antar parlemen sangat diperlukan mengingat hubungan dengan negara-negara sahabat harus dibina tidak hanya di tingkat pemerintah tetapi juga di tingkat parlemen.

Diplomasi DPR RI melalui parlemen negara-negara sahabat bertujuan untuk menyampaikan kepentingan Indonesia di forum internasional terutama mendorong kerjasama pemerintah RI melalui parlemen negara bersangkutan. Selain melalui parlemen terkait, Diplomasi DPR RI di luar negeri juga dilakukan melalui konferensi-konferensi parlemen baik regional maupun internasional. Peran ini

merupakan salah satu dari *multitrack diplomacy* yaitu melaksanakan diplomasi melalui jalur parlemen. Meningkatnya keterlibatan DPR RI di forum internasional dan meluasnya masalah-masalah hubungan antar parlemen telah ditangani baik oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Anggota BKSAP terdiri dari 50 orang yang pemilihannya berdasarkan azas proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi di DPR. Dalam menjalankan

fungsinya, BKSAP dipimpin oleh satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP secara musyawarah dan mufakat menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi DPR.

Pada periode 2004 – 2009 ini, susunan Pimpinan BKSAP adalah sebagai berikut :

Periode	Anggota	No. Anggota	Fraksi
2004 – 2005	KETUA AMRIS HASAN, MA	A-321	PDI-P
	WAKIL KETUA AULIA AMAN RACHMAN, SH	A-406	PG
	DRS. BEN VINCENT DJEHARU, MM	A-293	PBR
	H. ADE DAUD ISWANDI NASUTION	A-429	PDI-P
2005 – 2006	KETUA ABDILLAH TOHA, S.E.	A-175	PAN
	WAKIL KETUA Drs. SIMON PATRICE MORIN	A-545	PG
	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	A-328	PDIP
	H. ANDI M. GHALIB, S.H., M.H	A-67	PPP
	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	A-274	PKS
2006 – 2007	KETUA ABDILLAH TOHA, S.E.	A-175	PAN
	WAKIL KETUA Drs. SIMON PATRICE MORIN	A-545	PG
	Dr. SUTRADARA GINTINGS	AA-382	PDIP
	H. ANDI M. GHALIB, S.H., M.H	A-67	PPP
	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	A-274	PKS

2007 – 2008	KETUA		
	ABDILLAH TOHA, S.E.	A-175	PAN
	WAKIL KETUA		
	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A-545	PG
	Dr. SUTRADARA GINTINGS	AA-382	PDIP
2008 – 2009	H. ANDI M. GHALIB, S.H., M.H.	A-67	PPP
	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	A-274	PKS
	KETUA		
	ABDILLAH TOHA, S.E.	A-175	PAN
	WAKIL KETUA		
Drs. SIMON PATRICE MORIN	A-545	PG	
Dr. SUTRADARA GINTINGS	AA-382	PDIP	
Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A-49	PPP	
LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	A-274	PKS	

Catatan : Pada tanggal 22 Maret 2009, Dr. Sutradara Gintings meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.

Selain pengiriman Delegasi DPR RI ke luar negeri, BKSAP juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan konperensi-konperensi regional maupun internasional dengan menjadi tuan rumah (host). Penunjukan DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang/konperensi tersebut berdasarkan giliran dengan urutan alfabetikal atau bisa juga berdasarkan keputusan dalam sidang atau karena Ketua DPR-RI menjabat Presidensi dari sidang dimaksud. Selama kurun waktu 2004–2009, DPR-RI telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan konperensi parlemen regional sebanyak 6 kali dan konperensi internasional sebanyak 2 kali, sbb:

1. Pertemuan Tahunan ke-14 APPF di Jakarta tanggal 15 – 20 Januari 2006.
2. The First Meeting of AIPO Ad Hoc Committee on the Transformation of AIPO Into a More Effective and Closely Integrated Institution di Bali tanggal 22 – 26 Maret 2006.
3. The Second Meeting of AIPO Ad Hoc Committee on the Transformation of AIPO Into a More Effective and Closely Integrated Institution di Jakarta tanggal 26 – 30 Juli 2006.

4. Sidang ke-116 IPU di Bali tanggal 27 April – 4 Mei 2007.

5. APA Sub Committee Meeting on Alleviating Poverty in Asia di Jakarta tanggal 12-13 Juni 2008.

6. Sidang Pleno ke-3 APA di Jakarta tanggal 26 – 29 November 2008.

7. The First FASPPED Executive Bureau Meeting di Jakarta, tanggal 9 Juni 2009.

8. APA Sub Committee Meeting on Combating Corruption and Challenges and Opportunities of Globalization di Jakarta tanggal 18-19 Juni 2009.

Pada periode ini, Ketua DPR RI menjabat sebagai Presiden FASPPED dan Presiden APA. Sebagai tindak lanjut dari kepemimpinan tersebut, DPR-RI akan menyelenggarakan :

1. Sidang Executive Council APA pada tanggal 11 – 12 Agustus 2009 di Jakarta

2. Sidang Pleno ke-4 APA pada bulan November 2009 di Bandung, Jawa Barat

3. The 1st FASPPED General Assembly pada bulan Oktober 2010 di Indonesia.

Selain itu, dalam rangka memperoleh masukan bagi delegasi DPR yang akan mengikuti sidang ke luar negeri ataupun menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang regional dan internasional, BKSAP

juga telah mengadakan beberapa kali seminar dengan mengundang para pakar terkait dengan isu-isu yang akan dibahas dalam sidang. Selama periode 2004–2009, BKSAP telah menyelenggarakan seminar/workshop 3 kali yaitu tentang :

1. Seminar BKSAP DPR RI dengan tema “Posisi Indonesia Dalam Menghadapi Kemungkinan Pembentukan Parlemen Regional”, pada tanggal 3 Mei 2005.

2. Workshop BKSAP DPR RI dengan tema “Peran Parlemen Indonesia Mentransformasikan AIPO Menjadi Satu Institusi Yang Lebih Efektif dan Integratif”, pada tanggal 29 Juni 2005.

3. Ketua BKSAP menghadiri “Roundtable Discussion on Building the ASEAN Community: Prospects and Challenges” yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI pada tanggal 4 Agustus 2005.

Di samping itu, untuk kegiatan perayaan di lingkungan BKSAP periode 2004 – 2009 adalah :

1. Penyelenggaraan perayaan Ulang Tahun ke-30 AIPO dan Sosialisasi Transformasi ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) menjadi AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Berdasarkan mandat resolusi SIUM ke-27 AIPO No.

27GA/06/O-09 bahwa setiap anggota AIPO dihimbau untuk mengadakan perayaan Ulang Tahun ke-30 AIPO. Dalam rangka menindaklanjuti mandat tersebut dan memperingati Ulang Tahun ke-30 tahun AIPO serta sosialisasi transformasi AIPO menjadi AIPA, DPR-RI mengadakan Lomba Karya Tulis yang bertemakan 'Transformasi ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) menjadi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)' dan penerbitan perengko '30 tahun AIPA'. Adapun dewan juri penentuan pemenang lomba terdiri dari anggota DPR, DEPLU dan Pakar. Lomba karya tulis ini mendapat sambutan yang cukup banyak baik dari para akademisi, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum maupun dari staf DPR dan MPR.

2. Penyelenggaraan International Day of Democracy 2008. Anjuran IPU agar perlu diadakan perayaan International Day of Democracy di negara-negara anggota IPU, ditindaklanjuti oleh DPR-RI dengan mengadakan International Day of Democracy pada tanggal 15 September 2008 yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR, A. Muhaimin Iskandar. Tema yang diangkat oleh DPR dalam peringatan tersebut adalah pencahangan kegiatan pendidikan politik, khususnya publikasi kegiatan DPR-RI kepada generasi muda (Parlemen Remaja). Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam peringatan ini adalah simulasi kegiatan Rapat Kerja DPR-RI oleh sekitar 100 orang siswa SMU, pembacaan Universal Declaration on Democracy oleh siswa SMU dan pameran foto tentang perkembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Rencananya peringatan International Day of Democracy akan diselenggarakan setiap tahunnya oleh DPR-RI.

II. HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Keberhasilan Diplomasi DPR-RI di forum bilateral, regional dan internasional

Dalam pertemuan Sidang Tahunan ke-14 APPF tanggal 15-20 Januari 2006 di Jakarta, lahir sebuah Joint Statement on Terrorists in Bali yang mengutuk terorisme, khususnya peristiwa Bom Bali pada tanggal 1 Oktober 2005 yang telah menelan banyak korban jiwa baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan langkah baru yang dicetuskan forum ini selain menghasilkan Joint Communique.

Pada Sidang Pleno ke-3 Asian Parliamentary Assembly (APA) yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 26 - 29 November 2008, selain mengukuhkan Ketua DPR RI sebagai Presiden APA untuk periode dua tahun (2008-2010), Sidang juga mengesahkan Jakarta Declaration on the Urgency for the Establishment of a New Global Financial Architecture yang merupakan usulan Indonesia. Deklarasi ini berisi pernyataan bahwa dengan adanya krisis global yang melanda dunia saat ini, sangatlah sulit untuk mewujudkan lingkungan finansial yang stabil sehingga diperlukan langkah-langkah kolektif untuk mengatasi krisis termasuk pembentukan suatu sistem finansial global yang baru.

Pada tanggal 10 - 16 Januari 2009, Delegasi DPR RI yang hadir pada Sidang Tahunan ke-17 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) di Vientiane, Lao PDR, telah mengusulkan 3 (tiga) draft resolusi yaitu tentang Raising the Level of Trade and Capital Flow within Asia Pacific, Food Security, dan Humanitarian and Security Crisis in Palestine dan kemudian berhasil disahkan pada Pleno ke-5 dalam Sidang Tahunan tersebut.

Dihasilkannya Memorandum of Understanding (MOU) antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Amerika yang ditanda tangani pada tanggal 19 Februari 2008 oleh Ketua DPR-RI, Bapak Agung Laksono dan

Ketua House Democracy Assistance Commission (HDAC), David Price. Isi dari nota kesepahaman tersebut antara lain kedua belah pihak akan bekerjasama dan saling membantu dalam program pelatihan bagi Anggota Dewan, Staf Ahli, Staf Perancang Perundang-undangan, para peneliti serta staf Independen, dengan maksud untuk memperkuat institusi-institusi mandiri dari kedua belah pihak, khususnya dalam proses anggaran dan struktur tenaga ahli.

Dihasilkannya Joint Communique yang ditanda tangani oleh masing-masing Ketua GKSB dari DPR-RI oleh Bapak Prof. DR. Bomer Pasaribu dan Parlemen Kanada oleh Mr. Bryon Wilfert, P.C. dalam acara kunjungan GKSB DPR-RI Parlemen Kanada pada tanggal 27-30 April 2009. Isi Joint Communique tersebut intinya adalah kedua parlemen sepakat untuk saling mendukung terhadap kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Dalam isu Climate Change, di sidang ke-116 IPU di Bali tahun 2007 misalnya Indonesia berhasil mendorong dikeluarkannya Presidential Declaration on Climate Change sebagai respons terhadap kondisi negara berkembang yang lebih rentan dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi sebagai akibat dari Climate Change. Deklarasi ini meminta semua parlemen untuk melakukan upaya maksimal dalam penegakkan kebijakan dan perundangan mengenai Climate Change, meningkatkan kerja sama internasional berdasarkan atas tanggung jawab umum namun dengan porsi yang berbeda sesuai dengan the United Nations Framework Convention on Climate Change dan the Kyoto Protocol. Semua parlemen juga diminta untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai ancaman Climate Change dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghindari bahaya campur tangan manusia dalam sistem iklim. Selanjutnya DPR-RI juga mengajak parlemen anggota IPU untuk melakukan upaya lebih demi meningkatkan dan mengarusutamakan legislasi

peraturan internasional tentang lingkungan tidak hanya terbatas pada Kyoto Protocol tetapi juga terhadap Convention on Biological Diversity dan Convention to Combat Desertification serta konvensi-konvensi lainnya sebagai langkah penting pertama menuju etika baru dan pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Mengenai isu Myanmar, sebagai bentuk keprihatinan DPR RI atas situasi di Myanmar, DPR RI dalam Sidang ke- 117 IPU di Jenewa mengajukan emergency item berjudul *The urgent need for the Members of the Inter-Parliamentary Union to exercise concerted efforts for the speedy attainment of democratization and termination of the widespread human rights violations in Myanmar*. Indonesia mengajak parlemen seluruh dunia dan masyarakat internasional memberikan perhatian penuh kepada situasi Myanmar, mengingat telah lebih dari 18 tahun rakyat Myanmar menderita karena tindakan brutal dan tekanan psikologis serta pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah militer Myanmar. Dengan dukungan dari kelompok politik 12 plus dan sebagian besar Negara OKI, usulan Indonesia diterima untuk dibahas dalam sidang. Inisiatif Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa DPR RI tidak tinggal diam atas situasi yang memprihatinkan di kawasan, dikala parlemen negara ASEAN lain enggan memasuki ranah yang mereka anggap mencampuri kondisi dalam negeri walaupun hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional ataupun internasional. Sikap Parlemen atau DPR-RI dalam mensikapi isu Myanmar memang agak berbeda dengan sikap Pemerintah RI, namun dalam isu ini terlihat bahwa Diplomasi Parlemen berperan besar.

Mengenai isu Palestina, dalam Sidang IPU, APPF dan APA, DPR-RI gencar memperjuangkan Palestina. Statuta IPU mengamanatkan bahwa keanggotaan IPU terbuka bagi setiap parlemen yang terbentuk dalam sebuah negara merdeka, berada di dalam negara tersebut dan mewakili penduduknya, dapat mengajukan

diri menjadi anggota. Ketetapan tersebut mengakibatkan Palestina yang diwakili oleh PNC (Palestinian National Council) yang terdiri dari anggota parlemen Palestina yang berada di pengasingan tidak dapat mengajukan diri sebagai anggota, walaupun mereka selalu hadir dalam sidang-sidang IPU sebagai observer selama kurang lebih 31 tahun sejak tahun 1977. Pada awal tahun 2008, Palestina mengajukan permintaan afiliasi sebagai anggota ke IPU dengan menyodorkan perkembangan baru bahwa PNC adalah bagian dari PLC (Palestinian Legislative Council) sebagai hasil pemilu tahun 2006 yang berkedudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal yang mengangjal adalah Palestina belum dianggap IPU sebagai *sovereign state*, karena walaupun Resolusi UNGA no 43/177 tanggal 15 Desember 1988 mengakui proklamasi negara Palestina, namun Sidang PBB tersebut belum secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. DPR-RI memperjuangkan agar Palestina bisa menjadi anggota tetap IPU dengan melihat kenyataan bahwa anggota parlemen dari PLC yang berkedudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza banyak yang berada di penjara Israel dan walaupun ada yang lain mereka mendapat kesulitan untuk keluar negeri karena blokade Israel. DPR-RI juga mendesak agar Executive Committee membawa kasus ini ke Sidang Governing Council dan diputuskan oleh seluruh anggota IPU, tidak dibahas oleh Executive Committee saja yang anggotanya notabene banyak yang masih belum ingin melihat Palestina resmi duduk bersama menjadi anggota IPU, walaupun hal tersebut disampaikan tidak dengan terus terang. Akhirnya Sidang Governing Council secara voting pada Oktober 2008 menerima amandemen Statuta IPU sebagai cara untuk dapat menerima afiliasi Palestina pada sidang IPU berikutnya di Addis Ababa, April 2009. Hasil voting memperlihatkan 1219 suara mendukung, 90 suara menolak dan 230 abstain.

B. Keberhasilan DPR-RI menduduki Jabatan Penting di Organisasi Parlemen Regional dan Internasional.

1. Pada periode 2004–2009, beberapa anggota DPR-RI menduduki posisi yang sangat strategis di IPU, yaitu H. Abdillah Toha, SE sebagai anggota sekaligus Wakil Presiden IPU Executive Committee, Simon Patrice Morin sebagai First Vice President dari Standing Committee for Peace and International Security, Aisyah Hamid Baidlowi sebagai anggota Coordinating Committee of Women Parliamentarians, Luthfi Hasan Ishaq sebagai anggota Titular Komisi Middle East Questions dan terakhir Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi terpilih menjadi anggota Committee to Promote Respects for International Humanitarian Laws. Duduknya Anggota DPR RI di sejumlah jabatan organisasi internasional tersebut, tentu merupakan suatu pengakuan internasional terhadap integritas, loyalitas dan partisipasi aktif DPR-RI sebagai anggota IPU serta meningkatnya kepercayaan dan apresiasi IPU dan anggota parlemen dari berbagai negara kepada Grup Nasional Parlemen Indonesia.
2. Ketua DPR-RI, HR. Agung Laksono telah terpilih sebagai Presiden Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) periode 2005–2006; Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA) periode 2008–2010 dan Presiden FASPPED periode 2008–2012 (*ex-officio*).

BAGIAN PEMBERITAAN DPR RI
BEKERJASAMA DENGAN RRI PRO 3
MENGADAKAN SIARAN PARLEMENTARIA RRI

"BERSAMA WAKIL RAKYAT"

SETIAP JUM'AT PUKUL 10.00 – 11.00 WIB

IKUTI TERUS ACARA INI
DENGAN TOPIK-TOPIK YANG MENARIK

SAKSIKAN TAYANGAN

「PARIWARA」
PARLEMEN

Mengupas kebijakan produk DPR RI dan
isu-isu politik yang sedang hangat.



DI tvone SETIAP SELASA MINGGU I DAN III, PUKUL 10.30- 11.00 WIB.


TV PARLEMEN


TV PEMILU



Bung Parle

MENYOROTI DPR KITA PRIODE 2004-2009 YANG SEBENTAR LAGI SELESAI MASA BAKTINYA TAPI KINERJANYA BELUM MEMUASKAN...

O..YA..DARI FUNGSI YANG MANA ANGGARAN, LEGISLASI ATAU PENGAWASAN ?



DARI SEGI LEGISLASI SAJA, DPR BARU MENYELESAIKAN 70 % UU DARI TARGET 284 RUU YAITU BARU 196 UU....

TARGET 284 RUU BUKAN JUMLAH YANG SEDIKIT KAN BUNG ?



CK...CK....CK... PADAHAL PADA PRIODE 1999-2004 PRODUKTIVITAS PEMBUATAN UU HANYA BERKISAR 30-40 UU PER TAHUN...



KELAMBATAN KINERJA DPR INI JUGA KATANYA TAK LEPAS DARI HADIRNYA MAKAMAH KONSTITUSI, JADI DPR HATI-HATI DALAM PEMBAHASAN PEMBUATAN UU UNTUK MENCEGAH PENOLAKAN DI KEMUDIAN HARI...



AH...APAPUN ITU, MENURUT SAYA DPR TERLALU AMBISIUS DALAM MENGAJUKAN TARGET DALAM PROLEGNAS...IBARAT TRUK KELEBIHAN BEBAN, TERSEKOK-SEOK DAN MOGOK SEBELUM SAMPAI !!

DPR HENDAKNYA MEMBUAT PROGRAM YANG REALITIS SAJA, YA BUNG !

